


Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi & forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi ilmu kepolisian. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160
Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142
No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian
E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com



Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

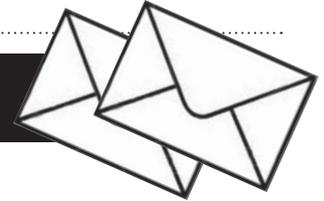
Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, SH, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Oerip Soebagyo
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Suwarto, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH. Prof. Dr. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Djaali Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kompol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi AKP. Suci Ramadhani, S.Kom. Warsiti Erna Yatmi, S.Pd Sujatmiko Agung Nugroho
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P Dwi Nurhayati, SH
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Aris Tarwoko Eka Agus Supriyanto



DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 6 **Pemantapan Strategi Implementasi Teknologi Informasi dalam Pendidikan Kepolisian**
Petrus Reinhard Golose
- 15 **Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)**
Sutrisno
- 28 **Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian**
Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma
- 43 **Kemampuan Cyber Digital pada Muatan Pendidikan Polri guna Menghadapi Konstelasi Keamanan Global**
Ilham Prisgunanto
- 68 **Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter guna Menyongsong Era Globalisasi**
Kalfaris Lalo
- 76 **Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SPN (Sekolah Polisi Nasional) guna Menghadapi Tantangan Keamanan Global**
Chairul Anam
- 85 **Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa**
A. Wahyurudhanto

.....



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 12, Nomor 2, Edisi Juli 2018. Edisi kali ini bertepatan dengan Dies Natalis Ke-72 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK. Bersamaan dengan Dies Natalis Ke-72, di kampus tercinta ini juga Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian S1 angkatan ke-71, 72 dan 73 serta wisuda pascasarjana S2 angkatan ke-5., Tema yang dipilih dalam rangka dies natalis adalah “Ilmu Kepolisian untuk Indonesia Aman dan Damai”. Maka untuk menyongsong dies natalis dan agar juga memberikan kontribusi terhadap tema tersebut, maka penerbitan kali ini memilih tema “Pendidikan di Era Milenial guna Menghadapi Tantangan Keamanan Global”.

Sebagai media yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi. Salah satu misi dalam lembaga pendidikan STIK-PTIK adalah menyiapkan perwira sarjana yang mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dinamika tugas di era milenial yang kompleks dengan berbagai permasalahan sosial, politik, ideologi, dan ekonomi yang kesemuanya akan bermuara pada potensi keamanan global. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

**Salam dari kami,
Redaksi.**



Pemantapan Strategi Implementasi Teknologi Informasi dalam Pendidikan Kepolisian

Petrus Reinhard Golose

Kapolda Bali

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK

Jl. W.R. Supratman No. 7, Denpasar Bali

E-mail: spripimpoldabali@gmail.com

Abstract

Implementation of information technology has an important influence in police education. At this time, Generation Z is a generation that has begun to fill the human resource and will be a leader in the police in the future. So the generation of Z is required to be a reliable generation to face global challenges in carrying out its duties to protect, protect and serve the community. Information technology is very important in the world of education considering the students today is a generation Z is absolutely depending to the internet. Now on police education institution has to improve the educational pattern in order to help Z generation in their study. Thus, the police student would well prepared to overcome the globalization challenge in the near future.

Keywords: Information Technology; Globalization; Generation Z; Education; Police

Abstrak

Implementasi teknologi informasi memiliki pengaruh penting dalam dunia pendidikan kepolisian. Pada masa ini, Generasi Z merupakan generasi yang sudah mulai mengisi sumber daya manusia dan akan menjadi pemimpin di kepolisian pada masa mendatang. Sehingga generasi Z dituntut menjadi generasi yang bisa diandalkan untuk menghadapi tantangan global dalam melaksanakan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Teknologi informasi sangat penting dalam dunia pendidikan mengingat para peserta didik saat ini merupakan generasi Z yang sangat dekat dengan penggunaan internet. Diperlukan strategi pendidikan untuk mendukung kebutuhan belajar generasi Z, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi di masa mendatang.

Kata kunci: Teknologi Informasi; Globalisasi; Generasi Z; Pendidikan; Kepolisian

A. PENDAHULUAN

Globalisasi menjadikan dunia terasa lebih kecil dan saling mempengaruhi. Globalisasi dipahami sebagai intensifikasi relasi sosial yang mendunia dimana peristiwa di tingkat lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di tempat yang berjauhan, secara timbal balik, peristiwa lokal juga memberikan pengaruh secara global (Giddens dalam Aas, 2007). Globalisasi membentuk jaringan dan arus transnasional akan barang-barang dan jasa, modal, informasi, hingga budaya. Dampak positif globalisasi adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Informasi dari belahan dunia dapat diterima dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio dan internet. Komunikasi untuk menghubungi orang lain yang berada di suatu tempat yang jauh lebih mudah dan cepat dengan menggunakan telepon, telepon seluler atau *e-mail*.

Selain itu, globalisasi juga telah mengubah pola pendidikan dari sistem belajar tatap muka ke arah pendidikan yang lebih modern dengan sistem belajar *online*. Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, dimungkinkan untuk diadakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media internet *e-learning*. Teknologi informasi dapat menjadi sebuah alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dunia untuk mencapai sasaran utama dari pembangunan yaitu pemberantasan kemiskinan, jaminan kesehatan dan pendidikan yang lebih efektif dari sebelumnya.

Dinamika globalisasi tidak selamanya positif, bersama globalisasi juga terbentuk jaringan kejahatan dan arus barang secara *illegal*. Beberapa bentuk kejahatan seperti penyelundupan dan perdagangan orang, Penyelundupan senjata, narkoba, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan, *cybercrime* hingga terorisme telah menjadi ancaman bagi keamanan global. Hal ini telah menimbulkan *fear of crime* dan *insecurity* bagi masyarakat di seluruh dunia.

Gambaran globalisasi ini secara nyata dapat terlihat dari pengaruh teknologi informasi dalam penyebaran radikalisme dan terorisme. Teroris memanfaatkan internet untuk kepentingan propaganda, perekrutan, pelatihan, penyediaan logistik, pembentukan paramiliter secara melawan hukum, pendanaan dan *cyber terror*. Informasi mengenai aktivitas dan serangan teror di penjuru dunia dalam sekejap dapat menyebar baik melalui pemberitaan maupun media sosial. Pemberitaan yang benar dan *hoax* beredar secara masif, menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Teroris pun bereaksi seperti menerima “sinyal” untuk turut melakukan serangan di mana pun mereka berada. Bisa juga dinamika di suatu negara dibalaskan dalam bentuk serangan teror di Indonesia, seperti dinamika Rohingya yang bertalian dengan serangan terhadap umat Budha di Indonesia dan serangan teror ke Kedutaan Besar Myanmar.

Ideologi radikal dan terorisme disebarkan melalui propaganda mereka di *cyber space*. Bentuknya sangat beragam, mulai dari artikel blog, *e-magazine* rekaman audio hingga penyebaran video melalui media sosial. Penyebaran ideologi ini menjadi sangat sulit dikendalikan, karena hampir setiap pengguna internet rawan terpapar ideologi radikal dan terorisme. Bisa kita bayangkan bagaimana dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi terhadap generasi muda yang cenderung menerima informasi dari media sosial.

Dinamika globalisasi kejahatan seperti yang telah digambarkan merupakan tantangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari sini Polri selalu dituntut profesional, modern dan terpercaya (Promoter) dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan demikian sangat penting untuk meningkatkan sumber daya di tubuh Polri melalui pendidikan yang juga modern.

Implementasi teknologi informasi dalam pendidikan kepolisian, tidak semata-mata dikembangkan karena faktor trend. Generasi Z sudah mulai mengisi sumber daya manusia dan hingga puluhan tahun mendatang akan menjadi pemimpin di kepolisian. Dalam hal ini generasi Z mempunyai peran penting dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Generasi Z lahir antara tahun 1995 hingga tahun 2010 artinya orang yang paling tua dari Generasi Z sudah berumur 21 tahun. Generasi Z masih dalam tahap mencari atau sudah punya pekerjaan. Karakteristik generasi Z ini memiliki ciri mendasar yaitu sangat akrab dengan teknologi informasi yang canggih, sebagai sumber informasi mereka akan dinamika lingkungan mereka. Pola dan preferensi belajar mereka sangat mengandalkan internet. Mereka memanfaatkan *educational technology (ed tech)* dalam pola pembelajarannya seperti *online video*, DVD, *digital textbook*, diskusi interaktif secara *online*, situs penyedia materi pelajaran dan *smartboards* (next.bncollege.com, 2017) Di satu sisi mereka sangat menikmati *virtual reality* sehingga lemah dalam kemampuan sosial dan interpersonal (Swanson, Territo & Taylor 2011, hlm. 396).

Pola pikir generasi Z cenderung serba ingin instan dan cenderung bergantung pada teknologi dan mementingkan popularitas di media sosial yang digunakan. Sehingga generasi Z rentan terpapar dan mudah terdoktrin dengan paham-paham radikal yang sangat mudah ditemukan di media sosial. Generasi Z merupakan generasi pertama yang benar-benar global. Generasi Z disebut sebagai integrator digital karena telah mengintegrasikan teknologi dengan mulus ke dalam kehidupan mereka. Hanya dengan beberapa klik saja informasi apa pun dapat terhubung dengan lintas negara dan budaya bak dunia tanpa batas. Generasi Z juga generasi yang paling terdidik secara teknologi yang sudah

diperkenalkan dengan teknologi informasi sejak dari anak-anak. Mereka adalah pengguna teknologi digital yang sangat intuitif dan percaya diri tanpa bantuan orang lain. Tumbuh dengan disosialisasikan secara signifikan oleh perangkat media elektronik seperti komputer (terutama dengan internet), ponsel, pemutar mp3, video game, DVD, televisi, TV berbayar, kalkulator, kamera dan kamera video (Generationz.com, 2018).

Sebagai generasi yang terlahir di era digital, akses internet telah menjadi kebutuhan bagi generasi Z, 93% anak-anak dan 97% remaja mengakses internet melalui perangkat *mobile* seperti *smartphone* atau iPad. Aktifitas yang paling banyak dilakukan oleh generasi Z dengan internet ini adalah berinteraksi melalui media sosial, menjelajah internet, bermain *game* dan mendengarkan musik (nielsen.com, 2018). Berdasarkan riset yang dilakukan Tim Riset Tirto pada tahun 2017 terhadap 1.201 responden rentang usia 7 sampai 21 tahun yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Tangerang dan Denpasar bahwa di Indonesia generasi Z sekitar kurang lebih 90% mengakses internet melalui *smartphone* dengan rata-rata 3-5 jam perhari. 35,2% diantaranya memilih sosial media untuk mengakses informasi. (mmc.tirto.id, 2017).

Berdasarkan sebuah penelitian bahwa perbuatan generasi Z banyak yang mengarah pada radikalisme dan bahkan muncul keinginan untuk jihad. Hal tersebut disebabkan dari salah satu bahan bacaan generasi Z yang kerap menimbulkan sikap-sikap intoleran. Seperti buku-buku ajar pendidikan agama, termasuk majalah, *leaflet* yang beredar di publik dan informasi yang didapat dari media sosial. Informasi kebencian, fitnah hingga hoax di media sosial dan ranah dunia maya sangat mudah diterima generasi Z sehingga sebagian besar anak muda memilih menjadi intoleran apabila menghadapi perbedaan pandangan keagamaan.

Semua peristiwa dan kejadian di Indonesia dianggap sebagai konspirasi yang menyudutkan agama tertentu. Hal ini juga menguatkan sikap generasi Z dengan sikap guru agamanya yang juga memiliki anggapan sama bahwa agamanya dalam kondisi terancam, tersingkirkan secara ekonomi, bahkan terancam hancur oleh umat lain. Generasi Z yang melek informasi dan teknologi paling rentan disusupi pemahaman agama yang cenderung menyimpang menuju radikalisme.

Untuk dapat menangkal paham-paham radikal dapat dilakukan dengan memposting media sosial dengan konten-konten yang baik, meluruskan, toleran dan menghargai keragaman. Membentengi diri dengan ajaran agama yang damai, cek kembali kebenaran berita-berita yang beredar sebelum *share* kembali, terbuka dengan keluarga, teman dan orang lain yang dianggap memiliki sifat bijaksana. Dan berkarya melakukan hal-hal positif (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018). Generasi Z lahir dalam masa krisis terorisme, resesi global dan perubahan iklim. Mereka diprediksi menghabiskan masa dewasa mereka di masa pembaruan ekonomi dan sosial. (generationz.com.au, 2018)

Dalam tulisan ini penulis berupaya memaparkan gagasan mengenai strategi implementasi teknologi informasi dalam pendidikan kepolisian, sehingga Polri selalu siap dalam menjawab tantangan keamanan global.

B. PENETRASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN POLISI

1. Implikasi Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan

Di bidang pendidikan, dampak teknologi informasi berpotensi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan teknologi

informasi batas-batas negara menjadi hilang demikian pula antara pendidikan, bisnis dan media sehingga berdampak pada aspek kehidupan perdagangan, hiburan, pemerintahan, pola kerja dan pola produksi.

Penyerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan tidak bisa dielakkan lagi. Para peserta didik saat ini merupakan generasi Z yang sangat dekat dengan penggunaan internet. Pola pikir mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang ada di internet, seperti bagaimana mereka menemukan jawaban pertanyaan melalui *Google search engine*, mereka mendapatkan gambaran realita dunia ini melalui internet. Kemudian dibandingkan dengan membaca artikel, mereka lebih menyukai menonton video yang menceritakan kembali isi dari suatu artikel. Generasi Z memiliki cara pemahaman yang cenderung visual melalui gambar-gambar, dibandingkan mendengarkan. Cenderung menyukai pola belajar *learning by doing* serta *trial and error* dalam pemecahan masalah. Mereka juga memiliki minat yang tinggi dalam berdiskusi dibandingkan diberikan penjelasan mengenai *problem solving* (Rothman, 2016).

Pengimplementasian teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar telah banyak mengalami perkembangan, terutama di kalangan universitas. Pengimplementasian ini bisa dalam *online resources, university e-environments, use of communication and collaboration ICT for learning, dan tools for production* (Lebeničnik *et.al*, 2015). *Online resource* memberikan kesempatan peserta ajar memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia secara online untuk terkait topik-topik pelajaran seperti akses video edukasi, video perkuliahan, e-book, artikel, paparan bahan ajar, atau mendengarkan podcast. Kemudian *e-environment* merupakan pemanfaatan teknologi yang lebih komprehensif, dimana teknologi informasi terintegrasi dalam satu *software* untuk memperoleh informasi tentang universitas, berkomunikasi dengan pengajar, pengumpulan

tugas, *review*, mengunduh materi pelajaran hingga berinteraksi dalam *online course and discussion*. *Use of communication and collaboration ICT* merupakan pengimplementasian teknologi informasi untuk membuka antar peserta ajar untuk saling berkolaborasi dalam *content sharing* hingga pembuatan jejaring sosial khusus para peserta ajar. *Tools production* adalah pengimplementasian peserta ajar dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dalam berbagai format multimedia.

Dikembangkan pula metode *blended learning* (BL), yang memadukan antara metode *e-learning* dan tatap muka. BL tidak hanya sekedar menempatkan teknologi sebagai tambahan dalam sistem pembelajaran, seperti pemberian materi suplemen dalam bentuk dokumen digital, akan tetapi cenderung merupakan *redesign* dari sistem pembelajaran. Salah satu bentuk BL adalah *computer-mediated activities*. Contohnya adalah pemanfaatan *video conference* dalam proses belajar, dimana terjadi tatap muka secara *online* antara pengajar dan peserta didik serta peserta didik dengan peserta yang lainnya. Dalam *computer-mediated activities* ini, pengajar menyampaikan instruksi-instruksi maupun persoalan, kemudian peserta berinteraksi untuk menyelesaikan tugas secara *online*. Kegiatan yang dilakukan bisa juga berupa *role play*, simulasi dan presentasi oleh peserta ajar. Kemudian dilakukan *assessment* dan evaluasi oleh pengajar (Medina, 2018).

Penulis pernah menjalani metode pembelajaran dengan pola *computer-mediated activities* pada saat mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan XX Lembaga Ketahanan Nasional (PPSA XX Lemhannas). Pada awal perkuliahan sempat diselenggarakan perkuliahan *e-learning*, dimana pengajar dan peserta ajar berinteraksi dan tanya-jawab terkait materi pelajaran yang diselenggarakan Lemhannas. Program seperti ini memberikan dirasakan memberikan fleksibilitas kepada

peserta ajar, karena dapat mengikuti perkuliahan dari mana saja pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu peserta juga dibekali modul-modul dalam bentuk digital.

Dalam penelitian terhadap proses belajar-mengajar berbasis *online* terdapat kesenjangan antara pengajar dan peserta ajar dalam penguasaan teknologi. Kesenjangan tersebut meliputi (Cilliers, 2017):

- a. Peserta ajar lahir pada internet era dan memiliki perbedaan karakteristik dari generasi sebelumnya. Sementara, pengajar jarang memperhatikan perbedaan yang dimiliki oleh generasi Z.
- b. Peserta ajar mengetahui bahwa mereka lebih menguasai teknologi dibandingkan pengajar mereka. Sementara, pengajar menyadari bahwa mereka memiliki kelemahan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Peserta ajar aktif sepanjang hari menggunakan teknologi informasi. Sementara, pengajar memanfaatkan teknologi informasi secara terbatas.
- d. Peserta ajar berharap bahan pembelajaran lebih memanfaatkan teknologi informasi. Sementara, pengajar mengetahui bahwa perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara lebih baik dalam pengajaran, namun mereka memiliki kemampuan terbatas dalam menindaklanjuti.

Tantangan lain dalam penyerapan teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan adalah menentukan teknologi yang tepat guna. Seiring dengan riset-riset mengenai karakteristik pembelajaran generasi Z, kalangan industri pun berlomba-lomba menawarkan berbagai macam perangkat keras dan lunak untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan untuk

menentukan teknologi yang sesuai yang meliputi (Gosper *et. al*,2007):

- a. Kesesuaian antara teknologi dengan kebutuhan peserta ajar.
- b. Mudah digunakan dan reliabel.
- c. Biaya yang sesuai dengan kemampuan institusi pendidikan
- d. Kemampuan teknologi yang digunakan mampu mendukung aktivitas dan proses belajar mengajar.
- e. Teknologi mampu mengakomodir interaksi antara peserta ajar dengan pengajar, serta sesama peserta.
- f. Kebaruan suatu teknologi.
- g. Kecepatan teknologi yang digunakan dalam memuat bahan pengajaran dan kemampuan teknologi bila terdapat penyesuaian serta pengembangan materi pengajaran.

2. Strategi Penerapan Teknologi Informasi dalam Pendidikan Kepolisian

Seperti sempat dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa saat ini Polri tengah dihadapkan dengan masuknya generasi Z baik itu sebagai polisi yang relatif muda maupun mereka yang masih menempuh pendidikan kepolisian. Itu artinya muncul tantangan untuk membekali mereka dengan kompetensi sebagai seorang polisi yang profesional, modern dan terpercaya. Terlebih mereka akan dihadapkan pada dinamika masyarakat yang berkembang semakin cepat serta konsekuensi globalisasi itu sendiri.

Ilmu kepolisian sendiri merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan data, informasi, teknik, alat, perspektif, konsep, dan/atau teori-teori yang

digunakan pada berbagai bidang ilmu lain untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yaitu, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ilmu kepolisian juga mencakup bidang studi yang mempelajari manajemen organisasi kepolisian, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, pengembangan teknologi kepolisian serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional, serta penyadaran pentingnya kontribusi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Tantangan saat ini yang dihadapi oleh pendidikan tinggi kepolisian seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian adalah pengembangan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta ajar saat ini. dengan pemantapan strategi implementasi teknologi informasi dalam proses belajar mengajar diharapkan agar ilmu pengetahuan yang diberikan mampu diserap dan diterapkan.

Dari sisi organisasi, institusi pendidikan patut memantapkan pengembangan *e-environment*. Pengembangan perangkat lunak maupun layanan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi perlu segera diwujudkan melalui:

- a. Menyelenggarakan riset yang komprehensif terhadap kebutuhan perubahan pola pengajaran terhadap generasi Z yang tengah mengikuti pendidikan kepolisian di berbagai level baik Akademi Kepolisian, pendidikan Bintara, pendidikan Strata 1 Ilmu Kepolisian. Seiring waktu dapat dikembangkan juga untuk pasca sarjana. Riset ini diperlukan untuk menentukan teknologi yang tepat guna dan terjangkau secara biaya untuk diterapkan.
- b. Para peserta didik dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan cara yang mereka pahami yaitu mengandalkan *gadget* yang

ada di tangan mereka. Pengembangan ini tidak hanya berupa penyediaan modul-modul yang dapat diunduh. Akses terhadap sumber-sumber yang reliabel seperti jurnal pun perlu diberikan kepada peserta ajar. Video-video yang memuat materi pengajaran dosen dapat diakses secara *online*. Untuk instruksi-instruksi yang bersifat praktik dapat dibuatkan dalam bentuk-bentuk grafis yang menarik maupun tampilan animasi yang menarik sehingga mudah dicerna dan dapat diterapkan secara mandiri oleh peserta ajar melalui *learning by doing*. Pengembangan materi ini dapat bermanfaat untuk memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dasar forensik, *crime scene handling* dan dasar *search and rescue*.

- c. Menyediakan peralatan-peralatan multimedia yang membuka kesempatan bagi peserta ajar untuk saling berkolaborasi untuk mempresentasikan kemampuan mereka dan diberikan evaluasi oleh pengajar. Sehingga terwujud pertukaran pengetahuan antara peserta didik.

Dari sisi implementasi diperlukan kesiapan para pengajar dalam menghadapi perubahan pola pengajaran. Harus dibangun *awareness* bahwa generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi pola mereka berinteraksi dan belajar. Permasalahan dalam pembelajaran dapat disebabkan oleh sikap kaku pengajar, dimana mempertahankan pola-pola konvensional yang sudah sempat dibakukan (Lombardo & Schoreder, 2013, hlm. 183). dan menolak untuk membangun lingkungan belajar yang kreatif. Padahal salah satu kompetensi pengajar yang digariskan oleh STIK adalah bersikap empati sehingga dosen dapat ikut memahami bagaimana mahasiswa melihat dunianya untuk membantu proses belajar (STIK, 2015, hlm. 102). Untuk itu pengajar perlu membekali diri dengan kemampuan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang bermanfaat

bagi proses belajar.

Bagi para pengajar barangkali terdapat kesulitan untuk menyesuaikan kompleksitas perkembangan teknologi informasi, sementara para peserta ajar merupakan generasi yang sangat fasih dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai strategi alternatif diperlukan pembentukan tim kreatif yang memproduksi materi-materi yang diperlukan, sehingga pengajar memfokuskan diri kepada cara membangun interaksi dalam mengajar dan menyampaikan materi dan mengevaluasi dengan baik.

Membangun kemampuan berkolaborasi adalah aspek yang sangat penting bagi pendidikan kepolisian saat ini. Tantangan penanggulangan kejahatan transnasional misalnya, membutuhkan kolaborasi kepolisian antar negara yang intensif. Para siswa harus diberikan kemampuan bahasa dan pengenalan teknologi kepolisian sehingga mampu menghadapi dinamika masyarakat. Selain itu membangun relasi dengan institusi penegak hukum asing dan lembaga internasional perlu diberikan perhatian, mengingat generasi Z sangat akrab dengan *virtual reality*, sehingga mengalami kesulitan dalam kemampuan sosial dan interpersonal.

c. PENUTUP

Sebagai besar para peserta didik di kepolisian saat ini merupakan generasi Z yang sangat dekat dengan penggunaan internet. Sehingga diperlukan penyerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan kepolisian untuk keseimbangan dalam dunia pendidikan. Pengimplementasian teknologi informasi dalam proses pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *online resources*, *university e-environments*, *use of communication and collaboration ICT for learning*, dan *tools for production, blended learning (BL)*, *computer-mediated activities*. Dimana dengan metode-metode tersebut pengajar dan peserta ajar akan

berinteraksi dan tanya-jawab terkait materi pelajaran yang diselenggarakan. Pembelajaran demikian akan memberikan fleksibilitas kepada peserta ajar, karena dapat mengikuti perkuliahan dari mana saja pada waktu yang telah ditentukan.

Ilmu kepolisian sendiri merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan data, informasi, teknik, alat, perspektif, konsep, dan/atau teori-teori yang digunakan pada berbagai bidang ilmu, untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Selain itu, juga mempelajari manajemen organisasi kepolisian, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, pengembangan teknologi kepolisian serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional, serta penyadaran pentingnya kontribusi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dan juga kepolisian akan dihadapkan dengan globalisasi kejahatan baru yang akan muncul di era teknologi informasi ini. Untuk menghadapi tantangan global tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Hemat penulis dalam pengembangan pendidikan Ilmu Kepolisian, *e-environment* dapat dikembangkan untuk menyeimbangkan kebutuhan generasi Z antara interaksi tatap muka dan pemanfaatan ilmu teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. (2017). *Selamat Tinggal Generasi Milenial, Selamat Datang Generasi Z*. Retrieved from <https://tirto.id/selamat-tinggal-generasi-milenial-selamat-datang-generasi-z-cnzX>, accessed 16 Mei 2018.

Barnes & Noble College. (2018). *Getting Know Gen Z Exploring Middle and High Schoolers' Expectation for Higher Education*. Retrieve from URL: <https://next.bncollege.com> accessed 16 Mei 2018.

Generation Z Born 1995–2009. Retrieved from <http://generationz.com.au/>, accessed 17 Mei 2018.

Gosper, M., Woo, K., Muir, H., Dudley, C. & Nakazawa, K. *Selecting ICT based solutions for quality learning and sustainable practice*. Australasian Journal of Educational Technology.

Lebeničnik, M., Pitt, I. & Istenič Starčič, A. *Use of Online Learning Resources in the Development of Learning Environments at the Intersection of Formal and Informal Learning: The Student as Autonomous Designer*. Center for Educational Policy Studies Journal.

Lubis, M. *Gen Z: Konsumen Potensial Masa Depan*. Retrieved from <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/GEN-Z-KONSUMEN-POTENSIAL1-MASA-DEPAN.html>, accessed 16 Mei 2018.

Medina, L. C. (2018). *Blended learning: Deficits and prospects in higher education*, **34 (1)**.

Mohr, Kathleen A.J. & Mohr, Eric S. (2017) "Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment". *Journal on Empowering Teaching Excellence*. **Vol. 1 : Iss. 1**.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2018). *Azyumardi Azra (3): Optimis, Generasi Milenial sebagai Agen Perubahan*. Retrieved from [https://www.conveyindonesia.com/muslim-ngefriend/2018/02/12/azyumardi-azra-\(3\)-optimis,-generasi-milenial-sebagai-agen-perubahan/](https://www.conveyindonesia.com/muslim-ngefriend/2018/02/12/azyumardi-azra-(3)-optimis,-generasi-milenial-sebagai-agen-perubahan/), accessed 16 Mei 2018.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2018). *Nurshadrina Khaira Dhania: Tips Biar Enggak Terpengaruh Gerakan Ekstrem*. Retrieved from <https://www.conveyindonesia.com/berita-actual/2018/02/28/nurshadrina-khaira-dhania-tips-biar-enggak-terpengaruh-gerakan-ekstrem/>, accessed 16 Mei 2018.

Rothman, D. *A Tsunami of Learners Called Generation Z*. Retrieved from http://www.mdle.net/Journal/A_Tsunami_of_Learners_Called_Generation_Z.pdf.

STIK-PTIK. (2015). *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press.

Swanson, Charles R., Territo, Leonard., & Taylor, Robert W. (2012). *Police Administration Structure, Processes and Behaviors*. United States of America: Pearson.

The Challenge Of Teaching Generation Z. People: International Journal of Social Sciences.

Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)

Sutrisno

Staf Pengajar Bidang Sosiologi STIK – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email: trisnosuki@gmail.com

Abstract

This article intends to track a number of categorized conditions as a threatening pattern of security in the millennial era. Meanwhile, universities are seen on the side of readiness in responding to the threat symptoms that move in the millennial era. The threat of sense of security in melanian era does come from information technology, but this article puts pressure on socio-cultural analyzes that twist the potentialities to escape the possibility of destructive conditions. The Writing is done exploratively-descriptive. The result is the cultural lag in responding to the flow of media technology. The university are left behind on facing millennial changes: the show is already running, just realized to make up the curriculum. Socio-cultural factors are the main handicap for universities in responding to millennial-era storming changes.

Keywords: Big Data; social segregation; feudalism

Abstrak

Artikel ini bermaksud melacak sejumlah kondisi yang terkategori sebagai pola ancaman atas rasa aman pada era milenial. Sementara, perguruan tinggi dilihat pada sisi kesiapan dalam merespon gejala ancaman yang bergerak pada era milenial itu. Ancaman terhadap rasa aman pada era milenial memang berangkat dari teknologi informasi, namun demikian artikel ini memberi tekanan pada analisis socio-kultural yang membelit berkembangnya potensialitas untuk lepas dari kemungkinan kondisi destruktif. Penulisan dilakukan secara eksploratif-deskriptif. Hasilnya, adalah ketertinggalan budaya dalam merespon arus teknologi media. Perguruan tinggi keteter menghadapi perubahan milenial: pertunjukan sudah berjalan, baru sadar hendak berbenah kurikulum. Faktor-faktor socio-kultural merupakan belitan utama bagi perguruan tinggi dalam merespon perubahan menghentak era milenial.

Kata-kata Kunci : Big Data; segregasi social; feodalisme

Pendahuluan

Sejarah peradaban masyarakat manusia hampir selalu dimulai dari temuan teknologi, baik teknologi *know how*, semacam demokrasi dan pembaharuan ajaran agama serta model organisasi, maupun teknologi fisik. Paling tidak, sepuluh tahun belakangan peradaban manusia dihadapkan pada lompatan sejarah baru yang disebut era milenial. Teknologi yang memboyong perubahan sosial era milenial ini perkawinan dua kategori teknologi: teknologi *know how* sekaligus teknologi fisik, yang tidak mempunyai preseden di sepanjang sejarah masyarakat manusia. Sejumlah spekulasi (*hipotesis*) mengemuka untuk memahami gejala perubahan sosial besar ini. Misalnya, analisis yang menekankan pada kisaran menjamur dan menguatnya populisme; struktur baru komposisi lapangan kerja; terpukulnya ekonomi konvensional, dan seterusnya. Artikel pendek ini bermaksud mengelaborasi konstruksi sosial (*social forces*) yang mengancam rasa aman pada era milenial ini. Dan, pada sisi ‘hulu’ melacak tekstur pendidikan tinggi dalam perespon ancaman atas keamanan itu. Elaborasi artikel ini sebatas pada level eksplorasi hingga diskripsi, tidak menjangkau kedalaman eksplanasi.

Peradaban milenial atau revolusi industri keempat, atau *revolusi industri 4.0* mulai dikenal pada kisaran 2011 melalui momen Hannover Fair. *Revolusi industri 4.0* dicirikan bukan sekedar penggunaan internet secara masif, tetapi yang mendasar adalah lompatan kecerdasan buatan melalui teknologi nano, hingga pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*. Sekedar mem-*flashback* ke belakang, pada revolusi industri 3.0 adalah tumbuhnya industri berbasis elektronika, otomatisasi, dan teknologi informasi. Sebelumnya lagi, revolusi industri 2.0 adalah pengembangan teknologi yang berimplikasi pada produksi massal melalui energi listrik yang semula mekanisasi dan energi

hanya berbasis mesin uap dan air, era ini revolusi 1.0. Tentu saja, issue globalisasi telah dimulai pada revolusi 1.0 pada kisaran abad ke-17. Dan, kemudian deretan temuan teknologi sejak 1.0 hingga 4.0 itu lompatan-lompatan perubahan sosial yang memampatkan interaksi sosial warga dunia. Kalau globalisasi era 3.0 adalah matinya ideologi (*the end of ideology*) dan homogenisasi budaya, maka pada revolusi 4.0 issue semacam itu meredup digantikan dengan disrupsi atas inovasi-inovasi era sebelumnya. Persoalannya: bagaimana lompatan besar revolusi 4.0 memformulasikan profil ancaman atas keamanan? Kemudian, bagaimana pula lompatan besar revolusi 4.0 ini hubungannya dengan perguruan tinggi (di Indonesia)?

Peradaban Milenial

Fisikawan Stephen W Hawking tidak optimis terhadap peradaban masa depan via temuan teknologi baru. Kekhawatiran yang sama juga dianut teoritis klasik Emile Durkheim dan Karl Marx. Pesimisme ini hampir tak berbeda dengan nubuwah agama-agama Timur Tengah (Islam Kristen, dan Yahudi). Dalam Islam, misalnya merujuk sebuah hadis yang diriwayatkan Anas Bin Malik, menyebut, “Sesungguhnya sebelum Dajjal muncul akan terdapat tahun-tahun penipuan. Pada tahun-tahun tersebut orang terpercaya dituduh, orang tertuduh dipercaya, dan Ar-Ruaibidhah berbicara”. Para sahabat bertanya: “siapa itu Ruaibidhah?” Beliau menjawab: “yaitu orang fasik yang berbicara tentang urusan manusia”. Baik Hawking maupun agama-agama Timur Tengah mempercayai signifikansi variabel mental dalam merespon gelombang besar milenial ketimbang elemen yang bersifat ekonomi dan kecerdasan otak kiri. Anwar Tjen, rohaniawan Katolik jebolan Universitas Cambridge, menjelaskan posisi Hawking ini di Harian Kompas, 20 Maret 2018, “Akselerasi teknologi canggih semisal kecerdasan artifisial,

internet dan teknologi digital dilihat sebagai jalan pasti menuju kepada tragedy kemanusiaan bila tak diantisipasi dengan visi dan strategi yang lebih manusiawi”.

Kejahatan alam maya (*cyber crime*), misalnya di Inggris, sudah diposisikan sebagai ancaman nasional. Ia dipandang bukan kejahatan biasa. Jika dilacak melalui konten wacana jenis kejahatan semacam ini cenderung terorganisasi. Anita Lavorgna dan Anna Sergi dari University of Southampton, United Kingdom menulis dalam *International Journal of Cyber Criminology* Vol 10 Issue 2 July – December 2016,

“organised crime has become inherently serious as consequence of its own securitisation process, mirrored in its current national security characterisation, cyber crime is becoming organised in the policy narrative because of its seriousness, which shall justify its inclusion within the national security agenda as well. This inclusion shall mean accessing the procedural benefits of criminal intelligence paired to national security threats. The implications associated to the evolution of such narratives in policy-making need to be assessed while policies are still developing”.

Kejahatan terorganisir telah menjadi serius sebagai konsekuensi dari proses sekuritisasi itu sendiri, tercermin dalam karakterisasi keamanan nasional saat ini, kejahatan *cyber* menjadi terorganisir dalam narasi kebijakan (lantaran) aspek keseriusannya, yang akan membenarkan inklusi dalam agenda keamanan nasional. Penyertaan ini berarti mengakses manfaat prosedural dari intelijen kriminal yang secara langsung berkontribusi terhadap ancaman keamanan nasional. Implikasi yang terkait dengan evolusi narasi semacam itu dalam pembuatan kebijakan perlu dinilai ketika kebijakan masih dalam proses.

Kemelimpahan pada era milenial, baik material maupun akses terhadap informasi, merupakan sumbangsih temuan teknologi tak dapat dipungkiri. Meskipun pada sisi lain kemelimpahan itu sendiri secara substantif masih layak menjadi bahan diskusi, utamanya menyangkut pemerataan dan biang keladi kejahatan. Ini Pekerjaan Rumah sepanjang sejarah peradaban.

Skema Ancaman Keamanan Era 4.0

Moral Insane

Dalam waktu tak lama atau sekitar lima tahun mendatang, tahun 2020-an, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, wajah Indonesia ditentukan oleh generasi milenial atau generasi Y, generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 – 2000. Generasi ini mempunyai karakter *connected*, selalu mengupayakan dirinya terhubung. Hasil riset Alvara Research Center (Ali: 2017), selain karakter *connected*, generasi era ini *creative*, berpikir *out of the box* dan percaya diri dalam mengemukakan gagasan. Bagaimana membaca hasil riset Alvara kaitanya dengan profil ancaman keamanan 4.0?

Temuan Alvara adalah ‘prediksi’ model (*ideal type*) manusia generasi milenial, sebagaimana tahun 70-an sosiolog McClelland mengkonstruksi jenis *type ideal* manusia yang mampu survive mengarungi modernisme. Manusia yang sanggup hidup dalam alam modern, demikian prediksi McClelland, mempunyai virus N-Ach. Tugas negara, kala itu menyuntikan virus ini kepada generasi muda agar mampu berkompetisi dengan negara lain dalam alam modern. Baik konstruksi model manusia milenial ala Alvara maupun manusia modern ala McClelland tidak memasukan dimensi moralitas. Bedakan dimensi moral dengan mental. Mental dalam wacana manusia modern ala McClelland mengacu kepada kemampuan bertahan dalam tekanan (*under pressure*) untuk mendapatkan *gain*

yang lebih besar di kemudian hari. Mentalitas ini diartikulasikan melalui tindakan rajin menabung. Tipikal mentalitas manusia yang dipahami dalam formatur semacam ini pun pada dasawarsa 2000 luntur melalui etos 'manusia interpreneur'. Menabung untuk mendapatkan gain bukan lagi instrument tipologi mental manusia unggul, karena orientasinya bukan lagi pada gain tetapi pada alat produksi. Menggerakkan seluruh alat produksi bukan sekedar untuk gain, tetapi untuk melipatgandakan alat produksi sebagai daya ungukit itu sendiri.

Disrupsi revolusi 4.0 dengan demikian bukan sekedar soal ketidakrelevanan (*irrelefan*) inovasi era 3.0 yang men-dislokasi pasar tenaga kerja sebagaimana dan segregasi sosial yang diurai di bagian bawah, tetapi lebih dari itu revolusi media sosial telah merampas lembaga-lembaga sosialisasi mapan yang berdimensi nilai moral. Tidak masalah kalau seandainya terjadi linieritas nilai moral yang diusung oleh media sosial dengan lembaga sosialisasi mapan yang ditinggalkan. "Kreatifitas" sebagaimana prediksi Alvara itu tidak bisa dibaca sebagai konsep yang telanjang, karena intervensi teknologi 4.0, penyebab banjir data itu, justru dengan sendirinya hambatan bagi kedalaman pemikiran. Maka dari sisi ini "kreatifitas" jika didefinisikan adalah harus memasukan unsur-unsur penguatan pada aspek pragmatisme. Kondisi ini membangkitkan (filsafat) relativisme, karena kehadiran pragmatisme -- baik secara diam-diam maupun terang-terangan -- mengusik nilai-nilai yang (telah) dipandang absolut oleh agen-agen sosialisasi lama (baca: era revolusi 3.0). Secara impresif dikemukakan oleh Donald Walters (2003;49), "...kejahatan itu hanya sedikit saja menyentuh nuraninya. Jika ditanya apakah dia tidak menganggap mencuri itu salah, dia menjawab dengan sebuah isyarat: segala sesuatu adalah relative". Ilustrasi ini utamanya cukup merepresentasi hubungan-hubungan sosial jagat medsos.

Teknologi informasi revolusi 4.0 yang memampatkan interkasi sosial dalam kerangka rasional instrumental untung-rugi, atau kalau tidak kalkulasi ideologik particular yang secara langsung ancaman bagi demokrasi. Dimensi moral mengacu kepada kepatuhan atau ketundukan atas nilai-nilai moralitas. Nilai moralitas -- paling tidak merujuk Imanuel Kant -- bersifat universal (standar). Moralitas universal dalam kerangka praksis-kolektif diartikulasikan pada sistem demokrasi. Yang menjadi persoalan arus besar wacana yang diusung temuan teknologi era millennium hampir secara imperativ mengalienasi manusia dari instrument moral. Sehingga demokrasi direduksi mejadi melulu prosedural. Demokrasi hanya soal angka-angka. Berhenti pada angka ini menjurus pada bentuk diktator mayoritas. Cara ber hukum pun kehilangan ruh moralitas. Bersama dengan ini adalah arus balik dari menguatnya ideologi kanan. Menguatnya arus kanan ini bukan tidak bisa ditelusuri dari mandulnya demokrasi itu sendiri. Belakangan, melalui ortodoksi keagamaan universalitas demokrasi dibongkar ulang. Melalui gerakan kelompok kanan dimensi moral direduksi. Kekerasan berbasis agama baik di luar maupun di dalam negeri sulit dipahami dalam kerangka dimensi moral.

Tipe ideal manusia yang *connected, creative*, berpikir *out of the box* dan percaya diri dalam berpendapat, bukanlah secara otomatis parallel dengan ruang tumbuh-kembangnya dimensi moral, justru sebaliknya. Disinilah persoalannya! Teknologi informasi yang menopang transfer kognisi dan skill tanpa harus tatap muka pada seluruh jenjang pendidikan justru reduksi atas transfer dimensi moral. Keluhan Said Irandoust, seorang Profesor Teknik Kimia Universitas Teknologi Chalmers, Swedia, adalah ilustrasi tepat. Di kolom opini Harian Kompas, 20 Mei 2018, ia menulis dengan mengutip Ralph Peters, "...paradox terknal pada aban ke-21 adalah

bahwa pada era teknologi yang kuat ini masalah terbesar yang kita hadapi secara internasional merupakan masalah jiwa manusia”. Sampai disini menarik menimbang kembali ujaran klasik leluhur Ki Hajar Dewantara, bahwa pembentukan moral anak didik harus melalui tiga spektrum: *tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo*. Spektrum ini hilang dalam sistem pendidikan karena tatap muka siswa-guru dan mahasiswa-dosen digantikan mesin. Reduksi ini terletak pada sosok pendidik hanya kelihatan pada dimensi kognisi, bukan moral.

Dislokasi Sosial

Disrupsi inovasi menggambarkan kompleksitas potensi aspek keamanan global. Kompleksitas ini utamanya menyangkut pergeseran kebutuhan tenaga kerja yang meruntuhkan relevansi kurikulum, utamanya pada pendidikan tinggi. Kurikulum Pendidikan tinggi yang berjalan puluhan tahun dalam mentransfer *skill*, pengetahuan, dan nilai moral tidak lagi relevan. Kalau era sebelumnya factor produksi bertumpu pada kekuatan modal dan memutakhirkan produk-produk yang dipandang memudahkan hidup manusia, maka pada era 4.0 faktor produksi itu terletak pada kapasitas pengelolaan informasi dan pengetahuan. Orang bisa berjualan tanpa harus mempunyai toko, berbisnis taksi tanpa harus mempunyai mobil. Penggalan ilustrasi ini menegaskan keterbukaan peluang pekerjaan baru, utamanya mendorong perkembangan produk berbasis pengetahuan daripada manufaktur. Rhenald Kasali menyebutnya sebagai *shifting*. Dalam artikel yang beredar via WhatsApp, Kasali menulis, “... dan masih banyak hal yang akan berpindah, bukan musnah. Ia menciptakan jutaan kesempatan baru yang begiru sulit ditangkap orang-orang lama...”

Gerak ekonomi tidak lagi didominasi produk manufaktur dan inovasi an sich, tapi

pada ‘penciptaan’ kebutuhan masyarakat atas produk. Menciptakan hasrat belanja melalui daring menjadi ruh kapitalisme hari ini. Ekonomi *daring* – belanja melalui *daring* – bukan sekedar memudahkan tetapi juga menjanjikan prestise. Turun dari mobil grab di loby kondangan mempunyai similaritas turun dari mobil menggunakan sopir pribadi.

Pergeseran hubungan antar manusia secara agregatif menumbuhkan potensi konfliktual melalui pergeseran kebutuhan pasar tenaga kerja. Prediksi Global Institute Analysis Mc Kinsey tahun 2017, sekitar 75 juta hingga 375 juta pekerja pada tingkat global harus beralih ke pekerjaan baru dengan skema keahlian yang lain sama sekali. Paling tidak terdapat dua implikasi pada ekonomi ini. Pertama, produk tenaga kerja berbasis pengetahuan berimplikasi pada daya serap tenaga kerja secara agregatif. Tenaga kerja pendidikan rendah pada level tenaga kerja ini jauh lebih besar prosentasenya tidak dapat terserap pada sector ini. Kedua, kondisi ini menekan ekonomi sector ritel yang justru menjadi kantong-kantong ekonomi Pendidikan rendah. Makna utamanya adalah peningkatan pengangguran. Sehingga, Kata kunci disini adalah: pengangguran. Profil pengangguran era big data tentu berbeda dengan era sebelumnya: kondusif bagi penawaran ideologi alternative sebagai solusi serta berita ‘gorengan’.

Segregasi via Big Data dan era terorisme jilid dua

Perubahan sosial via variabel independent teknologi bukan sekedar gegap budaya, tetapi utamanya pada dislokasi sosial-ekonomi: menguatkan segregasi sosial pada skala nasional dan global. Sebuah website forum ekonomi dunia – World Economic Forum – <https://www.weforum.org/agenda/2016/06/the-poetry-of-progress>, menulis, *It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological*

spheres. Era ini ditandai meleburnya teknologi yang mengaburkan aspek fisik dengan dimensi digital. Big Data --era banjir data-- justru melahirkan ketidakmenentuan (*Volatile*), ketidakpastian (*Uncertainty*), kerumitan (*Complexity*) dan kekaburan (*Ambiguity*).

Era Big Data ini tidak serta merta mencairkan pemikiran ideologik, justru sebaliknya. Disinilah segregasi yang paling serius sepanjang sejarah peradaban manusia. Teori globalisasi klasik yang memandang “teknologi akan menyatukan” terkoreksi. Ternyata mengerutnya dunia, merelatifkan jarak fisik yang memudahkan orang berinteraksi tidak serta merta ‘menyatukan’. Pada sisi lain, penyatuan dunia (*unity*) memang terjadi, tetapi perlu diberikan tanda apostrop. Ilustrasi paling nyata gara-gara medsos ini adalah segregasi post pilpres 2014. Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp, Telegram, telepon pintar yang merupakan teknologi khas milenial yang menjadi wahana menyebarkan ideologi dan propaganda. Ini tidak ditemui pada era terorisme jilid pertama. Hasil penelitian Brooklyn Institute pada 2015 (Kompas, 29 Mei 2018), bahwa Negara Islam di Irak dan Suriah menggunakan 46.000 akun media sosial Twitter dalam lima bahasa. Dan, lebih dari 1000 akun Facebook dimiliki simpatisan NIIS di seluruh dunia. Melalui angka ini sejumlah pakar teroris berpandangan bahwa jaringan media sosial jauh lebih berbahaya daripada pasukan NIIS di Irak, Suriah dan negara-negara lain.

Dalam rantang disrupsi inovasi, sulit sekali menghindari gegap budaya padahal pada sisi teknologi an sich mengalami derivasi teknologi. James Canton, seorang CEO pada Institute for Global Future di penghujung dasawara 2000-an menulis *The Extreme Future (2006)*. “Sains-sains aneh”, demikian Canton menyebutnya muncul secara revolusioner membangun gelanggang baru perang tak terlihat. Perang tak terlihat ini berlangsung sengit antara organisasi, pemerintah, dan agama untuk mengontrol

hak-hak individu dan pikiran serta kebebasan (individual) mereka. Di Indonesia perang tak terlihat ini membangkitkan kekhawatiran mendasar tentang cara berbangsa dan bernegara. Polling Kompas, 16 April 2018, menggambarkan profil kekhawatiran itu. Kekhawatiran responden terhadap ujaran kebencian yang menunggangi teknologi dunia maya menembus angka 81,3 persen dari jumlah 678 responden yang tersebar di 16 kota besar. Issue yang membuat kekhawatiran ini sejajar dengan realitas yang terjadi di belahan dunia lain: konflik berdarah berkepanjangan menyangkut agama dan identitas. Kehadiran teknologi infomasi yang menghubungkan interaksi antar manusia yang semakin inten dan masiv ternyata justru memperkuat segregasi sosial.

Agaknya tepat konsep ‘*cultural lag*’ untuk menjelaskan kekhawatiran tersebut, yaitu kesenjangan antara teknologi baru dengan kedewasaan berpikir atau keadaban menggunakan teknologi. Masih dari *polling* Kompas itu, cukup besar pengggam *gadget* yang akrab dengan berita maya tetapi tidak mampu membedakan berita hoaks dengan berita benar, 47,6 persen belum mampu; 46 persen responden merasa sudah mampu. Segregasi sosial pasca Pilpres 2014 tak mudah segera berakhir. Konstruksi baru kekhawatiran dalam berbangsa karena menembus standar moral, nilai, norma perilaku dan keyakinan masyarakat, sehingga instrument negara pun gamang dalam merespon perubahan sosial ini. Kegamangan merespon perang baru ini, misalnya diurai oleh Muladi (Harian Kompas, 15 Januari 2018), indikasinya paling tidak dapat dilihat dalam mengkonstruksi normative atas realitas kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Realitas ini meliputi LGBT yang privat, penggunaan narkoba secara personan untuk sekedar rekreasi, kumpul kebo, aborsi, poliandri, perzinahan sama-sama suka, inses. Syarat kriminalisasi yang mengendap dalam kesadaran cara ber-hukum terletak pada adanya korban (*victimizing*) baik vaktual maupun potensial.

Energi

Lompatan teknologi informasi yang serba memberi kemudahan segala hal dalam rentang waktu yang tak lama dunia dihadapkan pada tren energi. Padahal energi terkait seluruh pelayanan vital semacam kesehatan, makanan, transportasi, dan perdagangan. Sementara menggali energi terbarukan membutuhkan investasi amat besar. Tidak bisa tidak, umat manusia harus mengurangi ketergantungan pada energi minyak. Canton dalam kerangka ini pesimis terhadap perkembangan demokrasi, menyebutnya sebagai “demokrasi sedang di ujung tanduk” (Canton;31). Hemat penulis, spekulasi Canton bisa sebaliknya terjadi. Atau, toh pada bagian lain Canton berprediksi bahwa Sembilan puluh sembilan persen negara di dunia akan menjadi demokratis dan tak berdaya membendung perdagangan bebas serta pasar terbuka (Canton: 2009;68). Komunitas negara-negara arab, melalui Arab Spring, merupakan ilustrasi masa depan pintu demokrasi. Dan, Arab Saudi negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar di bawah raja barunya mulai merevisi paham teologi wahabi sebagai credo berpikir dan bertindak. Hemat penulis revisi credo ini akan lebih bersahabat pula dengan demokrasi.

Sehingga, teknologi informasi dan kelangkaan energi menjadi factor khas realitas era milenial yang tak tertandingi sepanjang sejarah yang memaksa setiap komunitas negara merespon demokrasi. Tatanan sosial skala global melalui demokrasi merupakan sistem yang menekan dan menjebol negara-negara yang semula menutup diri. Meskipun proposisi semacam ini sebetulnya proposisi lama tetapi tak pernah usang, pada ra ini demokrasi adalah kebutuhan survival itu sendiri.

Pendidikan Tinggi dan Ruang Sosio-Budaya

Hubungan sistem sosial budaya dengan

tekstur pendidikan tinggi dan konstelasi ancaman keamanan, meminjam cara pembacaan Talcot Parson, bersifat sibermetik. Sifat sibermetik ini tak sebagaimana dalam riset yang memperkosa realitas dengan cara memposisikan variabel dependen – independent. Dalam sibermetika Parson sistem sosial budaya tidak serta merta diletakan secara otomatis sebagai variabel independent yang mempengaruhi pendidikan atau keamanan. Tidak pula sebaliknya meletakan pendidikan sebagai variabel independent: kedua variabel bisa resiprokal. Sub bagian tulisan ini masih eksplorasi dari rentetan ancaman sebagaimana beberapa ancaman poin di atas dengan memperhatikan sibermetika Talcot Parson.

Kemelimpahan material era revolusi industri digenapi era-era revolusi setelahnya hingga revolusi 4.0. Namun demikian, deretan revolusi ini tidak dirancang untuk menyelesaikan Pekerjaan Rumah segregasi sosial dan moral. Sehingga dalam perspektif moral, teknologi menjadi destructive innovation yang dalam cara berpikir Marxian sebagai instrument eksploitasi efektif dalam pengertian vulgar menyepadani kapitalisme klasik. Demokrasi sebagai teknologi organisasi yang menjadi “messiah” masyarakat modern tak dalam waktu pendek segera mewujudkan janjinya. Jonathan Wolff (2004) dalam karyanya, “*Why Read Marx Today?*”, sangat membantu membongkar dimensi eksploitasi via teknologi canggih di era demokrasi ini. Referansi ini mengajak menimbang kembali relevansi proposisi Marx untuk era digital bahwa sejarah umat manusia pada hakekatnya adalah kisah tentang perkembangan kekuatan produksi dan tetap saja pertanrunan pemilikan alat produksi. Wolff memang tak begitu populer di kalangan pengamat. Barangkali karena mereka, para pengamat itu, memandang model kexploitasi klasik sudah tutup buku sehingga ‘eksploitasi canggih’ hari ini hanya mampu dijelaskan melalui pendekatan rumit berdimensi higemoni semacam

Antonio Gramsci, Habermas, Thodore Adorno, Piere Bourdieu dan sebagainya. Perspektif semacam ini menegaskan formulasi marxian tentang pendidikan yang tak bisa dilepaskan dari bias kelas. Jejaring birokratik negara tentu tak sanggup lagi mengelak mengadopsi formalitas jenjang Pendidikan formal tanpa mempunyai daya selektif pada sisi substantif-kualitatif. Realitas imperative ini nyaris membobol ruang moralitas, bukan saja pada birokrasi sebagai user, tetapi juga pada tata kelola pendidikan tinggi. Secara simplistik pembusukan ini utamanya terjadi melalui alpanya konstruksi kriteria prestasi dalam jejaring birokrasi. Sehingga hampir tidak ada tolok ukur reliable yang menghubungkan gelar pendidikan dengan kinerja. Kebekuan nalar birokrasi adalah mengidentikan jenjang pendidikan itu sendiri dengan prestasi kerja. Max Weber menyebutnya sebagai 'pembusukan birokrasi'. Birokrasi yang telah membusuk kehilangan elan vital melayani. Bukan lagi melayani kebutuhan (ke)manusia(an), sebaliknya mereduksi manusia menjadi hanya seonggok benda-benda yang melulu tunduk pada formalitas. Tidak lagi mampu menangkap yang substansi, karena dimensi formal lebih mendedapan dari dimensi substansial.

Era milenial membangun imperasi perihal kriteria standar kualitas pendidikan tinggi, tentu termasuk didalamnya penilaian terhadap akademisi. Misalnya, Scopus untuk klibat kualitas jurnal. (regulasi Menristek belakangan agak merevisi hal ini, tidak total). Kondisi ini ini merangsang mekanisme psikologi kultural pendidikan tinggi latah dalam jargon "*center for exxellent*". Jargon semacam ini lebih jauh direduksi dalam pemaknaan Global University. Terlepas dari diskusi perihal universalitas standar kualitas akademik, wacana ini merampas aspek nilai guna (pragmatic) lembaga pendidikan tinggi yang mustinya terlebih dahulu berorientasi manfaat bagi lingkungan terdekatnya. Sosiolog Amerika George Ritzer dalam konteks ini dengan jeli

melihat relasi pertarungan tarikan global dengan (kebutuhan) lokal. Ia merumuskan dalam bentuk pertanyaan,

"apakah perubahan global akan menyebabkan homogenitas yang semakin meningkat atau heterogenitas yang semakin meningkat atau sebuah campuran dari keduanya ? Dan, apa hubungan lokal dengan global? ...keunggulan lokal akan selalu dihubungkan dengan hiteroggenitas sementara dominasi global akan lebih dihubungkan dengan homogenisasi" (Ritzer, 2006;97)

Betapapun kritisisme Ritzer itu dilihat sebagai peringatan, secara teknis tak sanggup dihindari standar kualitas pendidikan tinggi mengkilbat ke luar. Seakan-akan kita (baca: Indonesia) tidak lagi sanggup meretas kriteria sistem pendidikan yang mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan sendiri. Ini debat panjang issue perihal universitas global. Andi Hakim Nasution, Rektor Institut Pertanian Bogor tahun 1978-1987, menolak terjebak dalam wacana kriteria global, alasannya kemanfaatan paling awal sebuah perguruan tinggi adalah kontribusi bagi lingkungan terdekat, bukan justru 'melayani' belahan dunia lain. Impotensi perguruan tinggi semacam ini pada dasawarsa 80-an disebut sebagai menara gading.

Feodalisme Baru dan Kebutuhan Adaptasi. Feodalisme dalam pengertian yang longgar merupakan batu sandungan bekerjanya sistem kuratif ilmu pengetahuan cartesian yang diusung sejak era pencerahan. Feodalisme lebih menghargai formaslitas, maka -- sebagaimana diurai di bagian atas -- produk pendidikan tersublimasi dalam arus formalitas ini. Persoalanya kemudian, bagaimana sistem yang menghargai serba oformaslitas ini bisa berusia panjang ? Max Weber memberi kisi-kisi menjawab pertanyaan penting ini: pembusukan birokrasi. Birokrasi yang sejatinya berjalan bekerja dalam formula yang serba kalkulatif,

efisiensi, herarki dan seterusnya itu pada akhirnya mempunyai resiko terpelesep pada formalitas yang membunuh kreatifitas . dalam birokrasi semacam ini tidak bisa lagi berkreasi, semua serba “turunan”, semua formal. “yang formal” ini biasanya mengandung kekentalan celebritas. Selebritas cenderung menghempas kualitas, tak lagi berharap tersedianya ruang kontemplasi dalam birokrasi.

Dalam kultur feodal sulit menghindari kooptasi birokrasi terhadap (sistem) pendidikan. Kooptasi ini pekerja melalui formalisasi yang memberangus kualitas berpikir kritis. Karakter kehidupan feodal yang serba menekankan nilai-nilai formal secara otomatis menafikan perbedaan. Perbedaan acapkali dipandang pembangkangan atas otoritas. Otoritas itu sendiri harus diberikan tanda apostrop (“otoritas”) untuk membedakannya dengan kebutuhan era milenial. Dalam masyarakat feodal otoritas mengalami personifikasi; sementara dalam era milenial otoritas terletak pada ‘kemasukakalan yang pragmatik’. Disinilah, jika tidak hendak terjebak dalam mal-fungsi institusi maka herarki birokratik perlu mengadaptasi semangat pragmatisme dalam narasi besar era milenial.

Formalitas sebagai anak kandung feodalisme membredel ruang pemikiran kritis yang justru sangat dibutuhkan dalam era milenial dimana gelandang kompetisi antar entitas negara bangsa jauh bergeser dari era 3.0. Perhatikan temuan riset Alvara yang dirilis di atas, sistem kehidupan milenial menciptakan anak manusia yang kreatif dan berpikir out of the box. Paling tidak, peran negara pada era milenial dipaksa mengkerut karena teknologi informasi menembus sekat-sekat entitas dan identitas sosial. Dan, revolusi besar sepanjang sejarah peradaban manusia terletak pada pergeseran konsepsi tentang hak milik atau property right. Konsep kepemilikan pada tingkat tertentu tidak lagi dikonstruksi (legitimasi) oleh negara, tetapi kemampuan (seseorang) atas kontrol.

Peradaban “Big Data” dengan demikian dalam perspektif ini menumpulkan pemikiran kritis. menjadi perselingkuhan birokrasi dengan sistem pendidikan tinggi Padahal, era 4.0 dengan profil yang mengedepankan “hasil” mendekati kembali (filsafat) pragmatism dengan wajah baru. Manusia yang dibutuhkan untuk mengisi meja-meja kerja bukan lagi bertolak ukur pada formalitas pendidikan (ijazah). Era formalitas cenderung berada dalam sekarat. Tak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting mampu menangkap tikus.

Sebagai sebuah sistem sosial budaya, feodalisme merupakan batu sandungan bagi pengembangan pendidikan akademik. Proposisi ini berlaku umum. Wright Mills (1956) menulis bahwa kekuasaan untuk mengontrol dan memimpin kegiatan masyarakat Amerika terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang. Struktur feodal membuat pengap pengembangan keilmuan karena ruang diskusi akademik tercemar. Formula akademik yang selayaknya didekati secara terbuka menjadi berbelit dalam jejaring birokratik. Dalam artikulasi yang lugas; kebenaran akademik terkooptasi otoritas ‘pendefinisi kebenaran’. Akan cukup sehat -- bukan saja bagi iklim akademik tetapi pula bagi penelusuran kebenaran akademik -- bila status otoritas pendefinisi kebenaran ini diperoleh pula secara koheren. Justru disinilah persoalannya. Dalam sistem sosial budaya feodal proses menapaki tangga otoritas pendefinisi kebenaran akademik pun terganggu. Proposisi semacam ini tidak sedang menegaskan bahwa perolehan tertinggi jenjang otoritas pendefinisi kebenaran akademik dengan sendirinya mengandung masalah, meskipun puluhan akademisi terjerat plagiarism. Ini hanya pucuk gunung es. Tidak diketahuinya kejahatan bukan berarti tiada kejahatan. Catatan telak amat memalukan dalam pelacuran akademik ini adalah penyelenggaraan ‘paket kilat’ gelar Doktor yang baru terbongkar pertengahan 2017. Realitas ini pucuk dari

gunung es yang tubuhnya mengendap di dasar laut. Mesin pendeteksi kebohongan lembaga akademik, hamat penulis, sedang tak berfungsi secara sehat pula. Kejahatan akademik dalam kultur masyarakat feodal semacam ini tak terlalu urgen untuk dibongkar. Selain terlalu kokoh belitan kultural, dari sisi kode hukum pidana tidak terlalu seksi, misalnya, dibandingkan dengan jenis kejahatan lain.

Istilah *new feudalism* atau feodalisme baru sebetulnya tak terlalu baru amat. *Issue neo feudalism* turut mencederai semangat akademik telah hadir meramaikan wacana public paling tidak sejak awal dasawarsa 80-an. Sejumlah cendekiawan menengarai, misalnya, gelar akademik menggeser gelar-gelar askriptif semacam raden, puang, bagindo, tuanku guru, dan seterusnya. Gelar askriptif pada prinsipnya merupakan gelar yang diperoleh secara keturunan darah namun kemudian pada era Pak Harto lah gelar ascriptif semacam ini secara relatif bisa 'dikreasi'. Elit dan pemimpin adat pada derajat tertentu tidak lagi berkolaboratif tetapi secara imperative harus haarus menundukan diri pada sistem pemerintahan. Pada gilirannya sistem adat termasuk didalamnya mekanisme adat yang semula mempunyai daya tangkal terhadap serangan pengaruh asing atas moralitas lokal mulai lumpuh. Konsep yang dipakai disini adalah homogenisasi budaya. Sebagian kalangan cendekiawan merayakan pesta homogenisasi budaya ini dengan mengusung pandangan rasionalitas Barat merupakan tiket bagi kemajuan atau progress (Alvin Yo So: 2013). Harga untuk mendapatkan tiket pembangunan harus dibayar melalui kelumpuhan kearifan lokal. Kisah panjang homogenisasi budaya tidak hanya terjadi di Indonesai. Di Indonesia, kelumpuhan kearifan lokal secara *structural* tereletak pada undang undang pemerintahan desa yang menyeragamkan semua sistem mekanisme

lokal. Undang Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa menyerimpung sistem imunitas masyarakat lokal, sekali lagi, dalam merespon arus pengaruh luar yang liar. Di Minangkabau, misalnya, guncangan besar pada era itu bagi otoritas moral Ninik Mamak.

Pada sisi lain gelar-gelar askriptif-adat cenderung menjadi agak 'terbuka'. Ia menjadi bisa dilimpahkan atau dianugerahkan. Orang batak bisa mendapatkan gelar ascriptif Jawa atau sebaliknya, alasannya yang bersangkutan memberikan kontribusi bagi adat (sistem adat) setempat. Istilah 'kontribusi bagi adat' tentu bukan tanpa perdebatan. Tentu saja cara membaca pergeseran 'inklusifitas' gelar budaya semacam ini secara sosiologis adalah melalui menguatnya variabel pergeseran struktur ekonomi dan pemerintahan. Meminjam Max Weber, pergeseran dari rasionalitas emotive atau tradisi kea rah rasionalaitas instrumental. Dalam kurun tiga dasawarsa pergeseran ini relative 'selesai', maka pasca reformasi gelar-gelar adat semacam itu tidak lagi seksi. Mulailah memasuki era baru, gelar adat digantikan gelar-gelar yang bersifat preskriptif. Gelar preskriptiv pada era ini lebih mempunyai makna bersahatan dengan modernitas. Inilah feodalisme baru! Ia hadir bersama menguatnya birokrasi negara (negara modern)

Pada gilirannya menguatnya teknologi informasi mengoreksi proyek modernisasi: term "pembangunan" tidak lagi menjadi ikon. Meminjam terminologi Fukuyama, situasi ini adalah disrupsi. Disrupsi ini memasuki seluruh relung kehidupan, tidak terkecuali pada institusi sector pendidikan dan keamanan. Gelar, tentu termasuk gelar akademis menjadi komoditas. Max Weber mewanti-wanti realitas ini dengan menjelaskan bahwa 'elit' cenderung bersifat kumulatif menguasai sumber-sumber komoditas yang lain. Semula gelar akademis menjadi hanya otoritas pendefinisi realitas, sepadan dengan "Mpu" abad ke-15 hingga abad ke-17. Mpu

Gandring, Mpu Senduk, Mpu Prapanca adalah professor-profesor pendefinisi realitas yang hidup asketik penjaga garda depan prinsip-prinsip moral. Kesibukannya terhadap karya hingga tak lagi mempunyai libido merambah dimensi kuasa.

Kedewasaan Akademik. Hadirnya komunitas disiplin ilmu (kelompok keilmuan) membantu beban negara mengontrol penyimpangan akademik. Pасalnya, belum lagi sampai pada tingkat kejahatan akademik, hukuman terhadap penerobos akademik secara otomatis 'disaring' pada komunitas kolega ini (c.q. komunitas ilmu/disiplin). Misalnya, dalam komunitas disiplin sosiologi ada APSI dan ISI. Meminjam terminology Parson, secara sibermetik penerobos rambu akademik 'diadili' di komunitasnya dalam mekanisme yang bekerja secara otomatis. Pасalnya, komunitas keilmuan yang mengikat disiplin keilmuan serumpun tak pula eksis.

Orientasi filosofis kehadiran komunitas keilmuan adalah sebagai induksi bagi kesediaan aktor akademik untuk – meminjam istilah Peter Berger -- berendah hati atas realitas. Jenjang kepangkatan akademik tertinggi pun dalam sistim ini masih 'dibimbing' untuk berendah hati memandang realitas: bahwa yang ia geluti/ketahui semata-mata sebatas obyek yang menjadi konsernya. Profesor semut hanya ahli di bidang semut; tidak mengurangi nilai kehormatan untuk sekedar mengatakan bahwa belalang bukan menjadi perhatiannya. Budaya feodal sebagaimana diurai di atas membredel kedewasaan akademik jenis ini: jenjang profesor dipandang sebagai serba tahu dalam segala hal. Sama halnya dalam masyarakat feodal, otoritas moral harus pula kaya secara ekonomi. Sasaran "bimbingan" untuk berendah hati bukan sekedar agar hamba akademik ini berkarya di bidangnya, tetapi era 4.0 Big Data ini sebagaimana diurai di atas menuntut kedalaman, artinya tegasnya: bukan keluasan.

Kerendahhatian dalam konteks ini menunjukkan kedalaman keilmuan (juga berarti kedalaman spiritual). Hikmah kebijaksanaan semacam ini menarik ditelusuri melalui referensi Kuntowijoyo (1999). Negara melalui Menristek agaknya memahami kondisi ini, prinsipnya penguatan evaluasi terhadap proses dan "mempertanyakan" ulang apa-apa yang dilakukan profesor.

Simpulan dan Rekomendasi

Strong statement elaborasi dalam cara pembacaan di atas adalah bahwa media sosial mengubah cara manusia memandang dunia; dan, tentu saja, kemudian menggeser pola hubungan-hubungan sosial. Saking masifnya media sosial hari ini merampas peran lembaga-lembaga sosialisasi yang mapan. Seandainya nilai-nilai sosialisasi yang dikandung media sosial linier dengan lembaga sosialisasi yang dirampasnya tentu tak akan terjadi disrupsi. Manusia "kreatif" yang dikonstruksi era 4.0 itu sendiri mengandung ancaman terhadap kehidupan kolektif. Akan lebih mengerikan menjamurnya generasi manusia yang kreatif minus moral. Fenomena segregasi social era revolusi 4.0 hanyalah konsekwensi dari kreatif minus moral.

Sehingga hipotesis yang dibangun tentang dunia yang semakin nyaman dihuni dengan teknologi informasi pada hari ini ternyata tak terbukti. Lembaga pendidikan tinggi seperti terkejut menghadapi realitas yang menghentak ini. Bukan sekedar keterkejutan terhadap apa yang terjadi atas (temuan) teknologi di luar sana yang melompat begitu cepat. Masyarakat perguruan tinggi baru ter/berpikir merancang antisipasi. Padahal pertunjukan telah dimulai, bahwa peran "pembentukan" jenis manusia baru itu justru diambil alih oleh media sosial, bukan oleh dirinya. Perguruan tinggi (di Indonesia) belum lagi tuntas menghadapi persoalan besar sudah harus dihadapkan pada lompatan besar disrupsi via revolusi 4.0. Persoalan itu, adalah

budaya formastik anak kandung feodalisme: adalah kisah lama yang persoalan klasik pengembangan (kreatifitas).

Rekomendasi. Dalam masyarakat feodal otoritas mengalami personifikasi; sementara era milenial otoritas terletak pada 'kemasukakalan yang pragmatik'. Maka, jika tidak hendak terjebak dalam mal-fungsi institusi perguruan tinggi perlu secepatnya merespon secara kritis melalui pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi mengikuti semangat narasi besar era milenial.

Pertama, Reposisi peran perguruan tinggi. Banjir data (*Big Data*) era milenial menuntut perguruan tinggi meredefinisi perannya. Banjir data parallel dengan berjalannya proses pendangkalan cara berpikir. Mengapa? Karena ruang diskusi --*public*, bahkan ruang "akademik"-- dimaknai sekedar sebagai perang data, bukan cara membaca data. Perguruan tinggi dituntut meluruskan proses ini dengan cara menghadirkan refleksi-refleksi kritis. Tentu saja, peran reflektif-kritis perguruan tinggi yang dimaksud bukan berarti banyak-banyak memasukan mata kuliah filsafat dalam kurikulum. Pemikiran semacam ini menggelikan. Orientasi reflektif untuk mengendalikan arus pendangkalan cara berpikir era 4.0 adalah dengan memberikan kontribusi kedalaman analisis atas segala fenomena/persoalan, caraya memperkuat ilmu-ilmu dasar.

Kedua, Reposisi peran Dosen. Peran dosen atau tenaga pendidik dalam era Big Data tidak relevan lagi sebagai "pemberi informasi", karena tentu akan kalah dengan mbah google. Peran dosen pada era 4.0 adalah penguat cara berpikir metodik-kritis (cara berpikir yang sehat dan mempunyai kedalaman). Istilah 'metodik' tentu bukan semata-mata menambah sks mata kuliah metode penelitian. Pembentukan pemikiran metodik-kritis hanya bisa hadir dalam interaksi (sistem pengajaran) yang demokratis.

Demokratis sejatinya adalah ikhwal relasi kuasa. Sistem pendidikan/pengajaran demokratis bukan sekedar teknis memberikan kesempatan bertanya dan berpendapat kepada mahasiswa, tetapi lebih dari itu: mahasiswa pun mempunyai otoritas menilai (kemampuan) dosen.

Ketiga, orientasi kontribusi. Pendekatan Ritzer atas realitas global(isasi) selayaknya diadopsi. Bahwa, globalisasi itu mengandung kontradiksi di dalam dirinya. Dalam kerangka ini, pengembangan pendidikan tinggi selayaknya diorientasikan pada kemanfaatan bagi lingkungan terdekat ketimbang jargon "gebyar" tag world university yang tidak memberi kontribusi nyata. Logika revolusi 4.0 Big Data adalah pada "kedalaman", bukan "keluasan". Godaan untuk "menjadi besar" dalam wadah struktur feodal hanya akan terjebak dalam formalisme. Ini menghambur energi. Lebih realistis, paling awal adalah menyelesaikan Pekerjaan Rumah struktur feodalisme itu sendiri, selain secara simultan berorientasi kemanfaatan bagi lingkungan terdekat.

Daftar Pustaka

Ali, Hasanudin dan Purwadi, Lilik.(2017). Millenial Nusantara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Beck, Ulrich.(2015). Masyarakat Risiko: Menuju Modernitas Baru. Bantul: Kreasi Wacana.

Berger, Peter dan Luckmann, Thomas. (1991). *The Social Construction of Reality*. USA: Penguin Books.

Canton, James.(2009). *The Extreme Future*, terj. Inyik Ridwan Munzir. Jakarta: Alfabet.

Chaubet, Francois.(2015). Globalisasi Budaya, terj. Feybe Mokoginta, Yogyakarta: Jalasutra, IKAPI.

- Collins, Randall.(1980).*Weber's Last Theory of Capitalism: a Systematizations, American Sociology Review*, hal. 925 -- 924
- Fromm, Erich.(2001). Konsep Manusia Menurut Marx, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich.(1995).Masyarakat Yang Sehat, terj. Thomas Bambang Murtianto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hayek, Friedrich. (2011).Ancaman Kolektivisme, terj. Ioane Rakhmat. Jakarta: Freedom Institute – Friederich Nauman Stiftung.
- Holiday, Ryan.(2016). *Trust Me, I'm Lying: Pengakuan Seorang Manipulator Media*, terj. Aswita Ratih Fitriani. Jakarta: Penerbit Change.
- Joesoef, Daoed.(2014). Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Jong, S.C.N. de.(1984).Sosiologi Pendidikan: Suatu Ikhtisar Teoritis tentang Pendidikan, Perkembangan & Modernisasi, Jakarta: PT. Sangkala Pulsar.
- Mills, C. Wright.(1956).*The Power Elit. New York*: Oxford University Press.
- Reimer, Everett.(2000).Matinya Sekolah, terj. Soedomo. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Ritzer, George.(2006). *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehidupan di Era Globalisasi*, terj. Lucinda Lett. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Smick, David M.(2009).Kiamat Ekonomi Global, terj. Arfan Achyar. Jakarta.Daras Books.
- Smelser, Neil.(1981). *Sociology*. USA: Prentice-Hall.
- So, Alvin Y. & Suwarsono.(2013). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Sugihartati, Rahma.(2014). Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.
- Walters, Donald. J. (2003). *Crises in Modern Thought*, terj. Widhi Nugraha. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wolff, Jonathan.(2004). Mengapa Masih Relefan Membaca Marx Hari Ini ?, terj. Yudhi Santosa. Yogyakarta:Penerbit Mata Angin.
- Lavorgna, Anita dan Sergi, Anna.(2016). *Serious, therefore Organised? A Critique of the Emerging*
- “Cyber-Organised Crime” Rhetoric in the United Kingdom. <https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/data-scientists-4-0>.



Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian

Rycko Amelza Dahniel

Gubernur Akademi Kepolisian
Jl. Sultan Agung 131, Candi Baru, Semarang
E-mail: ryckoad@gmail.com

Surya Dharma

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: surya_tendik@yahoo.com

Abstract:

This writing material tries to describe the views of David Weisburd and Peter Neyroud (2011) in an article entitled "Police Science: Toward a New Paradigm" published by Harvard Kennedy School, in the United States. This material is expected to broaden the knowledge and understanding of new developments and perspectives in Police Science especially within the University of Police Science and Police Sciences, University of Indonesia, which prints candidate leaders within the police institution. The view of the importance of adapting the norm of research-based policy in policing will make the police feel that they have a police presence. By bringing universities into the world of police is expected to encourage the police to have a sense of ownership of the police science which in turn will improve the policing undertaken.

Keywords: Paradigm, Police Science, Research-based policy, Policing.

Abstrak:

Materi penulisan ini mencoba mendeskripsikan pandangan David Weisburd dan Peter Neyroud (2011) dalam suatu artikel berjudul "Police Science: Toward a New Paradigm" yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School, di Amerika Serikat. Materi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan dan perspektif baru dalam Ilmu Kepolisian khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, yang mencetak calon-calon pemimpin dilingkungan lembaga kepolisian. Pandangan mengenai pentingnya mengadaptasi norma kebijakan berbasis penelitian dalam pemolisian akan menjadikan polisi merasa memiliki keberadaan ilmu kepolisian. Dengan membawa perguruan tinggi kedalam dunia polisi diharapkan dapat mendorong polisi untuk mempunyai rasa kepemilikan (*sense of ownership*) akan ilmu kepolisian yang pada gilirannya akan memperbaiki pemolisian yang dilakukan.

Kata Kunci : paradigma, Ilmu Kepolisian, Kebijakan berbasis penelitian, Pemolisian

Pendahuluan

Reformasi peran ilmu pengetahuan dalam pemolisian menjadi sangat penting sehingga pemolisian akan menjadi arena kebijakan berbasis pembuktian atau penelitian ilmiah (*evidence-based policies*). Perumusan kebijakan berbasis penelitian (*research based policies*) merupakan pendekatan yang penting sehingga kebijakan kepolisian dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dan cepat, tentunya penting bagi kepolisian untuk melakukan berbagai kebijakan dan perubahan yang inovatif dan kreatif serta mendapat dukungan dan legitimasi publik, dukungan penganggaran, dan peningkatan profesionalisme dalam melakukan tugas-tugas pokok kepolisian.

Dalam kaitan tersebut pandangan David Weisburd dan Peter Neyroud (2011) berfokus kepada hubungan ilmu pengetahuan dan pemolisian dengan berbagai fenomena pemolisian di Amerika Serikat. Paradigma ini menuntut kepolisian mengadaptasi, mengembangkan dan melaksanakan pendekatan "*evidence-based policy*" sehingga perguruan tinggi kepolisian dapat menjadi lembaga yang proaktif dalam melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menghasilkan berbagai praktek-praktek kepolisian yang lebih inovatif dan kreatif. Pemikiran ini diharapkan dapat menumbuhkan pergeseran "*sense of ownership*" dari suatu ilmu kepolisian yang ada di perguruan tinggi menuju rasa kepemilikan di kelembagaan kepolisian. Rasa kepemilikan (*sense of ownership*) tersebut akan memfasilitasi pelaksanaan "*evidence-based practices and policy*", dan akan merubah hubungan yang fundamental antara penelitian dan praktek pemolisian. Melalui cara ini juga dapat meningkatkan kredibilitas dan prestise ilmu kepolisian di perguruan tinggi serta mendorong lembaga kepolisian memiliki rasa kepemilikan

terhadap pentingnya ilmu kepolisian. Pada gilirannya lembaga kepolisian diharapkan dapat memperbaiki strategi, metode dan praktek-praktek pemolisian yang lebih inovatif, kreatif, profesional dan berkualitas untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi kepolisian di dalam dan luar negeri.

Selama dua dekade terakhir, ilmu kepolisian telah berkembang cukup pesat dengan mengembangkan praktek-praktek dan kebijakan baru yang mampu melakukan reformasi dan perubahan lingkungan kepolisian (Weisburd and Braga, 2006). Kepolisian yang dikatakan konservatif dan selalu menolak perubahan, telah menjadi suatu model bagi eksperimentasi sistem peradilan dan inovasi. Kepolisian telah menjadi pionier dalam pengembangan hubungan yang baru antara peradilan kejahatan dan pemolisian masyarakat. Mereka telah merancang strategi baru dalam mengawasi kejahatan, memperkenalkan "*problem-oriented policing*", "*hot spots policing*" dan berbagai bentuk inovasi lainnya sebagai strategi baru, termasuk diperkenalkannya teknologi baru seperti "*automatic fingerprinting system*" dan test DNA (Weisburd dan Neyroud, 2011). Kepolisian juga telah mengembangkan metode manajemen yang baru seperti Compstat, dan mengintegrasikannya kedalam teknologi baru untuk pencegahan dan pengawasan kejahatan melalui pendekatan analisis kejahatan yang inovatif (Ratcliffe, 2008). Metode baru tersebut mampu mendeskripsikan dan melakukan pemetaan kejahatan berbasis teknologi komputer.

Dalam usaha mengembangkan inovasi dan melakukan perubahan selama dua dekade terakhir, kepolisian telah meminta bantuan akademisi dan peneliti. Misalnya, dalam pengembangan Compstat di New York Amerika Serikat, para akademisi dan peneliti tidak hanya membantu untuk mendefinisikan mengapa pendekatan itu diperlukan (Bratton, 1998; Bratton dan Knobler, 1998), tetapi ilmuan seperti George

Kelling juga membantu dalam mengembangkan praktek-praktek kepolisian. Contoh lainnya adalah ditemukannya “Intelligence-led Policing” sangat terkait dengan dengan dunia akademis yang menemukan penggunaan alat analisis statistik yang canggih dalam menghadapi permasalahan kejahatan sehingga telah banyak kepolisian yang telah meminta bantuan peneliti untuk mengembangkan alat seperti itu (Peterson,2005; Ratcliffe,2008).

Misalnya juga pemolisian dengan “Hot Spots” pada mulanya berbasis dari penelitian ilmiah dan telah dijadikan subjek evaluasi yang ilmiah (Braga,2001; Sherman dan Weisburd,1995; Weisburd,2005). Dengan demikian, “police-researcher partnership” telah menjadi bentuk kerjasama dan hubungan yang penting sehingga keberadaan peneliti di lembaga perguruan tinggi kepolisian telah menjadi suatu kebutuhan yang substansial. Walaupun hubungan antara penelitian dan praktek dalam pemolisian sudah cukup baik dan penting, namun menurut Weisburd dan Neyroud,(2011), tetap masih ada hubungan yang terputus antara ilmu pengetahuan dan pemolisian.

Hubungan yang Terputus antara Ilmu Pengetahuan dan Pemolisian

Pengertian “ilmu pengetahuan” menyangkut metode dan teknologi secara luas yang dihadapi kepolisian selama beberapa tahun terakhir. Hal ini termasuk perkembangan dibidang forensik, seperti tes DNA, digital fingerprinting dan teknologi lainnya untuk memperbaiki cara deteksi dan identifikasi berbagai kejahatan. Hal tersebut termasuk juga ilmu social, yang sering diabaikan oleh kepolisian, tetapi mempunyai peran penting dalam melakukan analisis kejahatan, menilai dan mengkaji praktek-praktek kepolisian tradisional dan menciptakan strategi kepolisian yang inovatif. Melalui ilmu pengetahuan, dimaksudkan adalah

meningkatkan penggunaan model penelitian ilmiah seperti apa yang disebut dengan”Problem Oriented Policing (POP)”.

Menurut Weisburd dan Neyroud,(2011), walaupun majunya penggunaan ilmu pengetahuan dalam pemolisian dan kepemimpinan dan manajemen pemolisian, nampaknya ilmu pengetahuan masih belum bergerak pada tingkatan yang terpusat. Misalnya, masih banyak praktek-praktek kepolisian yang belum di evaluasi, dan kita masih mengetahui sedikit dan terbatas tentang apa yang sudah berjalan dan dalam kondisi apa pemoliannya (Weisburd and Eck,2004). Sebenarnya, “evidence based-model” untuk mengembangkan praktek-praktek dan kebijakan kepolisian belum secara luas di adopsi oleh lembaga kepolisian. Sampai saat ini strategi-strategi yang dikembangkan di lembaga kepolisian pada umumnya masih banyak yang di laksanakan tanpa berbasis temuan penelitian ilmiah. Banyak praktek-praktek pemolisian yang dilaksanakan tidak terkait dengan ilmu pengetahuan.

Sebenarnya “evidence-based policing” (Sherman,2002) bukan suatu aturan, tetapi banyak lembaga kepolisian yang tidak begitu tertarik menggunakan metode ilmiah untuk mengevaluasi berbagai program dan praktek di kepolisian. Suatu studi terkait fenomena ini dilakukan pada lembaga kepolisian di Eropa yang menemukan bahwa 5 dari 30 negara-negara di eropah menunjukkan nilai yang tinggi terhadap pentingnya penelitian ilmu kepolisian. Berbeda pada beberapa tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih banyak yang memandang rendahnya manfaat dari arti pentingnya penelitian ilmu kepolisian. Studi di Eropa tersebut menemukan terdapat dua karakteristik yang menyebabkan anggapan rendahnya manfaat studi di lembaga kepolisian yaitu (1) sedikitnya atau kurangnya permintaan studi dari lembaga kepolisian (2) pendidikan dan pelatihan di kepolisian kurang menggunakan

referensi ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah (Hanak dan Hofinger,2005).

Para praktisi kepolisian yang memiliki komitmen terhadap hasil penelitian ilmiah, juga mengakui bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan yang ada terkadang sulit di terapkan di lembaga kepolisian (Jaschke et.al;2007; Neyroud,2008; Weatheritt,1986). Banyak studi yang inovatif menggunakan metodologi yang sederhana,dan berfokus kepada pelaksanaan ketimbang desain , tetapi sering gagal untuk mengkaji isu-isu kunci seperti dalam hal transferability, kompleksitas dan keberlanjutannya (Weatheritt,1986). Berdasarkan penilaian tentang apakah suatu pemikiran dapat berjalan,pimpinan kelembagaan kepolisian yang inovatif mencoba untuk mendesiminasikan ide-ide secara lebih luas di lingkungan lembaganya, dan diluar lembaganya , tanpa suatu kegiatan penelitian ilmiah.

Masih banyak lembaga kepolisian yang tidak melihat ilmu pengetahuan sebagai suatu yang kritical terhadap setiap hari operasi yang dilakukan. Masih banyak yang berpandangan bahwa Ilmu pengetahuan bukan bagian penting bagi dunia kepolisian (Hanak dan Hofinger,2005; Jaschke et.al,2007). Berbeda dengan bidang kesehatan dan pendidikan yang memandang ilmu pengetahuan sebagai komponen yang esensial dan kritical dalam usaha meningkatkan pelayanan publik (Shepherd,2007). Dapat disadari bahwa pekerjaan polisi termasuk yang unik sehingga tidak mudah dibandingkan dengan ilmu sosial terapan lainnya, namun lmu kesehatan banyak memberikan manfaat bagi ilmu kepolisian. Secara keseluruhan dapat diambil pembelajaran penting bahwa ilmu pengetahuan telah berpenetrasi kepada praktek-praktek di berbagai bidang ilmu lainnya.

Sebagai contoh, coba kita bayangkan seandainya obat-obatan saat ini tidak memiliki infrastruktur penelitian yang besar untuk mendukung praktek -praktek

kedokteran dan kebijakan kesehatan masyarakat? Ilmu pengetahuan bernilai baik bagi praktisi kedokteran dan masyarakat umum. Sesungguhnya, pentingnya temuan penelitian oleh industri dan perusahaan obat-obatan yang ingin meningkatkan produk dan pelayanannya, memberikan ilustrasi pentingnya nilai ilmu pengetahuan dalam praktek bidang kesehatan pada umumnya. Dalam bidang pemolisian menurut Jonathan Shepherd,2007 dalam Weisburd dan Neyroud,2011) yang memperoleh “The Stockholm Prize” dalam bidang kriminologi yang sebelumnya banyak peneliti dan praktisi dibidang kesehatan meragukan kredibilitas penelitian ilmu sosial bagi kepolisian. Kepolisian sendiri sering tidak memandang penting terhadap sumbangan ilmu sosial bagi pekerjaan lembaga kepolisian.

Suatu ilustrasi nyata dari fenomena ini bisa ditemukan pada materi inti pendidikan dan latihan di kepolisian (Weisburd dan Neyroud,2011). Seorang peneliti dan praktisi di Amerika, Janet Chan melakukan studi tentang pandangan kepolisian yang mengatakan keprihatinannya terhadap pembuktian ilmiah (scientific evidence) atau evidence-based policing(Chan,Devery dan Doran,2003 dalam Weisburd dan Neyroud,2011). Pada akhirnya, ilmu kepolisian sering diabaikan sekalipun pembuktian cukup menyakinkan. Di Amerika misalnya, program “Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E) yang terus didukung dan diterapkan oleh lembaga kepolisian walaupun tidak efektif (Clayton, Cattarello and Johnstone,1996; Rosenbaum,2007; Rosenbaum et.al,1994).

Maknanya bahwa bukan hanya penerapan ilmu sosial yang telah terlupakan dalam program pemolisian. Misalnya di Amerika Serikat, “Lembaga National Academy of Sciences”melaporkan keprihatinannya mengenai identifikasi dan aplikasi ilmu pengetahuan di bidang identifikasi “fingerprint” dan forensik.

Laporan tersebut berargumentasi bahwa kepolisian terlalu bergantung kepada tenaga ahli dan kurang kritis dalam mengevaluasi ilmu pengetahuan yang mendasari teknologi tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa para ahli telah gagal untuk secara obyektif mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan teknologi. Disamping itu, terdapat juga hubungan yang kuat antara kelemahan dari penerapan metode ilmiah pada forensik dan kurang diterimanya ilmu pengetahuan sosial dalam pemolisian (Weisburd dan Neyround,2011).

Kepolisian telah lama tertarik tentang bagaimana teknologi baru dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pekerjaan polisi. Tetapi kepolisian jarang mengevaluasi bagaimana teknologi –teknologi baru mempengaruhi pemolisian, dan yang lebih penting lagi adalah apakah teknologi-teknologi tersebut membuat pemolisian lebih efektif (Weisburd dan Neyround,2011). Coba kita bandingkan pendekatan ini terhadap adopsi teknologi baru di bidang pertanian dan kesehatan (Gomez and Gomez,1984; Hunink et.al,2001; Sunding dan Zilberman,2001; Weinstein et.al,2003). Inovasi-inovasi tersebut tidak di adopsi secara luas tanpa evaluasi bagaimana dampaknya. Namun evaluasi ilmiah dalam pemolisian jarang dilakukan (Roman,et. al,2009).

Salah satu konsekuensinya adalah lemahnya nilai ilmu pengetahuan dalam bidang kepolisian dan lemahnya dukungan terhadap suatu ilmu pengetahuan dalam pemerintahan. Penelitian bidang kesehatan di Amerika dialokasikan pemerintah lebih dari US\$ 28 milyar dolar setahun . Di Inggris, penelitian kesehatan mendapat anggaran pemerintah lebih dari US\$ 981 juta dolar pertahun. Penelitian dalam bidang kesehatan gigi di Amerika mendapat anggaran pemerintah sebesar US\$ 389 juta dolar; bidang pendidikan menerima US\$ 167 juta dolar.

Namun penelitian dibidang peradilan memperoleh US\$ 48 juta dolar per tahun dan anggaran untuk evaluasi dan penelitian termasuk kepolisian sebesar US\$ 13.7 juta dolar. Penelitian bidang kriminologi di Inggris mendapat anggaran sebesar US\$ 3.3 juta dolar. Walaupun asosiasi kepolisian seperti “The International Association of Chiefs of Police (IACP) dan kepala kepolisian telah keberatan atas pemotongan anggaran masa lalu, tetapi usaha yang konsisten dan berkelanjutan untuk memperjuangkan tambahan penelitian masih diragukan (Weisburd dan Neyround,2011). Tanggapan keberatan atas kekurangan anggaran penelitian ini , tidak seserius dalam memperjuangkan anggaran terhadap pengurangan jumlah polisi dan peralatan polisi (Galloway,2004; Koper, Maguire dan Moore,2001).

Tulisan ini juga memfokuskan kepada tanggung jawab pemolisian untuk meningkatkan penggunaan dan kepemilikan ilmu pengetahuan. Nampaknya, dukungan akademis terhadap pemolisian, telah gagal memenuhi kebutuhan pemolisian. Permasalahan kurangnya infrastruktur ilmu pengetahuan dalam kepolisian telah menyebabkan kegagalan para akademisi kepolisian untuk menempatkan diri mereka selalu relevan dengan keseharian dunia kepolisian. Penelitian akademis pada umumnya terpisah dari dinamika kepolisian. Kepolisian beroperasi dalam realitas dimana keputusan-keputusan harus dibuat secara cepat, dan isu-isu keuangan dan efisiensi sama pentingnya dengan efektivitas. Tetapi penelitian pemolisian pada umumnya sering mengabaikan aspek-aspek dunia nyata di kepolisian. Seringkali hasil-hasil penelitian disampaikan jauh dari konteks dan relevansinya. Bahkan penelitian yang dilakukan, kurang berfokus kepada isu-isu yang menjadi minat kepolisian.

Isu-isu nyata dalam kepolisian sering sering kurang mendapat perhatian perguruan

tinggi. Dalam bidang kesehatan, keterlibatan klinik dipandang sebagai bagian penting dari suatu penelitian kesehatan, dan dosen-dosen di klinik terintergrasi kedalam ilmu kesehatan. Tetapi di kepolisian, aspek akademis kurang di kembangkan di perguruan tinggi sehingga peran penelitian juga kurang mendapat tempat penting dalam pengembangan model dan strategi pemolisian. Permasalahan yang bersifat “day to day” mempunyai kedudukan yang kurang penting di perguruan tinggi. Akhirnya, polisi cenderung kurang berminat mengembangkan dirinya sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi sehingga makin menjauhkan kepolisian dari kegiatan akademis (Carter dan Sapp,1990; Robberg and Bonn,2004).

Kita yakin bahwa reformasi peran ilmu pengetahuan dalam pemolisian menjadi penting jika pemolisian akan menjadi arena “evidence-based policies”. Kita juga meyakini bahwa peningkatan ilmu pengetahuan di kepolisian sangat diperlukan jika kepolisian akan mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, dan jika kepolisian akan mengurangi permasalahan yang menjadi tugas kepolisian. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan cara pandang terhadap peran ilmu pengetahuan dalam lembaga kepolisian. Kita menyadari pentingnya perkembangan dan keterbatasan pendekatan selama ini, sehingga kita perlu merubah paradigma kita terkait dengan hubungan antara ilmu pengetahuan dan pemolisian.

Paradigma yang menuntut bahwa kepolisian mengadopsi dan mengembangkan “evidence-based policy” dan menjadikan perguruan tinggi sebagai peserta aktif dalam praktek dunia kepolisian sehari-hari. Paradigma baru ini juga menekankan pergeseran rasa kepemilikan (ownership) akan ilmu kepolisian dari perguruan tinggi ke dalam lembaga kepolisian. Dengan pergeseran paradigma ini akan membuat ilmu kepolisian menjadi bagian integral dari pemolisian dan dengan cara ini akan

memungkinkan dikembangkannya pendekatan “evidence-based policies” untuk mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi dari paraktek-praktek dan kebijakan kepolisian. Paradigma ini menjadi esensial jika ilmu kepolisian akan memberikan bukti (evidence) bahwa praktek-praktek yang dilakukan polisi memperbaiki perlindungan dan keamanan masyarakat (Weisburd dan Neyroud,2011). Paradigma “evidence based policies” juga penting jika pemolisian ingin memperoleh legitimasi dan meningkatkan pandangan skeptis masyarakat terhadap pelayanan kepolisian (Ayling,Grabosky and Shearing,2000).

Realitas Saat ini: Kegagalan Memiliki Ilmu Pengetahuan dan Dampaknya

Ilmu pengetahuan dalam kepolisian memiliki sejarah panjang terkait dengan bukti forensic dan laboratorium kepolisian untuk menganalisis suatu pembuktian kejahatan. Kepolisian pada mulanya berfokus kepada analisis darah, bekas penembakan dan patologi dalam meningkatkan investigasi. Alat ini dikembangkan bersama dengan ilmu pengetahuan, terutama bidang kedokteran, dan dilanjutkan dengan pengembangan tes DNA dan pendekatan investigasi baru lainnya (Weisburd dan Neyroud,2011).

Sistim informasi dan komunikasi kepolisian juga merupakan bidang lainnya dimana ilmu pengetahuan telah mempengaruhi pemolisian dan secara berkelanjutan merubah hakekat operasi kepolisian. Nampaknya tidak perlu dipertanyakan bahwa teknologi yang terkait dengan penggunaan kekuatan seperti senjata or rompi pelindung petugas kepolisian telah memberikan manfaat dari keterlibatan ilmu pengetahuan dalam dunia kepolisian.

Penggunaan tes DNA , pengembangan rompi anti peluru dan berbagai jenis senjata-senjata yang tidak membahayakan

memberikan model untuk ilmu pengetahuan dalam pemolisian. Lembaga kepolisian telah mengembangkan dan menerapkan teknologi-teknologi seperti, dan pemerintah telah memberikan anggaran yang memadai untuk pengembangan peralatan kepolisian. Misalnya di Amerika Serikat anggaran National Institute of Justice (NIJ) telah menerima anggaran yang sangat signifikan terhadap berbagai peralatan teknologi tersebut dan peralatan tes DNA merupakan komponen yang paling besar mendapat penganggaran dari pemerintah Amerika (Weisburd dan Neyroud,2011). Kecenderungan ini sama dengan pemerintah di Inggris yang memberikan anggaran terbanyak pada komponen tes DNA dari tahun 1999 sampai 2007 (William dan Johnson,2008 dalam Weisburd dan Neyroud,2011). Ilmu pengetahuan “hard science”, seperti teknik, bioteknologi dan kesehatan telah berkembang pesat dalam pemolisian dan telah diterima secara luas oleh industri kepolisian. Namun demikian, Lembaga penelitian di Amerika “National Research Council” melaporkan bahwa penggunaan bukti forensic dari digunakannya ilmu pengetahuan, terkadang juga gagal karena kriteria ilmiah yang kurang jelas (weisburd and Neyroud,2011). Penggunaan teknologi oleh lembaga kepolisian di Amerika menurut Weisburd dan Neyroud (2011) seperti dalam kotak hitam (black box), yang artinya kepolisian menerima teknologi tertentu tetapi tidak pernah mengevaluasi teknologi itu sendiri. Para industri peralatan pemolisian dan ilmuan di Amerika telah membawa peralatan teknologi baru karena mereka bekerja dalam teori, tetapi hanya sedikit tentang bagaimana menggunakan teknologi sehingga mempunyai manfaat yang maksimal. Misalnya, dari investasi yang besar dalam tes DNA penggunaannya sangat terbatas pada pembuktian kejahatan sehingga dari segi “cost-effectiveness” kurang signifikan (Roman, et al,2009).

Apakah dengan digunakannya senjata baru membuat pemolisian lebih aman atau lebih efektif? Apakah penggunaan tes DNA memiliki “cost effectiveness” Apakah penggunaan system mobil patroli akan memberikan nilai tambah untuk patrol kepolisian? Kesemua pertanyaan tersebut penting untuk dijawab dalam mengadopsi penggunaan teknologi dalam lembaga kepolisian dan bila perlu dilakukan uji coba efektivitasnya. Kepolisian sering reaktif terhadap penggunaan teknologi yang diperkenalkan ke lembaga kepolisian dan jarang juga teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemolisian. Di beberapa daerah di Amerika dilaporkan oleh National Research Council (NRC) tentang complain terhadap kredibilitas teknologi yang digunakan terutama penggunaan analisis kejahatan (Weisburd and Neyroud,2011).

Banyak lembaga kepolisian di Amerika yang telah memiliki kemampuan analisis kejahatan yang tidak sekedar deskripsi statistik sederhana tetapi lebih canggih untuk mengidentifikasi pola dan konsentrasi kejahatan. Analisis itu dilakukan dengan system informasi berdasarkan geografik dan analisis wilayah. Dengan demikian kepala kepolisian secara cepat memperoleh jawaban tentang distribusi kejahatan secara periodic dan data tersebut dapat digunakan untuk melakukan sesuatu terhadap tindak kejahatan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dalam analisis kejahatan telah menjadi bagian yang integral dari lembaga kepolisian (weisburd,2008). Misalnya di Inggris, berbagai kerjasama universitas dan kepolisian seperti yang dikembangkan oleh “National Intelligence Model” (Grieve, et al,2008). Tetapi dikatakan bahwa di kebanyakan lembaga kepolisian masih terdapat permasalahan mencapai integrasi antara analisis kejahatan dan praktek pemolisian. Keterlibatan universitas dalam analisis ilmiah dan analisis kejahatan di kepolisian masih belum efektif.

Jikadibandingkan dengan lingkungan rumah

sakit sebagai laboratorium universitas dimana para ilmuwan kedokteran terlibat aktif dalam kemajuan dunia ilmu pengetahuan kesehatan. Para staf universitas ini diharapkan dapat melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Mereka di dorong untuk mencari temuan baru (discoveries) di dalam klinik mereka, dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh lembaga ilmu pengetahuan mereka. Tetapi lembaga kepolisian tidak seperti itu, tetapi mendorong anggota penelitiannya untuk mempublikasikan di jurnal kriminal. Bahkan kadangkala, lembaga kepolisian tidak mendorong anggota penelitiannya untuk mempublikasikan hasil penelitiannya yang akan merusak reputasi lembaga kepolisian. Dengan demikian, ilmu pengetahuan belum merupakan bagian dari pemolisian, sehingga dampak kualitas ilmiah terhadap unit-unit analisis kejahatan menjadi rendah .

Fenomena ini sering dijadikan argumentasi bahwa kepolisian tidak mempunyai sumberdaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti tersebut diatas. Tentu saja bahwa kepolisian tidak menempatkan prioritas dalam ilmu pengetahuan, sehingga dukungan anggaran terhadap dunia ilmu pengetahuan sangat kecil. Hal ini merupakan tantangan terutama bagi pemerintah Inggris dalam mengatasi pemolisian dengan pengembangan kerjasama penelitian antara universitas dan kepolisian. Kerjasama tersebut di Inggris memiliki peran dalam meningkatkan profil ilmu dalam lembaga kepolisian dan membawa teknologi dan keterampilan baru khususnya dalam analisis kejahatan.

Tantangan Kebijakan Pemolisian Berbasis Penelitian

Uraian diatas mengindikasikan sejauhmana lembaga kepolisian telah berhasil melaksanakan pentingnya kebijakan pemolisian berbasis penelitian. Didalam hal teknologi, kepolisian

bersifat reaktif terhadap ilmu pengetahuan dengan meminta bantuan jika ada hal-hal yang diperlukan, sehingga pendekatan ini menunjukkan bahwa pemolisian masih tetap berada diluar kebijakan berbasis penelitian. Walaupun suatu hal yang wajar bila dikatakan bahwa pendekatan berbasis pembuktian (evidence base) mempunyai keterbatasan, sehingga pengambil kebijakan tidak semata-mata menempatkan pendekatan tersebut sebagai keputusan. Hal ini akan berdampak serius bagi kepolisian dimasa yang akan datang. Pemolisian menjadi sangat mahal sebagai suatu lembaga publik, dan tanpa berbasis ilmu pengetahuan untuk melegitimasi nilai pemolisian, bahwa pemolisian akan terancam dengan alternative yang tidak berbiaya tinggi. Seperti pemolisian swasta dimana banyak peningkatan pelayanan pemolisian swasta (Bayley dan Nixon,2010).

Tanpa bukti ilmiah dan pendekatan ilmiah, pemolisian akan lebih mudah mendapat kritik dari politisi dengan mendorong pendekatan yang populer atau mengurangi anggaran kepolisian. Suatu realitas bahwa kepolisian melihat sedikit nilai dari penelitian akademik dan juga tidak banyak ilmuwan yang tertarik untuk memahami pemolisian (Bayley and Nixon,2010). Selanjutnya dikatakan bahwa banyak para ilmuwan yang senior dibidangnya tertarik terhadap pemolisian, tetapi secara bersamaan hanya sedikit prospek untuk penelitian ilmiah yang serius di kepolisian. Dinegara maju termasuk Indonesia, tidak banyak dana dialokasikan untuk penelitian pemolisian di bandingkan unit pelayanan public lainnya. Dengan banyak peneliti muda yang melihat pemolisian sebagai bidang kajian yang menjanjikan. Fenomena ini menjadi lingkaran setan, disatu pihak rendahnya investasi yang diberikan kepada penelitian dibidang kepolisian, dan di pihak lain terbatasnya kesempatan dan prospek karir bagi ilmuwan dalam kajian atau penelitian dibidang kepolisian (Weisburd dan Neyroud,2011).

Dampak yang menarik dari fenomena ini dalam bidang akademik dibidang kriminologi bahwa ilmu kepolisian merupakan spesialisasi yang kurang mendapat prioritas didalam disiplin ilmu kriminologi dan peradilan kejahatan (criminal justice). Jurnal Kepolisian pada umumnya berkualitas rendah di bandingkan jurnal-jurnal dibidang lain, sehingga apapun kualitas jurnal tersebut, jurnal kepolisian mendapat ranking yang rendah dalam tulisan ilmiah. Suatu yang sangat ironis bahwa bidang kajian yang mempunyai dimensi kebijakan yang penting dan signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi memiliki status yang rendah dalam status akademik. Hal ini tidak mengherankan karena kajian ilmiah kepolisian tidak terintegrasi dengan kurang mempunyai nilai di dunia kepolisian. Banyak yang merasa tidak memperoleh manfaat dan merasa penting sebagai suatu ilmu kepolisian.

Mungkin biaya yang paling penting dalam realitas saat ini adalah adanya gap antara penelitian ilmiah dan praktek pemolisian. Jonathan Shepherd (2004) mengatakan bahwa seperti halnya pemolisian, ilmu kesehatan merupakan seni dan ilmu. Tetapi sejauhmana pelayanan kepolisian didasarkan atas efektivitas berbasis pembuktian nampaknya pelayanan kepolisian tetap masih lebih rendah di bandingkan bidang pelayanan dibidang kesehatan. Bidang kesehatan memiliki 300,000 publikasi yang bersifat eksperimen lapangan dan masih ada 4800 publikasi yang masih dalam proses review . Praktek pemolisian saat ini telah memiliki petunjuk ilmiah yang lebih maju dibandingkan abad pemolisian sebelumnya (Weisburd and Eck,2004). Oleh sebab itu, menurut Weisburd and Eck (2004) sudah selayaknya perlu dialokasikan anggaran penelitian untuk mengkaji berbagai dimensi yang dilakukan polisi. Penelitian juga bisa dilakukan oleh berbagai lembaga lain yang ingin memberikan kontribusi terhadap perbaikan

praktek kepolisian. Weisburd and Eck (2004) memberikan analogi terhadap penelitian bidang kesehatan yang tidak saja dilakukan oleh kementerian kesehatan, tetapi banyak lembaga lain yang memberikan kontribusi terhadap penelitian kesehatan yang dilakukan mereka. Dengan demikian perkembangan ilmu kesehatan dan praktek kesehatan banyak didasarkan kepada temuan penelitian (evidence based policy).

Menuju Paradigma Baru Kepolisian

Bagaimana kita bergerak dari ilmu kepolisian ke pusat industry kepolisian? Apa yang dibutuhkan untuk pemolisian agar menjadi profesi yang berbasis pembuktian (evidence based profession)? Jawaban terhadap pertanyaan ini cukup sederhana, namun kita meragukan dan sekaligus menjadi tantangan atas kedua pandangan dari para praktisi polisi dan peneliti yang bersifat akademik. Untuk ilmu kepolisian menjadi sukses seperti cara perkembangan ilmu pengetahuan pada profesi lainnya, ilmu kepolisian harus bergerak kepusat industry pemolisian.

Penelitian ilmiah harus menjadi organ misi polisi secara alamiah. Ilmu pengetahuan harus menjadi bagian alamiah dari pendidikan polisi, dan pendidikan polisi harus berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam pemolisian harus menjawab pertanyaan apa yang kritical bagi fungsi polisi, dan harus menjawab permasalahan yang menjadi inti (core) pemolisian dan menjawab realitas yang dihadapi polisi setiap hari. Jawaban ilmu pengetahuan harus tepat waktu bagi polisi. Ilmu pengetahuan yang kurang berhasil dalam menghasilkan jawaban tepat waktu dan tepat momentum menjadi tidak relevan dalam dunia nyata yang dihadapi polisi.

Ilmu kepolisian harus menjadi bagian penting bagi dunia pemolisian. Keterlibatan polisi dalam ilmu pengetahuan harus menjadi nilai-nilai yang lebih umum dan berharga.

Untuk itu bisa terjadi, industry pemolisian harus mempunyai rasa kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu kepolisian sering tidak relevan terhadap dunia polisi saat ini karena ilmu kepolisian dianggap diluar pemolisian bukan bagian dari pemolisian (Weisburd and Neyroud,2011).

Polisi harus secara serius mengambil kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan, dan menerima dan menyadari bahwa polisi tidak bisa hanya bekerja dengan mengandalkan statistic yang sederhana, yang sering mempunyai temuan yang bias bagi pelaksanaan tugas polisi. Seperti disampaikan Ronnie Flanagan (2008) bahwa pemolisian merupakan lingkungan yang berisiko tinggi dan operasionalisasinya berada dalam konteks yang sangat politis. Suatu penelitian kurang bisa menyajikan temuan yang melihat dalam konteks ini. Tetapi dalam bidang kesehatan dapat kita analogikan atas hasil penelitian kesehatan yang menemukan bahwa penggunaan obat tertentu yang lebih efektif. Berdasarkan analogi itu, Sebaiknya di pemolisian juga bisa ditemukan suatu program yang efektif untuk mencegah kejahatan.

Polisi harus melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian yang integral dari misi polisi karena dapat membantu polisi dalam mendefinisikan program dan praktek-praktek pemolisian yang dijanjikan, dan membantu polisi menilai inovasi yang dilakukan dalam hal seberapa baik pekerjaan yang mereka lakukan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Praktek berbasis pembuktian (evidence-based practice) menjadi konponen kunci bagi lembaga publik dibidang kesehatan, pendidikan dan pemerintah (Sackett et al.,2000; Sanderson,2002; Slavin,2002). Dalam hal ini, pendidikan memberikan contoh instruktif tertentu kepada industry kepolisian. Pendidikan, seperti halnya pemolisian, bekerja dalam dunia desentralisasi dan lembaga independen. Sebelum abad 21, program pendidikan yang besar jarang di evaluasi, dan di Amerika hanya sedikit

investasi pemerintah federal dalam penelitian yang mempunyai kualitas tinggi (Cook,2001). Namun demikian, pada tahun 2009, setelah 7 tahun telah ditetapkan “Institute of Education Sciences” di Departemen Pendidikan di Amerika, dan diberikan anggaran \$ 167 juta dolar dan setiap tahun meningkat (Weisburd dan Neyroud,2011). Sejak itu ilmu pengetahuan berbasis penelitian telah berkembang cukup baik dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pengalaman ini, Weisburd dan Neyroud (2011) mengatakan bahwa ilmu kepolisian juga bisa melakukan hal yang sama. Jika polisi memilih untuk berinvestasi terhadap ilmu pengetahuan berbasis penelitian diharapkan akan meningkatkan nilai dan reputasi profesi polisi dikalangan publik.

Dalam konteks ini, tentunya merupakan alasan bagi polisi untuk mengharapkan pemerintah memainkan peran kunci dalam mengembangkan ilmu kepolisian. Salah satu komponen yang hilang dari ilmu kepolisian saat ini adalah keberadaan lembaga penelitian yang besar dan berkualitas yang diserawai leadership yang mampu mengembangkan penelitian untuk mendukung praktek pemolisian. Pada tahun 1970 an di Amerika, pemerintah dan yayasan mengembangkan lembaga yang disebut dengan Police Foundation, the Police Executive Research Forum, and the Research Arm of the International Association of Chiefs of Police. Tetapi, bagaimanapun keberhasilan lembaga-lembaga tersebut di dalam mengembangkan ilmu kepolisian, lembaga tersebut tidak bisa mengambil peran sentral terhadap entitas pemerintah seperti yang dilakukan Lembaga Kesehatan Nasional atau Lembaga Ilmu Pendidikan. Terdapat kebutuhan yang jelas bagi pemerintah yang akan memainkan peran yang sentral dalam ilmu kepolisian. Lembaga yang demikian itu dapat juga memberikan berbagai pedoman sebagai standar bagi lembaga polisi, lisensi dan akreditasi praktek kepolisian

kebutuhan untuk pengembangan profesi berkelanjutan, dan perbaikan untuk praktek pemolisian yang kurang efektif.

The National Police Improvement Agency (NPIA) di Inggris telah mengikuti pendekatan ini selama 3 tahun dan pemikiran ini juga tidak berbeda. Namun, kemunculan lembaga tersebut tidak lepas dari friksi, dan koalisi pemerintah telah memutuskan untuk mengeluarkan lembaga ini, dan membagi fungsi-fungsi yang ada dengan berbagai lembaga yang baru. Fenomena di Inggris ini perlu dipertimbangkan apakah kemajuannya akan dilanjutkan melalui transisi atau di kurangi anggarannya.

Tetapi lembaga yang demikian tidak dapat menciptakan ilmu kepolisian yang seperti diuraikan sebelumnya, khususnya di Amerika dimana pemolisian di desentralisasi ke beberapa lembaga independen. Lembaga polisi harus memprioritaskan ilmu pengetahuan, dan dalam melakukan praktek pemolisian perlu memasukkan ilmu pengetahuan kedalam kelembagaan dan menyarankan agar ilmu pengetahuan masuk kedalam pemerintah. Seberapa jauh pimpinan polisi saat ini melihat peran mereka sebagai penganjur untuk meningkatkan pendanaan untuk ilmu pengetahuan polis. Di Amerika, suatu hal yang biasa melihat pimpinan polisi di parlemen nasional meminta anggaran yang cukup besar untuk penelitian. Tetapi kenyataannya tidak, pimpinan di kepolisian umumnya tidak melihat penelitian polisi sebagai bagian penting dari tanggung jawabnya. Mereka cenderung melihat dunia akademik dan universitas yang bertanggung jawab untuk keperluan penelitian. Tentu, dari perspektif pemerintah, ada alasan untuk memberikan dana untuk ilmu kepolisian bilamana praktisi kepolisian berusaha memprioritaskan ilmu kepolisian dan penerapannya kedalam praktek kepolisian.

Perguruan tinggi harus menjadi bagian

penting dari infrastruktur polisi. Misalnya, dalam bidang kesehatan bahwa rumah sakit tidak selalu terintegrasi dengan pusat perguruan tinggi. Pada abad 19 integrasi perguruan tinggi dan rumah sakit merupakan inovasi utama.

Sebagai indikasi umum bahwa adanya kolaborasi antara Institut Ilmu Kepolisian di Cardiff University di Inggris. Institut tersebut telah mempresentasikan bentuk kerjasama antara Polisi South Wales, Cardiff University dan University of Glamorgan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan oleh polisi. Ini merupakan lembaga pertama, yang mengintegrasikan penelitian pemolisian, kebijakan dan operasi pemolisian (Weisburd dan Neyroud, 2011). Walaupun waktu sendiri yang akan menunjukkan apakah kecenderungan model medical center dalam bidang kesehatan yang diadopsi ini akan berhasil, namun model ini merupakan kecenderungan yang dapat diadaptasi dalam ilmu kepolisian.

Kita sering berpikir yang umum dan mungkin sudah saatnya kita berpikir yang lebih khusus seperti “profesir polisi klinis”, atau polisi spesialis dibidang penyidikan pembunuhan dan perampokan. Disamping itu diperlukan juga praktisi polisi yang memiliki pengetahuan yang didukung oleh anggota kepolisian. Maksud dari rencana ini bahwa universitas harus menilai praktek polisi dan memberikan reward kepada dosen yang dapat meningkatkan praktek-praktek yang ada. Lembaga kepolisian harus memiliki pengakuan ilmu pengetahuan dan memberikan reward kepada polisi yang terlibat dalam ilmu pengetahuan .

Perubahan lainnya yang kemungkinan terjadi jika paradigma yang dibicarakan akan berhasil, yaitu diperlukan pelatihan bagi polisi dan peneliti polisi di pusat pelatihan polisi. Analoginya dalam bidang kesehatan, para praktisi dan peneliti dilatih di rumah sakit (teaching hospital) universitas. Menurut

Shepherd (2001) hambatan utama dalam pengembangan ilmu kriminologi adalah para praktisi mempunyai sedikit pemahaman ilmu pengetahuan. Selanjutnya Shepherd (2001) mendorong adanya perubahan mendasar dalam pendidikan polisi dan peneliti polisi yaitu memperkenalkan “university hospital model” bagi dunia polisi. Melalui model ini diharapkan dapat memberikan peran penting didalam meletakkan penelitian polisi dalam lembaga polisi sehingga terkait dengan dunia nyata pemolisian. Tentunya, terdapat hambatan yang signifikan dengan model seperti ini. Kebanyakan lembaga polisi masih hanya membutuhkan tamatan sekolah menengah yang di rekrut. Walaupun telah beberapa tahun diperlukan sarjana dalam pemolisian oleh para ahli dan pimpinan kepolisian (Carte and Carte,1973, Roberg and Bonn,2004). Di Amerika resistansi dari persatuan polisi (police union) akan mempersulit untuk melaksanakan perubahan ini.

Secara umum, gerakan dari sedikit komponen pendidikan ilmu kepolisian kedalam lembaga polisi akan memfasilitasi perubahan yang telah disarankan tersebut. Polisi dan ilmu kepolisian harus berbagi pemahaman tidak hanya reailitas pekerjaan polisi tetapi juga persyaratan bagi kebijakan berbasis penelitian. Menjadi sangat sulit mengembangkan ilmu kepolisian tingkat tinggi bila polisi hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa ilmu dan apa yang dipersyaratkan. Bagaimna mereka menilai pendapat ilmu terhadap lembaga profesional mereka. Sama halnya, ketika peneliti akademis tidak memahami permasalahan riil yang dihadapi polisi dan realitas pemolisian, Sangat sulit dibayangkan mereka akan mengembangkan penelitian yang berharga tentang pemolisian atau penelitian yang diterjemahkan ke dalam dunia praktis dalam dunia pemolisian.

Secara singkat kita perlu melihat pengembangan infrastruktur praktisi akademik yang diterima disebagian bidang kesehatan dan pendidikan; website dan publikasi yang secara bersama digunakan dan berkontribusi terhadap dunia akademis dan praktisi sebagai pengguna; pengembangan profesi berkelanjutan, menunggu akreditasi, dan mendorong praktisi untuk mengadaptasi pembuktian berbasis penelitian dan berkontribusi terhadap bidangnya sendiri; menghargai dan mengakui praktek pemolisian yang berbasis penelitian. Peran pimpinan bidang ilmu kepolisian, lebih luas dari forensic dan merangkul semua aspek penerapan ilmu untuk pengembangan dan pelaksanaan pemolisian.

Pada akhirnya, tidak perlu di pertanyakan tentang keberhasilan lembaga polisi akan merubah jika ilmu kepolisian tidak ditempatkan sebagai program prioritas di lingkungan polisi. Sekarang ini, ada sedikit pressure dari publik untuk mulai menggunakan praktek dan kebijakan pemolisian yang berbasis penelitian (Weisburd and Neyroud,2011). Di Amerika Compstat merupakan satu inovasi dalam pemolisian yang sukses dalam menempatkan hasil, khususnya data kejahatan, dalam evaluasi kinerja pemolisian. Walaupun Compstat, bukan berbasis penelitian, tetapi Compstat telah berbasis kinerja dan diadaptasi di lembaga kepolisian di Amerika. Pengembangan Compstat argument kuatnya bahwa polisi sebagai sebagai industry perduli untuk menunjukkan perkerjaan polisi. Pergeseran berfikirnya adalah bagaimana menempatkan ilmu penegetahuan sebagai komponen kunci suatu evaluasi.

Visi perubahan menuju paradigma baru disajikan dalam tebal berikut ini (Weisburd and Neyroud,2011) . Selain perubahan secara incidental dan pengembangan dalam pemolisian, ilmu pengetahuan dapat digambarkan sebagai jantung pendekatan yang progresif dari pemolisian.

Dimensi	Paradigma Lama	Pemolisian Berbasis Ilmu
Pendidikan dan Latihan	Berdasarkan pengetahuan hukum dan belajar berbasis kerja	Ditemukan dalam ilmu dan menghubungkan pengetahuan saintifik dengan praktek dan pengembangan profesi berkelanjutan
Kepemimpinan	Pemimpin melihat ilmu suatu yang berguna jika mendukung initiative, tetapi tidak dilihat sebagai kebenaran jika tidak memberikan manfaat	Pemimpin menghargai ilmu dan melihat ilmu sebagai bagian penting bagi organisasi, staf, dan pengembangan lembaga dan penting bagi efisiensi, efektivitas dan legitimasi publik
Hubungan Polisi dan Akademis	Memisahkan dan membedakan struktur kelembagaan dan profesi	Jurusan kepolisian di universitas menggabungkan pendidikan dan penelitian, dengan hubungan kelembagaan yang kuat dan pertukaran SDM lembaga polisi setempat
Pengembangan Praktek	Praktek dikembangkan oleh inisiatif individu dan mandate politik	Praktisi dan lembaga berkomitmen secara berkelanjutan terhadap praktek penelitian dan evaluasi yang sistematis
Investasi dalam Penelitian	Terbatasnya komitmen nasional dan lokal atau individu untuk mengevaluasi inisiatif yang spesifik	Komitmen kepolisian untuk mengalokasikan dana penelitian, evaluasi dan pengembangan berbasis ilmu dan penelitian dalam kerangka strategi nasional untuk membangun basis pengetahuan secara menengah dan jangka panjang

Sejak awal rekrutmen anggota organisasi telah di berikan pelatihan dalam kerangka ilmu pengetahuan. Walaupun pengetahuan hukum merupakan bagian komponen penting bagi pemolisian yang efektif, para anggota yang direkrut perlu memahami pendekatan berbasis penelitian, tidak hanya legislasi tetapi juga strategi yang efektif untuk mempergunakan hukum demi kebaikan masyarakat. Mereka akan belajar, sebagai polisi profesional dan akan berkontribusi atas perluasan pengetahuan melalui penelitian dan eksperimentasi.

Penutup

Uraian tentang berbagai fenomena dan pemikiran diatas menunjukkan pentingnya mengadaptasi norma kebijakan berbasis

penelitian dalam pemolisian dan polisi akan merasa memiliki keberadaan ilmu kepolisian. Rasa kepemilikan ini akan memfasilitasi implementasi praktek berbasis penelitian dan kebijakan dalam pemolisian, dan akan merubah hubungan fundamental antara penelitian dan praktek. Hal itu juga akan secara fundamental merubah realitas ilmu kepolisian di lembaga pendidikan. Menurut Weisburd dan Neyroud (2011) , bahwa perubahan yang demikian dapat meningkatkan kualitas dan prestise ilmu kepolisian dan sudah saatnya untuk mendefinisikan hubungan antara pemolisian dan ilmu pengetahuan. Dengan membawa perguruan tinggi kedalam dunia polisi, dan diharapkan dapat mendorong polisi untuk mempunyai rasa kepemilikan (*sense of ownership*) akan ilmu kepolisian yang pada gilirannya

akan memperbaiki pemolisian yang dilakukan dan menjamin kehidupan organisasi dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik dibidang keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Ayling, J., Grabosky, P., and Shearing, C. (2009). *Lengthening the Arm of the Law: Enhancing Police Resources in the Twenty First Century*. New York: Cambridge University Press.

Weisburd, D. and Peter Neyroud (2011). *Police Science: Toward a New Paradigm*. Harvard Kennedy School. National Institute of Justice.

Weisburd, D. and Braga, A.A. (2006) *Introduction: Understanding Police Innovation.* In *Police Innovation: Contrasting Perspectives*, ed. D. Weisburd and A.A. Braga. Cambridge: Cambridge University Press.

Weisburd, D. and Eck, J.E. (2004). *What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder and Fear?* The Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Weatheritt, M. (1986). *Innovations in Policing*. London: Croom-Helm.

Bayley, D. and Nixon, C. (2010). *The Changing Police Environment, 1985-2008. New Perspectives in Policing Bulletin*. Washington, DC. USA. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Bratton, W.J. (1998). *Crime Is Down in New York City: Blame the Police.* In *Zero Tolerance: Policing a Free Society*, ed. W.J. Bratton and N. Dennis. London: Institute of Economic Affairs Health and Welfare.

Bratton, W. J. and Knobler, P. (1998). *Turnaround: How America's Top Cop Reversed the Crime Epidemic*. New York: Random House

Bratton, W. J. and Knobler, P. (1998). *Turnaround: How America's Top Cop Reversed*

the Crime Epidemic. New York: Random House.

Carter, D. L. and Sapp, A. D. (1990). *The Evolution of Higher Education in Law Enforcement: Preliminary Findings From a National Study*. Journal of Criminal Justice Education.

Clayton, R. R., Cattarello, A. M. and Johnstone, B. M. (1996). *The Effectiveness of Drug Abuse Resistance Education (Project DARE)*.

Gomez, K.A. and Gomez, A.A. (1984). *Statistical Procedures for Agricultural Research*. Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons.

Galloway, G. (2004). *Tools to Help Educate State and Local Officials About Your Agency's Homeland Security Funding Needs*.

Grieve, J. MacVean, A. Harfield, C. and Phillips, D. (2008). *Handbook of Intelligent Policing: Consilience, Crime Control, and Community Safety*. Oxford, England: Oxford University Press.

Hunink, M. G. M. Glasziou, P. P., Siegel, J. E., Weeks, J. C., Pliskin, J. S., Elstein, A. S. and Weinstein, M. C. (2001). *Decision Making in Health and Medicine: Integrating Evidence and Values*. Cambridge: Cambridge University Press.

Koper, C. S. Maguire, E. R. and Moore, G. E. (2001). *Hiring and Retention Issues in Police Agencies: Reading on the Determinants of Police Strength, Hiring and Retention of Officers, and the Federal COPS Program*. Washington, DC. USA.

Ratcliffe, J. (2008). *Intelligence - Led Policing*. Portland, Ore: Willan Publishing.

Roman, J. K., Reid, S., J., Chalfin, A., Adams, W. and Knight, C. (2009). *The DNA Field Experiment: A Randomized Trial of the Cost Effectiveness of Using DNA to Solve Property Crimes*. *Journal of Experimental Criminology*.

- Rosenbaum, D.P. (2007). *Just Say No to DARE*. Criminology and Public Policy. Washington, DC: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Assistance.
- Rosenbaum, D.P., Flewelling, R.L., Bailey, S. L., Ringwalt, C.L. and Wilkinson, D. L. (1994). *Cops in the Classroom: A Longitudinal Evaluation of Drug Abuse Resistance Education (DARE)*, *Journal of Research in Crime and Delinquency*.
- Roberg, R. and Bonn, S. (2004). *Higher Education and Policing: Where Are We Now? Policing: An International Journal of Police Strategies and Management*.
- Sunding, D. and Zilberman, D. (2001). *The Agricultural Innovation Process: Research and Technology Adoption in a Changing Agricultural Sector*. In *Handbook of Agricultural Economics Vol.1A*, ed. B.L. Gardner and G.C. Rausse. Amsterdam: Elsevier Science and Technology Books.
- Peterson, M. (2005). *Intelligence-Led Policing: The New Intelligence Architecture*.
- Braga, A. A. (2001). *The Effects of Hot Spots Policing on Crime*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*.
- Sherman, L.W. and Weisburd, D. (1995). *General Deterrent Effects of Police Patrol in Crime Hot Spots: A Randomized Controlled Trial*. *Justice Quarterly*.
- Shepherd, J.P. (2007). *The Production and Management of Evidence for Public Service Reform*. *Evidence and Policy*.
- Hanak, G. and Hofinger. (2005). *Police Science and Research in the European Union*. Vienna.
- Jaschke, H.G. Bjorgo, T., del Barrio Romero, F., Kwanten, C., Mawby, R. I. and Pagon, M. 2007. *European Approach to Police Science*. Vienna.

Kemampuan *Cyber Digital* pada Muatan Pendidikan Polri guna Menghadapi Konstelasi Keamanan Global

Ilham Prisgunanto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK,

Jl. Tirtayasa Raya 6 - Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telp. 021-7222234,

E-mail: prisgunanto@gmail.com

Abstract :

The world has entered the era of digital cyber characterized by the use of internet-based devices in all lines of life. Disruption phenomenon makes people aware of the shifting work in civilization of human life. It also occurs in the field of police work accompanied by rapid development in the world of criminality on the other hand. This paper wants to show the urgency of some of the competencies of police officers in the field. From the communication and information studies it is clear that the competence of skills that police personnel must possess is their understanding of the information itself philosophically, communicative reliability and public relations practice are also required in field work, plus netiquette in interacting with humans in the digital cyber world, preparation of the media agenda and understand the analysis of the content of existing communication media, but rather to digital media.

Keywords ; cyber-digital, information, competence, communication

Abstrak :

Dunia sudah memasuki era *cyber digital* yang ditandai dengan penggunaan gawai berbasis jejaring internet di segala lini kehidupan. Fenomena *disruption* menyadarkan orang adanya pergeseran kerja dalam peradaban hidup manusia. Hal tersebut juga terjadi pada bidang kerja kepolisian dibarengi dengan perkembangan pesat dalam dunia kriminalitas di lain sisi. Tulisan ini ingin menunjukkan begitu mendesaknya beberapa kompetensi kemampuan anggota polisi di lapangan. Dari kajian komunikasi dan informasi jelas, bahwa kompetensi kemampuan yang harus dimiliki anggota polisi adalah pemahaman mereka akan informasi itu sendiri secara filosofis, keandalan berkomunikasi dan praktik *public relations* juga diperlukan dalam kerja di lapangan, ditambah dengan *netiquette* dalam berinteraksi antar manusia di dunia *cyber digital*, penyusunan agenda media dan memahami analisis isi media komunikasi yang ada, tetapi lebih kepada media digital.

Kata kunci ; Cyber-digital, informasi, kompetensi, komunikasi

Pendahuluan

Perkembangan yang pesat pada dunia teknologi informasi telah mengubah wajah peradaban manusia. Apalagi dengan ditemukannya jejaring internet di era 1970-an yang menyebabkan perubahan pada tatanan dan konstelansi kehidupan manusia yang saat ini sudah mencapai pada tatanan masyarakat informasi. Prediksi-prediksi yang diberikan oleh para sosiolog modern terbukti dengan adanya fenomena *global village* dan terbukanya semua kran informasi di berbagai sektor kehidupan manusia. Prediksi yang sangat kentara adalah munculnya satu dunia lagi, yakni dunia maya yang saat ini dikenal dengan dunia digital yang dahulu dianggap sesuatu yang sangat absrub. Perkembangan yang pesat ini ditandai dengan revolusi digital yang ditandai dengan kegandrungan orang menggunakan jejaring internet dengan menggunakan gawai sederhana telepon pintar yang diproduksi massal oleh para pelaku industri besar saat ini. Penggunaan telepon cerdas *blackberry* seolah memecahkan keheningan orang tentang implementasi nyata jejaringan (*networking*) pada kehidupan manusia sesungguhnya.

Teknologi yang semula hanya dianggap sesuatu yang menakutkan saat ini malah menjadi sahabat dan menjadi sangat perlu dalam keperluan pada efektivitas dan efisiensi kerja manusia dalam bekerja dan berinteraksi satu dengan yang lain. Temuan demi temuan dalam konteks digital sedemikian pesatnya sehingga memunculkan tatanan baru dalam peradaban manusia yang mampu menghilangkan segala kendala dan problematik pelik manusia yang terpecahkan. Perkembangan dalam dunia digital berbasis web (jejaring internet) di segala sektor yang melekat pada semua pertumbuhan industri menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan interkoneksi dengan jejaringan tersebut setiap saat, dimana saja dan kapan saja.

Kemampuan jejaring yang memiliki kemampuan komputer bisa saling terhubung satu dengan yang lain (interkoneksi) menyebabkan dunia semakin kecil dan sempit dan mudah dijangkau. Manusia bisa terhubung satu dengan yang lain, bahkan jejaring koneksi tersebut bisa leluasa masuk dan menerobos rumah-rumah, kantor dan semua tempat tanpa dapat dibatasi, dihalangi dan dihalau. Bukti nyata dengan maraknya praktik *hacker*, *cracker* dan *skimming* kartu kredit yang marak saat ini dimana dan kapa saja mengintai kehidupan manusia.

Isu-isu disruptif dengan pergeseran pada fungsi dan kerja adalah sebuah konsekuensi logis dari kerja sebuah sistem. Temuan-temuan baru dalam dunia jejaring sosial media mengubah semua pola interaksi manusia yang semula tanpa tatap muka, saat ini harus dalam tatap muka (*interface*) meski itu hanya tatap muka yang palsu. Dengan manusia bisa saling berinteraksi menyebabkan hubungan antar manusia makin kuat dan mereka bisa berbagi informasi secara cepat dan tepat sehingga segala sesuatu didiskusikan dan dirembukkan dalam upaya mencari jawaban dan solusi akan problematika yang ada.

Alhasil dengan saling terhubungnya antar manusia menyebabkan dunia semakin sempit, dan tidak ada lagi batas dan tembok yang bisa menghalangi hubungan antar manusia. Demikian juga dengan birokrasi dan yang panjang bisa dipangkas dengan adanya jejaring informasi yang ada. Terciptanya kampung global (*global village*) benar-benar terjadi dengan kemunculan dunia baru yaitu dunia digital atau *cyber* yang saat ini semakin nyata ada dan dunia tersebut memiliki karakteristik dan keunikan yang jauh berbeda dengan dunia nyata yang ada.

Dunia digital mengalami pergeseran mulai dari era 1.0 dimana penggunaan komputer masih Main Frame yang sedemikian besar dengan model *pear to pear* dengan pangkalan

data (*data base*) terpusat dengan sistem jejaring bintang dan tetap memerlukan ruang yang besar untuk penyimpanan data super besar yang ada dalam penyimpanan yang ada. Kemudian era 2.0 ditandai dengan perubahan besar pada bentuk fisik dan kemudian piranti komputer pribadi (*Personal Computer*) hadir yang diproduksi secara massal. Era ini ditandai dengan meledaknya pembuatan laman dan kanal-kanal informasi di dunia digital. Pada era ini mulai digunakan jejaring internet untuk bisnis karena pada awalnya jejaring internet digunakan hanya untuk kepentingan militer dan pertahanan Negara.

Memasuki era 3.0 dikenal dengan ditemukannya jejaring sosial media yang marak digunakan oleh para *netters*. Penggunaan jejaring sosial sudah banyak diakses tetapi masih dengan menggunakan gawai *personal komputer* (PC). Pada era 4.0 ditandai dengan maraknya penggunaan telepon cerdas berbasis jejaring internet sehingga netter dapat leluasa mengakses internet dimana dan kapan saja. Semua orang sudah larut dan menggunakan jejaring internet dalam kehidupan sehari-hari demikian juga untuk keperluan dan tindakan mereka sehari-hari. Berbeda dengan itu era 5.0 dikenal dengan masuknya teknologi artifisial inteligen pada teknologi informasi sehingga memungkinkan dalam efektivitas dan efisiensi kerja manusia. Oleh sebab itu kemungkinan hilangnya profesi kerja manusia menjadi sangat mungkin sekali dengan implementasi teknologi tersebut.

Dengan kemunculan sosial media ini merubah gaya dan interaksi manusia antara satu dengan yang lain. Pada awalnya sosial media dianggap realisasi praktik demokratisasi informasi yang menandai kemunculan pemikiran pemahaman neo sosialis dan Marxisme di era digital. Prediksi keruntuhan kapitalis dianggap menjadi sangat nyata di era digital ditandai dengan kehadiran sosial media. Seperti pendapat Lon Safko dalam buku *the Bible of Social Media* menyebutkan, bahwa *anybody is a producer* atau

semua orang bisa memproduksi informasi tanpa harus memiliki kanal informasi dengan biaya yang besar. Dengan hanya memiliki telepon cerdas (*Smart Phone*) yang berbasis internet maka mereka bisa memproduksi informasi dengan leluasa.

Namun satu dekade setelah digunakan sosial media untuk berinteraksi begitu banyak problematik yang muncul dalam konteks kriminalitas dalam peradaban manusia. Seperti ujaran kebencian (*hate Speech*), Hoax (informasi palsu) keduanya cukup banyak dan mendominasi kejahatan *cyber digital* saat ini. Aksi kejahatan yang paling mendominasi adalah menyoal pembobolan dan manipulasi informasi sehingga ada penyalahgunaan informasi dalam interaksi antar manusia sebagai *netter*. Kebanyakan kejahatan ini terjadi disebabkan karena kelalaian *netizen* sendiri dalam menggunakan sosial media. Hal ini lantaran *netizen* tidak bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia digital sehingga semua terbuka sebebas-bebasnya dan itu menjadi masalah besar dalam praktik interaksi antar *netizen*.

Tidak hanya masalah itu saja kejahatan teroris dan penjualan manusia juga marak di sosial media dengan berbasis jejaring internet. Dengan tidak ada batas yang melingkupi menyebabkan orang dengan leluasa menggunakan gawai tersebut sebagai alat untuk melakukan sejumlah aksi kejahatan. Perlu dipahami bahwa aksi terorisme tidak akan bermakna tanpa adanya dukungan dari publisitas yang dahulu berorientasi pada media massa mainstream. Saat ini tidak lagi para pelaku lebih menasar pada penggunaan sosial media dan laman yang ada di jejaring internet. Alhasil dapat dikatakan sudah terjadi pergeseran pergerakan dari semula konvensional dengan melakukan penguasaan akan saluran dan pusat informasi, saat ini malah sebaliknya melakukan penggalangan dan mobilisasi massa dalam komunitas tertentu. Dengan adanya kesamaan gerak karena sosial media dan laman

jejaring internet berorientasi pada komunitas dan kelompok-kelompok maka dengan leluasa penggalangan massa menjadi sangat mudah dan memunculkan pemicu (*triggered*) dalam isi pembicaraan menjadi sangat mudah sekali.

Mobilisasi massa yang tentu saja mengarah pada pengancaman pada keamanan dan ketertiban masyarakat oleh sebab itu isu ini menjadi sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Oleh sebab itu tindakan deteksi dini yang ada pada setiap jajaran kepolisian menjadi salah satu hal yang perlu dalam upaya menanggapi dan mengantisipasi segala gerakan yang dimungkinkan dapat memunculkan aksi dan imbas panjang dari konflik besar di masyarakat. Kewaspadaan ini menjadi perlu dalam meningkatkan kepekaan pada lingkungan sekitar dan masyarakat di sekeliling kita. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa memahami kerja dan pola interaksi yang ada di dalam jejaring sosial media di internet menjadi sesuatu yang sangat perlu dan penting dalam kerja kepolisian saat ini.

Pemasalahan

Dunia sudah berkembang pesat dengan temuan-temuan terbaru di bidang teknologi informasi dan komunikasi memasuki era cyber digital semua mengalami perubahan drastis pada berbagai bidang kerja manusia, termasuk operasi kepolisian. Tulisan ini ingin menjelaskan urgensi kemampuan (kompetensi) pendidikan polisi berorientasi dunia *cyber* digital dalam upaya mengantisipasi perubahan dunia global dalam konteks kejahatan cyber digital dalam ruang lingkup kerjanya. Apa saja yang kompetensi dasar yang diperlukan dalam pendidikan kepolisian dalam di era *cyber* digital ini?

Kajian Teoritik

Konsep Dasar Komunikasi

Peran manusia paling inti di era cyber

digital adalah interaksi satu dengan yang lain, dan tentu saja komunikasi menjadi dasar utamanya. Menurut John R. Wenburg, William W. Wilmot, Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken diakui ada tiga kerangka pemahaman komunikasi, yaitu :

1. Komunikasi Sebagai Tindakan Satu Arah

Komunikasi dipahami sebagai sebuah proses penyampaian pesan searah dari seseorang/ lembaga kepada seseorang/kelompok lainnya, baik secara langsung maupun tidak. Pemahaman komunikasi sebagai suatu proses yang satu arah ini oleh *Michael Burgoon* disebut sebagai “definisi berorientasi sumber” (*source-oriented definition*).

2. Komunikasi Sebagai Interaksi

Komunikasi dipahami sebagai proses aksi-reaksi, sebab-akibat, yang arahnya bergantian. Komunikasi interaksi dipandang lebih dinamis daripada komunikasi satu arah. Unsur penting dalam komunikasi interaksi adalah feedback (umpan balik).

3. Komunikasi Sebagai Transaksi

Komunikasi dipahami sebagai kegiatan menafsirkan perilaku orang lain. Ada proses *encoding* dan *decoding* pesan verbal, maupun nonverbal. Semakin banyak peserta komunikasi, maka transaksi yang terjadi akan semakin rumit. Kelebihan konsep ini adalah komunikasi dipahami sebagai konsep yang tidak membatasi pada komunikasi yang disengaja saja. Pemahaman ini mirip dengan “definisi berorientasi penerima” (*receiver-oriented definition*), yaitu menekankan pada variabel-variabel yang berbeda, yaitu; penerima dan makna pesan bagi penerima. Penerimaan pesan di sini bisa bersifat dua arah dan saling berbalasan.

Elemen-Elemen Komunikasi :

1. Sumber (*source*)

Source atau sumber adalah seseorang yang membuat keputusan untuk berkomunikasi. Sering disebut juga pengirim (*sender*), penyandi (*encoder*), komunikator, pembicara (*speaker*).

2. Pesan (*the message*)

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal, maupun nonverbal yang berisi ide, sikap dan nilai komunikator. Pesan mempunyai tiga komponen yaitu; makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan.

3. Saluran (*the channel*)

Saluran adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima

4. Penerima (*the receiver*)

The receiver atau penerima adalah orang yang menerima pesan. Penerima sering juga disebut sasaran/tujuan (*destination*), komunikee (*communiicatee*), penyandi-balik (*decoder*) atau khalayak (*audience*), pendengar (*listener*), atau penafsir (*interpreter*).

5. Hambatan (*Barriers*)

Hambatan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pemaknaan pesan yang komunikator sampaikan kepada penerima. Hambatan ini bisa berasal dari pesan, saluran, dan pendengar. Beberapa buku menggunakan istilah *noise* untuk menyebut elemen pengganggu, yang diartikan sebagai gangguan (*disturbance/ interference*) dalam proses komunikasi. *External noise* meliputi

latar belakang pembicaraan, lingkungan, dan teknis saluran. Sedangkan *internal noise* meliputi aspek psikologi peserta komunikasi maupun aspek semantik. Misalnya sebuah kata yang mengandung arti *ambiguitas*. Hambatan komunikasi seperti ; perbedaan persepsi, permasalahan bahasa, kurang mendengarkan, perbedaan emosional, perbedaan latar belakang

6. *Feedback*

Feedback adalah reaksi dan respons pendengar atas komunikasi yang komunikator lakukan. *Feedback* bisa dalam bentuk komentar langsung atau tertulis, surat, atau *public opinin polling*. *Feedback* juga berperan sebagai pengatur (*regulator*). *Feedback* mengontrol atau mengatur aksi komunikasi kita. *Feedback* negatif misalnya berupa kritikan, atau penolakan. Contohnya, "Bisakah Anda diam?". *Feedback* positif misalnya berupa pujian.

7. *The situation* (situasi)

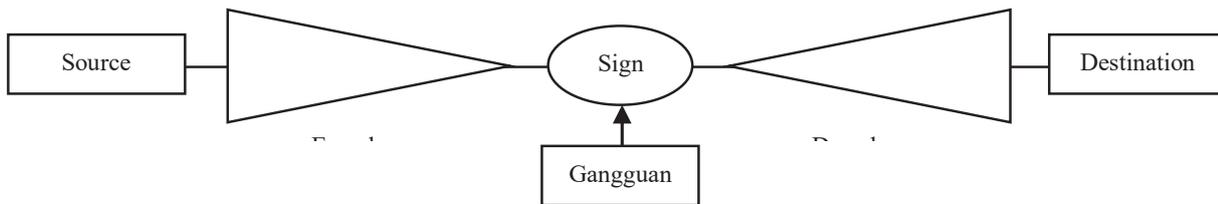
Situasi adalah salah satu elemen paling penting dalam proses komunikasi pidato (*speech communication*). Situasi atau keadaan selama komunikasi berlangsung berpengaruh terhadap *mood* pembicara maupun pendengar, saluran/ media yang dipakai, dan *feedback audience*.

Di antara model awal yang telah dibentuk untuk menerangkan maksud komunikasi. *Laswell* menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses input / linear, yaitu Siapa, Berkata apa, Dalam saluran apa, Kepada siapa, Dengan kesan apa. Di dalam model ini unsur-unsur komunikasi yang ditekankan adalah sumber, pesan, saluran, penerima, kesan dan bagaimana proses maklumat disampaikan antara satu sama lain. Selain itu Model Matematik atau Model *Shannon dan Weaver* pula melihat komunikasi sebagai proses pemancaran pesan. Model ini

juga menjadi asas Teori Komunikasi. *Shannon* dalam terjemahan *Othman Sharif dan Siti Zaleha Hashim* menggambarkan tindakan komunikasi ini mendatangkan umpan balik.

Model komunikasi *Shannon dan Weaver* melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seseorang penerima yang menyandi-balik atau mencipta-ulang pesan tersebut. Dengan kata lain model

Gambar 1 - Model Komunikasi *Shannon dan Weaver*

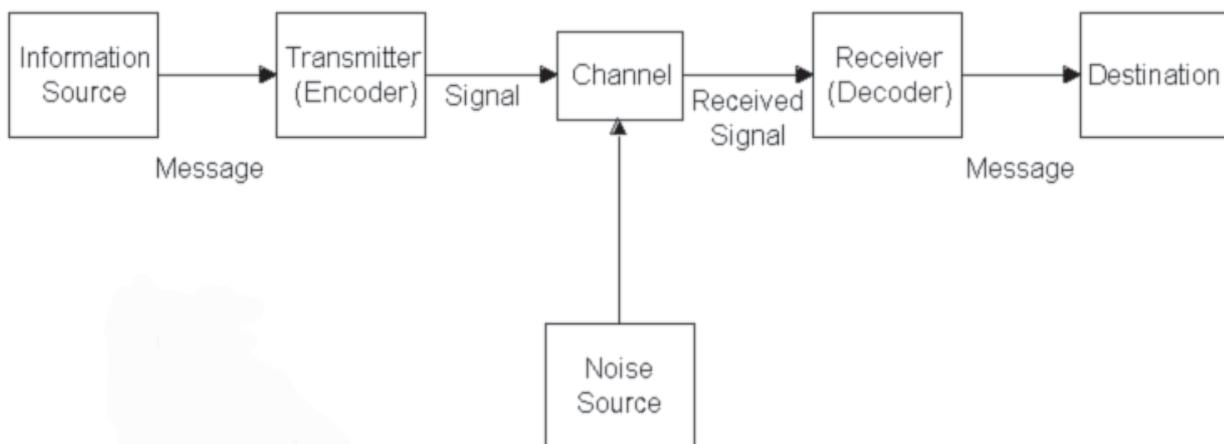


Dalam proses komunikasi terdapat empat elemen yang utama dalam proses komunikasi yaitu sumber, pesan, saluran dan penerima. Model Berlo, ke semua elemen ini penting dalam menyampaikan pesan dalam memastikan efektivitas komunikasi. Lebih lanjut model komunikasi dalam konteks sistem seperti di bawah ini;

Shannon dan Weaver mengasumsikan, bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang memungkinkan. Berikut ini unsur komunikasi yang terdapat dalam model komunikasi *Shannon dan Weaver* (Mulyana, 2007: 149-150) :

1. Pemancar (*Transmitter*) : Mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan.
2. Saluran (*Channel*) : Medium yang mengirimkan sinyal (tanda) dari *transmitter*

Gambar 2 - Model Komunikasi *Shannon dan Weaver*



(Severin dan Tankard, 1992: 39)

ke penerima (*receiver*).

3. Penerima (*Receiver*) : Mekanisme pendengaran, melakukan operasi sebaliknya

yang dilakukan *transmitter* dengan merekonstruksi pesan dari sinyal.

4. Sasaran (*Destination*) : (otak) orang yang menjadi tujuan pesan itu.
5. Gangguan (*Noise*) : Setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini bisa merupakan interferensi statis atau sebuah panggilan telepon, musik yang hingar bingar di sebuah pesta, sirene di luar rumah. Gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima.

Komunikasi Interpersonal Dalam Organisasi

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami sebab komunikasi yang tidak baik mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi, misalnya konflik antar pegawai, dan sebaliknya komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, kerja sama dan kepuasan kerja. Oleh karena itu hubungan komunikasi yang terbuka harus diciptakan dalam organisasi. Pada dasarnya komunikasi di dalam organisasi, terbagi kepada tiga bentuk :

1. Komunikasi Vertikal

Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan, dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik.

Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk:

- Melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi, mengenai pelaksanaan kerja bawahan.

- Menyampaikan pengarahannya, doktrinasi, evaluasi, teguran.
- Memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi, insentif.

Seorang pimpinan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya, dan memahami cara-cara mengambil kebijaksanaan, terhadap bawahannya. Keberhasilan organisasi dilandasi oleh perencanaan yang tepat, dan seorang pimpinan organisasi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kedua hal tersebut merupakan modal utama untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Fungsi komunikasi ke atas digunakan untuk :

- Memberikan pengertian mengenai laporan prestasi kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan.
- Memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah.

1. Komunikasi Horizontal

Bentuk komunikasi secara mendatar, diantara sesama pegawai dsbnya. Komunikasi horizontal sering kali berlangsung tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal/ke samping digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon, atau melalui pesan tertulis.

2. Komunikasi Diagonal

Bentuk komunikasi ini sering disebut juga komunikasi silang. Berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Dalam arti pihak yang satu

tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Melalui jalur hierarki/tingkatan seorang pimpinan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya secara baik, sehingga dapat membangkitkan minat dan gairah kerja disertai komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam penerapannya komunikasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Umumnya komunikasi formal ada dalam setiap organisasi dan dapat terjadi antar personal dalam organisasi melalui jalur hirarkhi dengan prinsip pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Komunikasi formal merupakan suatu sistem dimana para anggotanya bekerjasama secara tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi formal pada dasarnya berhubungan dengan masalah kedinasan. Komunikasi informal adalah kebalikan dari komunikasi formal biasanya terjadi dengan spontan sebagai akibat dari adanya persamaan perasaan, kebutuhan, persamaan tugas dan tanggung jawab.

Komunikasi informal pada pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu, ruang dan tempat, kadang-kadang komunikasi informal lebih berhasil, dan peranannya tidak kalah penting, karena dapat disampaikan setiap saat, asalkan bermanfaat untuk kemajuan organisasi. Namun penyampaiannya kurang sistematis, karena pertumbuhan dan penyebarannya tidak teratur. Kadang-kadang seorang pimpinan selalu beranggapan bahwa keberadaan organisasi informal merupakan suatu hal yang janggal, yang merupakan akibat gagalnya komunikasi formal yang memunculkan ketidakstabilan organisasi formal.

Bentuk komunikasi informal dapat berupa pertemuan yang tidak direncanakan, seperti:

bertemu dan ngobrol di kantin pada jam makan siang, di resepsi, atau pertemuan lainnya. Komunikasi informal ini mempunyai hal-hal yang positif, seperti:

- Bila jalan yang ditempuh melalui komunikasi formal melewati hambatan, dengan terpaksa digunakan komunikasi informal.
- Dalam suasana konflik dan penuh ketegangan.
- Sebagai sarana komunikasi.

Dari kedua bentuk komunikasi tersebut di atas, setiap pimpinan harus dapat menempatkan diri agar tidak timbul perasaan suka atau tidak suka. Pimpinan harus mencari dan melaksanakan nilai-nilai positif dari hubungan-hubungan tersebut. Ukuran sukses tidaknya seorang pimpinan terletak pada bagaimana pimpinan memadukan nilai positif yang dihasilkan dari komunikasi formal dan informal. Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan kerja sama bisa ditingkatkan, kita perlu bersikap terbuka dan menggantikan sikap dogmatis. Kita perlu juga memiliki sikap percaya, sikap mendukung, dan terbuka yang mendorong timbulnya sikap saling memahami, menghargai dan saling mengembangkan kualitas. Hubungan interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak, tidak terkecuali dalam lembaga pendidikan.

Komunikasi Organisasi dan Pola Kerja

Di dalam kehidupan organisasi, komunikasi efektif ini menjadi sebuah kebutuhan. Banyak aturan yang harus dilengkapi penjelasan, dimaksudkan agar kesalahpahaman interpretasi dapat dihindarkan. Apabila salah seorang personil organisasi merasa belum jelas dengan informasi yang diterimanya, maka lebih baik meminta penjelasan. Hal ini disebabkan, komunikasi yang

tidak efektif di dalam sebuah organisasi bisa jadi mengakibatkan dampak negatif dan kerugian yang serius. Komunikasi efektif di dalam sebuah organisasi akan sangat membantu peningkatan kinerja dan ketepatan dalam penyelesaian suatu urusan. Ada beberapa indikator komunikasi efektif, ialah:

- Pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator.
- Kesenangan, yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.
- Pengaruh pada sikap, apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di dalam sebuah organisasi. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita.
- Hubungan yang makin baik, bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di dalam sebuah organisasi, seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni ; untuk membina hubungan baik.
- Tindakan, kedua belak pihak yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang diduga dapat mendukung tercapainya komunikasi yang efektif.

1. Komunikator

Dalam proses komunikasi, komunikator memegang peran yang sangat penting untuk tercapainya komunikasi efektif. Komunikator se-bagai personal mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap komunikan, bukan saja dilihat dari kemampuan dia menyampaikan pesan, namun juga menyangkut berbagai aspek karakteristik komunikator.

Beberapa karakteristik komunikator yang efektif, dapat di sebutkan sebagai berikut:

- Kredibilitas
Adalah kewibawaan seorang komunikator di hadapan komunikan.
- Daya tarik
Hal ini berkenaan dengan keadaan yang menunjukkan penerima melihat komunikator sebagai seorang yang disenangi dalam bentuk peranan yang memuaskan. *Alexis Tan* mengemukakan, bahwa dimensi daya tarik diukur dengan *similarity* (kesamaan), *familiarity* (keakraban) dan *proximity* (kesukaan). Satu lagi daya tarik komunikator, yaitu daya tarik fisik (*physical attractiveness*). Artinya, bahwa daya tarik fisik seorang komunikator, memudahkan tercapainya simpati dan perhatian dari komunikan.
- Kekuasaan
Artinya seorang komunikator yang memiliki kekuasaan relatif lebih mudah mempengaruhi bawahannya. Ada rasa sungkan di kalangan bawahan terhadap komunikator yang memiliki wewenang atau kekuasaan.

- Kemampuan intelektual
Adalah tingkat kecakapan, kecerdasan, dan keahlian seorang komunikator.
- Integritas atau keterpaduan sikap dan perilaku dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Komunikator yang memiliki keterpaduan, kesesuaian antara ucapan dan tindakannya akan lebih disegani oleh komunikan.
- Kepercayaan, kalau komunikator dipercaya oleh komunikan maka akan lebih mudah menyampaikan pesan dan mempengaruhi sikap orang lain.
- Kepekaan sosial, yaitu suatu kemampuan komunikator untuk memahami situasi di lingkungan organisasi.
- Kematangan tingkat emosional
Adalah kemampuan komunikator untuk mengendalikan emosinya, sehingga tetap dapat melaksanakan komunikasi dalam suasana yang menyenangkan di kedua belah pihak.
- Berorientasi kepada kondisi psikologis komunikan, artinya seorang komunikator perlu memahami kondisi psikologis orang yang diajak bicara.
- Memiliki lingkup pandangan (*frame of reference*) dan lingkup pengalaman (*field of experience*) tentang diri komunikan. Misalnya bagaimana watak atau kebiasaan, bagaimana tingkat pendidikannya, apa makanan kesukaannya, kapan ulang tahunnya, dan sebagainya. Pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk berkomunikasi secara bijak.

1. Pesan

Agar supaya komunikasi efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa keberhasilan komunikasi sebagian ditentukan oleh kekuatan pesan. Dengan pesan, seseorang dapat mengendalikan sikap dan perilaku komunikan. Agar proses komunikasi terlaksana secara efektif, maka perlu dipertimbangkan berbagai teknik sebagaimana diuraikan berikut ini. Pesan satu sisi (*one sided*) ataukah dua sisi (*two sided*). Hal ini berkaitan dengan cara mengorganisasikan pesan.

Organisasi pesan satu sisi, ialah suatu cara berkomunikasi dimana komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikasi saja. Sedangkan pesan dua sisi, berarti selain pesan yang bersifat mendukung, disampaikan pula *counter argument*, sehingga komunikan diharapkan menganalisis sendiri atas pesan tersebut. Apakah dalam menyampaikan pesan itu diorganisasikan secara satu sisi atau dua sisi, tentulah harus disesuaikan dengan karakteristik. Sedangkan pesan dua sisi, secara teoritis lebih efektif dikarenakan pada karakteristik pola komunikasi sebagai berikut:

- a. Pada awalnya komunikan tidak sepatutnya dengan komunikator.
- b. Komunikan menyadari argument yang berlawanan sebelum penyajian pesan, atau sewaktu pesan akan disampaikan.
- c. Komunikan memiliki latar pendidikan yang baik (tinggi)
- d. Komunikator menginginkan kejujuran, keterbukaan, serta objektif dalam

pesannya dan tidak terlalu menghiraukan hasil komunikasi

Dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator tidak perlu terlalu ambisi untuk mencapai hasil segera. Untuk dapat mempengaruhi komunikasi secara efektif, penyampaian pesan perlu memperhatikan langkah-langkah;

1. *Attention* (perhatian) Artinya bahwa pesannya harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian dari komunikasi.
2. *Need* (kebutuhan) Artinya bahwa komunikator kemudian berusaha meyakinkan komunikasi bahwa pesan yang disampaikan itu penting bagi komunikasi.
3. *Satisfaction* (pemuasan), dalam hal ini komunikator memberikan bukti bahwa yang disampaikan adalah benar.
4. *Visualization* (visualisasi) komunikator memberikan bukti-bukti lebih konkret sehingga komunikasi bisa turut menyaksikan.
5. *Action* (tindakan), komunikator mendorong agar komunikasi bertindak positif yaitu melak-sanakan pesan dari komunikator tersebut.

Cara penyampaian pesan memang berpengaruh terhadap keefektifan proses komunikasi. Cara penyampaian yang baik, akan memudahkan komunikasi dalam menerima dan memahaminya.

Jaringan

Jaringan merupakan transmisi dari banyak orang ke banyak orang, tetapi juga mencakup transmisi dari satu orang ke satu orang dan dari satu orang ke banyak orang (Bungin, 2007: 134). Umpamanya, ketika sebuah perusahaan membutuhkan karyawan-karyawan

baru dan memasang iklan surat kabar, ini adalah penyiaran dari satu orang ke banyak orang.

Cara baru untuk mencari pekerjaan atau mencari karyawan adalah bahwa para pelamar mengirimkan data pribadinya tentang kualifikasi serta kekhususan dirinya di internet sementara perusahaan-perusahaan mengiklankan lewat internet segala persyaratan jabatannya. Ini membuat kedua belah pihak mengetahui tentang situasi permintaan dan penawaran. Sejauh ini, jaringan yang digunakan banyak orang adalah internet (Perbanas.co.id).

Jejaring Sosial

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll. Jejaring sosial pada umumnya memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam hal:

1. Memperluas interaksi berdasarkan kesamaan nilai yang dimiliki masing-masing individu, misalnya interaksi dalam hal kesukaan/*hobby*, kesamaan karakteristik tertentu (orang kembar, *bookaholic*, indigo dan sebagainya) ataupun pernah berinteraksi dalam kurun waktu tertentu dan dalam tempat tertentu, sehingga melahirkan nostalgia yang bisa dirasakan bersama.
2. Menambah wawasan dan atau pengetahuan dengan sarana *information sharing* dan *comment*, misalnya pencerahan ide yang bisa diedit secara bersama melalui fasilitas *comment* dan atau jawaban dari masing-

masing catatan.

3. Pencitraan atau memasarkan diri secara artian positif, dalam hal ini juga berkaitan dengan *prestige* dan kemauan untuk *update* teknologi informasi, misalnya pada perkembangan seseorang yang ingin menemukan pasangan hidup dan atau unjuk kemampuan dalam hal teknologi informasi. Hal ini berlaku juga sebagai media kampanye politik kepada publik, masih ingat ketika Presiden Amerika Serikat yang baru, Barack Obama menggunakan *Facebook* untuk kampanye kepada audiensnya?
4. Media transaksi dan pemikiran dalam hal perdagangan, politik, budaya, bahkan dimungkinkan juga pendidikan, misalnya pengiriman draft harga barang, kesepakatan koalisi partai untuk publik, eksplorasi dan orientasi adat daerah tertentu, dan *e-learning* untuk formal (universitas dan sebagainya) dan nonformal (pengajian, profil dan motivator kewirausahaan).
5. Dalam eskalasi lebih lanjut bisa juga sarana ini sebagai media intelijen, pengungkapan berbagai kasus kejahatan/hukum, media pertolongan (mencari anak hilang) dan sarana *Citizen Journalism*.
6. Mungkin yang terakhir adalah sebagai media rekreatif atau "cuci mata" setelah ditempa oleh beratnya beban pemikiran, misalnya melihat film lucu, penemuan baru, permainan/*game* dan lain sebagainya (Boyd-Berret, 2007).

Analisis Isi Media Massa (*Mass Media Content Analysis*) dan Framing

Satu yang dipahami, bahwa kajian analisis isi adalah suatu metode analisis yang menjadi keunikan dari ilmu komunikasi. Metode ini banyak digunakan untuk memahami isi media massa dan juga keperluan penganalisisan berita sehingga diketahui mau kemana pemberitaan

itu menysar. Tentu dalam analisis isi akan dikaji mendalam mana bagian diliput dan mana yang tidak dalam keperluan mencari nilai suatu berita. Di sini analisis isi digunakan guna monitoring isi pesan pada media komunikasi dan menysar juga pada konteks ekonomi politik yang ada. Analisis isi media massa bila dipetakan ada dua model besar, yakni; pertama analisis isi konvensional, biasanya berbentuk analisis kuantitatif dengan penilaian secara statistikal. Kedua model penelaahan dengan gaya kualitatif yang penuh dengan subyektivitas dari si penelaah.

Analisis isi yang umum digunakan dalam bentuk analisis kualitatif adalah analisis framing, wacana dan wacana kritik. Analisis *framing* di sini diartikan dengan upaya melihat bagaimana fakta itu ditulis, hal ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, maupun judul suatu teks. Ide tentang *framing* pertama kali dilontarkan oleh Baterson pada tahun 1955.

Di sini jelas *frame* dimaknai sebagai stuktur konseptual atau kerangka kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana dan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandalkan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing perilaku individu dalam membaca realitas (Sobur, 2014:162).

Lebih lanjut Sudibyo menyatakan, bahwa analisis *framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dapat diingkari secara total, melainkan di belokkan secara halus dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Dengan kata lain, bagaimana realitas dibingkai, dikonstruksi dan dimaknai oleh media (Kriyantono, 2008 : 251).

Dari perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Dari beberapa definisi analisis *framing* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis *framing* adalah suatu metode yang digunakan untuk membingkai suatu peristiwa dari cara pandang si penulis berita, dimana isi informasi tersebut meliputi fakta-fakta realitas yang ada dan telah dipilih oleh penulis untuk ditonjolkan. Penelitian ini akan mencari tahu makna yang tersembunyi didalam sebuah berita korupsi melalui analisa teks dan juga ilustrasi-ilustrasi yang ada didalam pemberitaan-pemberitaan dimedia massa tersebut. Analisis ini membantu orang melihat secara lebih mendalam bagaimana pesan diorganisir, digunakan dan dipahami yang nantinya akan menggiring pembaca berita kepada suatu pemikiran atau perspektif tertentu. Dalam hal ini apa-apa saja yang terkait dengan pemberitaan korupsi dalam analisis isi media.

Analisis Framing Model Gamson dan Andre Modigliani

Model ini menganggap *frame* sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan terhadap

suatu wacana. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan berita. Cara pandang inilah yang disebut Gamson dan Modigliani sebagai kemasan (*package*) yang merupakan rangkaian ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan.

Studi awal Gamson mengenai *framing*, pertama kali juga berkaitan dengan studi mengenai gerakan sosial. Menurut Gamson, keberhasilan dari gerakan sosial terletak pada bagaimana peristiwa dibingkai sehingga menimbulkan tindakan kolektif. Menurut Gamson, dalam pergerakan sosial paling tidak membutuhkan tiga *frame* atau bingkai, yaitu:

- a. *Aggregate Frame*: proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial. Bagaimana individu yang mendengar *frame* atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.
- b. *Concensus Frame*: proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif.
- c. *Collective Action Frame*: proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang seharusnya dilakukan. *Frame* ini mengikat perasaan kolektif khalayak agar bisa terlibat secara bersama-sama dalam protes/gerakan sosial (Eriyanto, 2008 : 220-221).

Tabel 1- Model Framing Gamson dan Modigliani

Frame (Media Package)

Seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. *Frame* ini didukung oleh perangkat wacana lain., seperti kalimat, kata dan sebagainya.

<p><i>Framing Devices</i> (Perangkat Framing) Berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat ini antara lain: permainan kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu.</p>	<p><i>Reasoning Devices</i> (perangkat Penalaran) Berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Artinya ada dasar pembenaran dan penalaran alasan tertentu sehingga membuat gagasan yang disampaikan media tampak benar, alamiah dan wajar.</p>
<p><i>Methapors</i> Perumpamaan atau pengendalian</p>	<p><i>Roots</i> Analisis kausal sebab akibat</p>
<p><i>Catchphrases</i> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.</p>	<p><i>Appeals to principle</i> Premis dasar, klaim-klaim moral</p>
<p><i>Exemplaar</i> Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.</p>	<p><i>Consequences</i> Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai</p>
<p><i>Depiction</i> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.</p> <p><i>Visual images</i> Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.</p>	

Pembahasan

Dari pemaparan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa keberadaan penggunaan jejaring internet tidak dapat dihindari lagi malah perlu diantisipasi dengan adanya

kompetensi dasar anggota kepolisian dalam ikut menggunakan dan mengoptimalkan dunia digital untuk keperluan kerja dan tugas Negara. Memang harus diakui tidaklah mudah dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi dan

untuk memasuki dunia digital dimaksud. Perlu kecakapan dan kemahiran tersendiri dalam menggunakan gawai digital dengan berbasis jejaring internet.

Ada banyak kemampuan dasar yang perlu dan mendesak yang dimiliki oleh mereka yang mau terjun dan memasuki dunia digital. Tercatat beberapa kemampuan dasar yang perlu dimiliki dalam pemanfaatan dan mengoptimalkan dunia digital dalam keperluan daring kepolisian (*electronic policing*) yang banyak digembargemborkan orang dalam beberapa dekade belakangan ini. Tercatat kompetensi dasar itu seperti;

1. Urgensi Pemahaman Informasi Bagi Anggota Polisi

Salah satu kendala terbesar dalam upaya penerapan digitalisasi kepolisian adalah pemahaman yang rendah dari anggota dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pada beberapa temuan dalam penelitian di STIK-PTIK terjawab, bahwa kendala terbesar dalam implementasi teknologi informasi adalah tenaga sumber daya manusianya (SDM) masih belum memahami sepenuhnya kebutuhan akan teknologi informasi dalam bidang kerjanya dan ini menjadi catatan penting bagi institusi kepolisian. Tingkat pemahaman bukan dalam konteks keahlian secara nyata.

Menyoal sarana dan prasana di institusi kepolisian selama ini sudah dianggap sangat cukup, memadai dan tersedia, namun optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya masih sangat kurang atau minim sekali. Tentu saja penggunaan gawai jejaring internet sedemikian marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua itu bukanlah barang baru dan asing bagi anggota polisi. Dengan implementasi gawai tersebut dalam bidang kerja tentu saja begitu mudah dioptimalisasikan namun perlu ada blue print pemanfaatan dikaitkan dengan

misi dan visi Polri ke depan.

Salah satu kendala terbesar adalah menyoal kemampuan pemahaman akan informasi itu sendiri dalam ranah kerja polisi di lapangan. Perlu dipahami, bahwa yang menjadi isu sentral dalam dunia digital adalah tentang informasi itu sendiri. Ada pergeseran pemaknaan informasi itu sendiri dalam kedudukan dan bidang kerja manusia memasuki peradaban millennial saat ini. Dahulu tema sentral isu ekonomi dalam dunia kehidupan peradaban manusia adalah tentang kepemilikan modal (aspek kepemilikan alat produksi). Alhasil ada pembatasan dalam penggunaan alat produksi yang dianggap modal ini dalam kehidupan peradaban manusia. Dengan adanya penguasaan oleh kelompok dan orang tertentu akan modal alat produksi ini menyebabkan ketimpangan yang sangat kentara dalam kehidupan manusia. Di sinilah letak isu sentral ekonomi yang merembet pada konteks sosial budaya manusia. Keberadaan uang sebagai alat pembayaran makin kentara dan menunjukkan jurang pemisah antara pemilik modal dengan mereka yang menjadi kaum papa dan teraniaya karena kelemahan ekonomi.

Isu-isu sentral penguasaan modal ekonomi ini di era digital makin lebur dan hilang dengan tergerus pada isu demokratisasi informasi yang menjelang era 1990-an digaungkan dengan isu keterbukaan informasi dan hilangnya kepemilikan akan modal pada alat-alat produksi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi. Di sini dapat dijelaskan bahwa modal yang semula berbentuk alat produksi bergeser menjadi informasi yang dianggap menguasai semua ruang dan kerja manusia di era digital. Interaksi antar manusia adalah pintu dari keterbukaan informasi dan penguasaan akan media massa sebagai pusat informasi masyarakat makin terkikis dengan ditandai kematian media-media mainstream yang tidak mau mengubah diri menjadi gawai elektronik digital. Informasi menjadi sangat cair dan orang bisa bebas tanpa harus mengeluarkan

biasa, orang mengonsumsi informasi menjadi berkali-kali lipat dari era-era sebelumnya. Di era elektronik diakui sudah ada pemanfaatan informasi tetapi masih sangat terbatas dengan adanya praktik sensor dan agitasi informasi dari Negara sebagai penguasa.

Apa informasi itu menjadi kendala besar dalam penerapan teknologi informasi bagi anggota polisi di lapangan. Mengapa ini dianggap perlu sekali karena mengingat yang menjadi isu sentral adalah informasi bukan penguasaan akan kepemilikan modal usaha dan kerja dari kehidupan manusia. Salah sedikit saja dalam menggunakan dan mengonsumsi informasi akan berimbas fatal dalam kehidupan manusia. Tentu saja sudah ada perangkat hukum yang secara ketat menjaga penggunaannya dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan Negara.

Informasi adalah sebuah komoditi yang tidak bisa dipahami berdiri sendiri seperti yang dipahami orang dalam penerapannya di lapangan. Tentu saja dalam pemahaman komunikasi diakui bahwa telah terjadi pegeseran pemahaman informasi dalam penerapan di lapangan dalam penggunaan jejaring internet. Informasi bukanlah hanya sekedar data atau aliran pulsa-pulsa dan getaran listrik yang membawa sesuatu yang penting bagi pendengarnya. Bahkan ada juga yang menyebutkan informasi adalah statistik dan data matematis yang memiliki simbol yang dapat ditafsirkan berbeda menurut penerimanya. Tentu semua ini adalah pemahaman dari berbagai bidang keilmuan mulai dari sistem informasi dan manajemen sampai dengan ekonomi dan matematika.

Perlu dipahami bahwa informasi tidak lagi dipahami secara rigid dengan pemahaman tunggal akan informasi itu sendiri. Pada beberapa tulisan dalam kajian komunikasi dipahami bahwa informasi adalah seperangkat pesan yang berjalan secara siklik dan berputar cepat. Demikian kiran-kiran pemahaman para perspektif

sistem dengan pendekatan konsep cybernetika yang banyak dijadikan rujukan buku babon komunikasi. Konseptualisasi yang diberikan oleh Shannon and Weaver dengan berpegangan pada pemahaman model kemas yang berbentuk getar-getar listrik menjadi sangat penting ketika getaran listrik itu berjalan dari kutub positif ke negatif atau sebaliknya tergantung pada upaya yang diinginkan oleh komunikator. Setiap usaha yang dilakukan dihitung dan dikaitkan dengan tenaga dan biaya, sehingga muncullah hitungan pulsa dalam teknologi telekomunikasi. Era itu temuan ini menjadi sangat penting karena memang perusahaan telekomunikasi sangat pesat dengan upaya menghitung laba dan rugi mereka menggunakan getar-getar listrik dalam upaya membawa informasi di dalamnya.

Tentu saja pemahaman ini tergerus dengan sedemikian masifnya penggunaan jejaring internet, sosial dan *line* dalam kehidupan digital manusia. Pemahaman kuno tentang informasi menjadi kendala terbesar dalam penggunaan dan aspek filosofis dari pemanfaatan dunia digital itu sendiri. Tentu saja hal ini akan terimbas pada bagaimana penyidikan dan penyelidikan aparat negara dalam upaya penegakkan hukum. Bila hanya memandang informasi dalam konteks kemas tentu saja sangat sulit menafsirkan sisi penegakkan hukum bagi para nettizen dalam praktik di lapangan.

Perlu dipahami, bahwa informasi berdiri dari 3 aspek perspektif yang berbeda, dan dalam hal ini tentu saja tidak bisa dilepas dari konseptualisasi yang digunakan dalam model sistem cybernetika yaitu ; pertama ; pengirim (pembuat) informasi, kedua ; pesan atau saluran informasi itu sendiri, ketiga penerima informasi itu sendiri yang dikaitkan dengan imbas perilaku yang akan muncul dalam kaitan dengan efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi informasi yang ada.

Dari perspektif pengirim dan pembuatan

informasi jelas, bahwa informasi pasti berkaitan dengan apa niat atau keinginan yang diharapkan dari si pembuat informasi usia itu dibuat atau disebarkan. Tentu saja informasi dapat dipahami apa rancangan yang diinginkan dari bagaimana maksud si pembuat karena pastinya informasi dibuat dengan tujuan dan keinginan tertentu sampai kepada penerima. Dari sini informasi dalam perspektif pembuat menjadi sangat penting karena akan terpantau arah dan efek yang akan ditimbulkan dari informasi itu sendiri. Informasi dari sisi ini mengarah kepada strategi dan taktik rancangan yang hendak disampaikan dalam keperluan memenuhi hasrat dan keinginan si pembuat informasi.

Kedua adalah informasi itu sendiri dalam konteks hasil produk dari si pembuat informasi. Kebanyakan orang memahami dengan sederhana bahwa informasi itu adalah pesan dan semua terbungkus dalam kontainer yang bisa berbentuk getar-getar listrik atau data yang berjalan dari satu kutub ke kutub yang lain dengan menggunakan ion negatif dan positif. Pemahaman ini jelas keliru, karena dengan demikian sulit dipastikan kemana arah dan kemauan dari isi pesan tersebut. Di sini pesan diartikan dan dianalisis secara subyektif sehingga absurd dalam memahami isi pesan yang dianggap itu adalah informasi. Pada kajian ilmu perpustakaan informasi dipahami sebagai kontainer pesan yang bisa ditemukembalikan dengan cepat dalam ukuran nano detik dalam penjajaran penyimpanannya. Studi perpustakaan dengan sangat mahfum menganggap, bahwa kecepatan dan kelengkapan dalam temu balik informasi adalah kajian dan isu utama dalam memahami informasi itu sendiri (Lancaster, 1979). Tentu saja kajian studi perpustakaan mengkaji tentang penggunaan operasi Boolean logic dan membantu proses kerja mereka di lapangan. Pada banyak pemahaman model informasi ini yang dipegang teguh hampir di semua lini lintas disiplin ilmu. Tentu saja akan

benar apabila hanya memandang informasi adalah pesan yang hanya terbungkus kontainer.

Ketiga adalah informasi dari sisi penerima yang dipahami pada efek tindakan yang akan dilakukan pasca mendapatkan dan mengosumsi informasi itu sendiri. Dahulu di era pra jejaring internet dalam masyarakat industri yang hanya mengenal kanal informasi mainstream kebanyakan petugas aparat keamanan hanya melihat sisi ini dalam mengantisipasi informasi itu dalam kaitan berbahaya atau tidak dalam penegakkan keamanan dan stabilitas Negara. Efek biasanya berbentuk tindakan dari si penerima, baik tindakan nyata atau kegelisahan yang timbul. Tentu saja di sini kebenaran akan nilai karena terlihat secara kasat mata dari gejala di masyarakat. Alhasil menjadi sangat mudah sekali, karena memang sudah tertangkap dengan panca indera manusia. Cara ekstrim yang dilakukan aparat adalah dengan melakukan pemberangusan atau *'breideil'* pada kanal informasi media massa mainstream tersebut dalam bentuk penarikan SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan) atau untuk stasiun radio dan televisi adalah dicabutnya izin siaran (bila di Amerika Serikat adalah izin menggunakan frekuensi). Dominasi Negara kuat karena memang dahulu prinsip autoritarian digunakan dalam upaya menjaga informasi dan semua tertuju pada pembangunan Negara yang aman dan terkendali.

Dari pemaparan di atas jelas, bahwa pemahaman akan informasi bagi anggota kepolisian menjadi sangat penting dalam upaya penegakkan hukum dalam upaya pemeliharaan keamanan. Kemampuan pemahaman akan informasi bukanlah sesuatu yang mudah melainkan perlu dicermati secara aplikatif dalam kerja di lapangan. Dengan demikian jelas, bahwa produk informasi bukanlah sesuatu yang mudah melainkan perlu dicermati dan dianalisis dengan berbagai konteks yang ada dipenafsiran penerimanya, baik konteks ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan. Di sinilah kompetensi

dasar tentang informasi menjadi sesuatu yang perlu dalam memasuki dunia cyber digital dalam kerja kepolisian digital.

2. Kemampuan Komunikasi dan *Public Relations* Anggota Polisi

Di era cyber digital saat ini dipahami bahwa akan datang masa kematian pemasaran dan kebangkitan dari konteks interaksi antar manusia. Hal ini didukung dengan kemunculan dari sosial media yang ada di dunia digital dengan keandalan keterhubungan manusia satu dengan yang lain. Alhasil manusia bisa terhubung dimana saja dan kapan saja tanpa ada penyaring dan penghalang. Oleh sebab itu di era digital kemampuan komunikasi menjadi syarat penting untuk bisa berkiprah di kancah digital. Tanpa ada kemampuan komunikasi yang cakap dapat dipastikan akan ada kegagalan dalam menguasai dunia digital.

Era cyber diakui sebagai titik awal kebangkitan komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa era sekarang kerap dikaitkan dengan kemampuan penggunaan kemampuan komunikasi pada masyarakat postmodern. Oleh sebab itu jangan heran bila jurusan komunikasi laku sejalan dengan pola interaksi aktif manusia dalam jejaring internet dalam penggunaan gawai digital. Lebih lanjut dapat dipastikan, bahwa kemampuan komunikasi yang handal menjadi syarat mutlak untuk bisa berhubungan antar manusia. Kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi bisa menjadi kendala utama dalam berinteraksi antar manusia dengan penggunaan gawai jejaring sosial di internet. Sehubungan dengan itu, maka memang bagi anggota kepolisian harus memiliki kemampuan komunikasi baik secara langsung ataupun dengan menggunakan gawai. Hal Ini menjadi salah satu syarat penting yang harus dimiliki dalam mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dengan kemajuan dunia digital saat ini. Tanpa

ada itu semua maka akan terjadi penurunan kemampuan dan tampilan profil anggota polisi yang ideal di era cyber.

Perlu dipahami, bahwa tren di dunia digital adalah kejujuran dan ketulusan dalam berinteraksi satu dengan yang lain menjadi sesuatu yang sangat penting. Selama ini praktik penipuan dan pembohongan (*deception*) yang dilakukan pihak media massa sedemikian marak melalui sarana periklanan (*advertising*) dan pemasaran dalam upaya menjual dan menawarkan jasa dan barang yang ada. Imbas yang ditimbulkan adalah kemunculan akan praktik penipuan yang dilakukan dalam kanal-kanal komunikasi. Akibatnya tentu saja yang diharapkan adalah hadir informasi yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Bukan sebaliknya yang saling membenci, menyerang dan bertipu daya satu dengan yang lain. Di sini jelas bahwa memahami karakteristik dan emosi netizen menjadi salah satu aspek terpenting dalam upaya mampu berbicara di depan publik konteks digital.

Tentu saja berbicara di era cyber digital perlu memahami penggunaan meme yang merupakan bentuk luapan dari emosi yang biasanya ditandai dalam komunikasi non verbal dalam komunikasi secara langsung antar manusia. Di era cyber digital hal tersebut tidak dipahami karena keterbatasan tempat dan ruang yang disediakan sebab memang diakui bahwa berkomunikasi melalui gawai jejaring internet tidaklah semudah seperti menggunakan media-media komunikasi lain.

Berkomunikasi yang baik di jejaring internet berkaitan dengan bagaimana mempraktikkan etika dan keberadaban dalam berkomunikasi yang tentu saja akan dibahas pada bagian ketiga tulisan ini secara mendalam. Praktik public relations sesungguhnya menjadi sangat berguna dan terpakai dalam interaksi manusia di gawai jejaring internet. Tidak berbohong, memberikan informasi apa adanya, tulus, tidak memihak dan

mencari kebenaran dan keadilan adalah prinsip dasar orang berperilaku di jejaring internet. Komunikasi ketulusan yang menyejukkan tanpa memihak akan sangat disukai daripada hanya melulu melakukan agitasi dan provokasi yang menyebabkan ketakutan dan trauma mendalam pada netizen.

Dengan demikian jelas, kompetensi berkomunikasi yang baik dan beradab dengan mengutamakan nilai kejujuran dan kebenaran menjadi kompetensi dasar anggota kepolisian di lapangan dalam menyikapi diri untuk menggunakan gawai komunikasi berbasis jejaring internet yang ada. Tanpa itu tentu saja sosok polisi akan ditanggapi sebagai profil yang kaku, berpihak dan tidak memiliki nurani dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayaninya. Pendidikan anggota kepolisian seharusnya ada muatan nilai ini dalam keperluan antisipasi perkembangan informasi dan memasuki era dunia cyber digital saat ini.

3. *Nettiquette* Pengguna Jejaring Internet Anggota Polisi

Etika adalah unsur penting dalam interaksi antar manusia, tentu saja etika menjadi tata nilai yang harus ditaati manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Etika dalam perkembangannya lekat dengan kemajuan filsafat dan ilmu pengetahuan. Diakui dalam aspek aksiologis pada kajian filsafat ilmu jelas bahwa etika sedemikian erat dalam upaya menerobos pada perkembangan ilmu pengetahuan yang terkadang terbelenggu oleh tata nilai peradaban yang ada. Perlu diakui bahwa peradaban manusia sedemikian kuasa dalam menentukan kebenaran dalam aspek epistemologis yang ada dalam kehidupan ilmu pengetahuan yang ada. Etika hadir dalam tiap-tiap sendi kehidupan dan menyelimuti hati dan nalar manusia untuk upaya mencari kebenaran yang hakiki dalam tata pergaulan manusia yang ada.

Mudahnya saja, bila etika dijalankan dengan sesungguhnya maka tata pergaulan dan interaksi antar manusia akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Di sinilah letak dari posisi kebenaran yang ada dan menjadi patokan orang dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan adanya etika, maka jelas bahwa peradaban manusia akan bisa berubah sesuai dengan perkembangan manusia. Kebebasan yang diberikan etika sedemikian lekat dengan perkembangan yang ada pada diri dan perasaan manusia. Dari etika kemungkinan ilmu pengetahuan akan maju pesat karena tidak terbelenggu oleh kebenaran subyektif yang diciptakan oleh peradaban.

Di era digital interaksi antar manusia menjadi sangat penting, dan tentu saja tata nilai menjadi salah satu yang lebih penting. Etika tentang pertemanan, hubungan kekerabatan, pasangan hidup (*spouse*) sampai dengan orang yang tidak dikenal sedemikian erat mengatur tata hubungan yang baik dan seharusnya dalam berinteraksi antar manusia. Kesadaran akan tata hubungan yang baik tersebut berangkat dari pengakuan adanya etika pada kehidupan manusia. Di lain sisi dapat dijelaskan etiket adalah tindakan dan perilaku yang mengikuti tata aturan etika yang ada di masyarakat yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Nettiquette adalah penjelasan dari kata *Net* dan *Etiket*, di sini dapat diartikan bahwa Net adalah penggunaan jejaringan dan biasanya disebut dengan istilah *netizen* untuk mereka yang menggunakan yang dapat diartikan dengan penduduk yang menggunakan jejaringan internet. Pada banyak literatur teknologi informasi bisa disebut juga dengan *users* atau *netters* sebagai bentuk tunggal dari penduduk pengguna jejaring internet yang ada. Di lain sisi etiket seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah perlakuan yang mengikuti etika yang ada dan berlaku di jejaring tersebut. Diakui, bahwa *nettiquette* yang ada sifatnya lintas negara

dan budaya yang ada karena masyarakat atau penduduk yang terbentuk adalah dari berbagai negara lintas batas dan geografis.

Memang di satu sisi kadang orang meremehkan *netiquette* ini bahkan tidak memahami sesungguhnya isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Padahal pernyataan *netiquette* kadang ada dalam *netizen* dalam membuat perjanjian yang ada dalam penggunaan sebuah program atau sistem dalam gawai yang mereka gunakan dalam bentuk *disclaimer*. Terkadang orang menanggapi bahwa itu semua mereka sudah mengerti dan memahami sepenuhnya tanpa mengindahkan sanksi dan aturan yang dibuat oleh si pembuat sistem atau program tersebut. Pemahaman etiket dalam jejaring internet dengan kehidupan sehari-hari jelas berbeda dan kekuatan hukum tidak tertulisnya juga lintas negara sehingga banyak adopsi praktik etiket dari negara asal si pembuat sistem atau program terbawa ke dalam praktik penggunaan sistem atau program tersebut di dunia jejaring internet dan ini kadang menjadi kendala utama penerapannya pada *netizen* di negara lain.

Di lain sisi pengabaian terhadap aturan *netiquette* disebabkan karena tidak ada aturan yang secara distributif melakukan penghukuman terhadap pelaku yang menyimpang, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang bisa menjerat si pelanggar. Memang sedemikianlah kekuatan etiket dalam tata pergaulan dan interaksi manusia demikian juga di dunia jejaring internet. Namun perkembangannya sekarang berbeda dengan begitu aktifnya sosial media menyebabkan ada kekuatan yang tidak terlihat dalam menghakimi mereka yang melanggar *netiquette* yang ada, dalam bentuk pengucilan dan penghakiman dengan melakukan semacam *bullying* pada mereka yang dianggap melanggar etiket yang ada. Pada beberapa komunitas dalam sosial media jejaring internet kadang disebutkan dengan jelas etiket yang ada dalam upaya

mengikat para *netizen*nya untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan etiket yang ada.

4. Agenda Media dan Strategi, Taktik Pesan Dalam Komunikasi

Ketika orang menganggap bahwa berkomunikasi itu tidak perlu dirancang dan distategikan itu adalah salah besar. Berkomunikasi perlu dirancang dan distategikan dalam upaya tercapainya keinginan dan tujuan dari orang berkomunikasi. Perlu dipahami, bahwa komunikasi memiliki tujuan dan maksud dalam upaya tercapainya keinginan yang hendak disampaikan oleh si pembuat informasi. Tidaklah mudah menyampaikan pesan dan sampai kepada si tertuju sesuai dengan apa tujuan dan maksud dalam berkomunikasi. Pada kajian-kajian komunikasi massa jelas ada bagian khusus yang membicarakan agenda media dalam upaya tercapainya tujuan dan maksud melalui informasi yang disebarkan.

Kajian tentang strategi dan taktik dalam komunikasi ini tidak secara khusus dibahas dalam manajemen strategik dalam konteks komunikasi. Pada perkembangannya kajian tentang agenda media begitu kentara pada kajian jurnalistik sejalan dengan upaya pemenangan perang dingin (*psywar*) yang marak saat itu oleh negara barat dalam melawan keberadaan blok timur yang dikuasai oleh Uni soviet sebagai negara *superpower*. Tentu saja pemilihan pesan dalam strategi upaya pemenangan menjadi sangat penting, Era perang dingin tersebut berupaya mendapat dukungan dan simpati dari negara-negara lain di belahan dunia untuk pro dan berpihak pada kedua belah blok yang sedang bertikai.

Pemilihan strategi pesan menjadi urusan Negara dan semua akan berorientasi pada pemenangan dan upaya menjaga stabilitas dan keamanan Negara. Tentu saja strategi pesan akan

diglontorkan melalui saluran pesan yaitu; pers dan lembaga penerangan Negara. Kesadaran bahwa pesan harus dirancang dan distrategikan khusus menjadi sangat penting dan tentu saja ada taktik tentu dalam upaya mencapai agar pesan yang dimaksud sesuai dengan tujuan dan misi yang diemban.

Di sinilah kemudian dikenal dengan model sistem pers yang beraliran libertarian (*free press*), Tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*) dan Autoritarian (Terpusat). Di sinilah isu-isu tentang pembungkaman dan pemberangusan suara dan pendapat begitu mencuat seiring dengan semangat keterbukaan informasi menjelang keruntuhan blok Timur dengan kemenangan simbol penerapan demokrasi di dalamnya. Dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet menandakan kekalahan blok timur dari perang urat saraf (*psy war*).

Di era digital dengan adanya jejaring internet dalam penerapan penyebaran informasi semua orang bisa menjadi produser atau penghasil informasi, alhasil ledakan informasi tidak bisa dielakkan lagi (Safko, 2010). Pembrudakan informasi terjadi dan pergeseran pada penggunaan penyusunan agenda media, yakni lebih kepada perusahaan dan institusi bahkan para individu. Strategi agenda media tidak hanya dipegang oleh Negara, atau pemilik media massa, melainkan pada perusahaan-perusahaan dan individu yang berdiri bebas sebagai penggunaan informasi. Tak heran akhirnya strategi pesan dalam hubungan dengan agenda media menjadi penting bagi perusahaan dalam konteks komunikasi organisasi daripada Negara sebagai penjaga keseimbangan informasi bangsa (Prisgunanto, 2017). Oleh sebab itu untuk memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyusun strategi lebih lanjut harus mempelajari dahulu komunikasi organisasi (Prisgunanto, 2014).

Praktik penyusunan startegi dalam pesan

komunikasi lebih marak digunakan dalam komunikasi pemasaran dalam tingkatan organisasi di dalam dunia cyber digital. Terkadang orang keliru menafsirkan bahwa praktik strategi pesan hanya melulu menyoal perdagangan dalam transaksi dagang daripada urusan informasi pribadi orang perorang. Hal ini disebabkan di era industrialisasi praktik promosi pemasaran sedemikian sarat dengan pembuatan startegi pesan yang tertuju pada penjualan produk dan jasa untuk calon pembeli atau konsumen yang ada. Diakui bahwa praktik penyesatan, penjatuhan dan mematikan karakter terhadap citra (*brand*) produk atau jasa sedemikian marak saat itu. Oleh sebab itu publik menganggap wajar praktik-praktik penyimpangan yang ada dalam strategi pesan yang dibuat para pengiklan (*Advertiser*) dan perusahaan (organisasi).

Isu-isu penipuan (*deception*) sudah tidak trend lagi di era cyber digital apalagi dengan adanya sosial media. Media komunikasi yang banyak menipu dan memperdaya (*deceptions*) dihindari dan dengan kemampuan interaksinya sosial media mampu menetralsir hal tersebut dengan terbentuknya knowledge managemen yang apik di antara para nettizen. Dengan adanya hal tersebut maka muncullah kemukaan-kemukaan yang ada di antara orang dan publik yang selama ini merasa dibohongi dan diperdaya oleh media massa mainstream. Alhasil pada generasi selanjutnya sebut saja generasi Z kemungkinan mereka sudah tidak mengandalkan media massa mainstream karena dianggap didominasi oleh kebohongan dan kepalsuan yang diarahkan oleh pemilik modal (*owners*). Dominasi dan pengarahannya yang ada merupakan settingan pesan yang dirancang apik oleh gate keeper atau penjaga gawang yang dalam hal ini adalah para awak jurnalis dan pemilik media massa mainstream.

Kebenaran direayasa dan obyektivitas dikebiri demi mendapatkan kemenangan dalam penguasaan informasi dan komunikasi publik.

Di era cyber digital praktik-praktik itu marak dilakukan dengan mengubah bentuk dari media mainstream ke media cyber digital melalui laman-laman yang merupakan metamorfosis daripada media mainstream tadi. Oleh sebab itu salah satu pintu masuk penjaga obyektivitas dalam isi konten tentu melalui sosial media baik itu sosial media berbasis laman maupun line atau jejaring melalui gawai telepon pintar yang marak saat ini.

Jelas dari pemaparan ini kemampuan menyusun strategi, menentukan agenda setting media dan pilihan isu juga penonjolan isi konten tetap menjadi hal penting yang harus dikuasai oleh para nettizen. Dengan kemampuan memahami strategi dan agenda media maka bisa dipahami mau kemana arah dari pelangiran informasi yang dibuat oleh si pembuat pesan dan media tersebut. Diakui bahwa pilihan pesan bukanlah sesuatu yang serampangan dan kebetulan melainkan merupakan sesuatu yang terpilih, tersaring dan ditargetkan dalam berkomunikasi. Dengan demikian jelas bahwa anggota polisi dalam melihat isi pesan harus bisa memahami pilihan strategi dan isu pesan yang ada dalam ranah dunia cyber digital dengan basis komunikasi. Satu yang dipahami bahwa teori besar dalam pilihan strategi dan taktik tadi adalah manajemen strategik yang merupakan induk dari strategi dan taktik pesan berkomunikasi.

Agenda setting memang terdiri dari agenda media dan agenda publik. Keduanya harus dipahami dalam konteks komunikasi antar budaya dengan demikian maka anggota kepolisian bisa menyadari benturan budaya (gegar budaya) yang harus tidak didekati dengan pembuatan efek jera hukum positif yang distributif, melainkan dengan melakukan restoratif justice dengan mengutamakan nilai kelokalan (*local genius*) sehingga kajian antropologi dan sosiologi masuk dalam memahami budaya dan interaksi antar manusia (sosial) satu dengan yang lain.

5. Analisis Isi Media Dalam Gawai Jejaring Internet

Bagaimana menilai dan mengukur isi dari media massa hanya bisa dilakukan dengan analisis isi saja. Model analisis isi begitu unik dan khas dari kajian ilmu komunikasi yang ada. Pengembangan analisis isi masuk dalam kajian jurnalistik karena memang bidang ini yang di era 1960 sampai dengan 1990-an sedang 'naik daun' dalam aplikasi di lapangan. Sejalan dengan era keterbukaan informasi di berbagai bidang membawa aplikasi dalam penentuan isi (*content*) dalam media massa menjadi sangat penting. Salah satu kemenangan sekutu dalam menaklukkan Jerman pada Perang Dunia I adalah mengefektifkan kerja analisis isi media massa konvensional untuk memetakan keberadaan pasukan Jerman dan Nazi di medan tempur. Cara yang dilakukan pihak intelijen sekutu adalah melihat dan mengamati sudah berapa radio di daerah yang berperang sudah memutar lagu-lagu romantis Jerman, atau di daerah situ sudah memutar lagu Jerman melalui Gramafon yang digantung di atas atap rumah yang paling besar. Semua itu menandakan penaklukan dan pendudukan pasukan Jerman di daerah tersebut. Dengan demikian intelijen sekutu dengan leluasa memetakan kekuatan musuh dengan pengumpulan Baket (Bahan keterangan) yang mudah ditemukan dalam aplikasi nyata di lapangan.

Demikian juga dengan pidato Pemimpin besar Jerman Fuhrer Adolf Hitler yang dianalisis isi dengan seksama kata demi kata untuk melihat komunikasi balik (*feedback*) yang didapat dari serangan berstruktur yang dilakukan sekutu. Gemetar dan tanda-tanda ketakutan Adolf Hitler dari komunikasi non verbal dan verbal yang ada ditafsirkan dan digunakan sebagai kontra intelijen dalam upaya meyakinkan pimpinan perang sekutu untuk melakukan perhitungan ulang dan prediksi keberhasilan di lapangan. Jelas analisis isi sudah marak

digunakan di dunia intelijen militer dalam upaya pemenangan perang dalam menaklukkan musuh. Sayangnya masih banyak aparaturnegara sudah melupakan ini sejalan dengan hilangnya perang dan masa damai. Pekerjaan besar intelijen ini menjadi sesuatu yang usang dan asing bagi aparaturnegara dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan Negeranya.

Sejalan dengan itu kerja polisi di era cyber digital dengan maraknya Hoax, Hatespeech dan isu SARA menunjukkan bahwa era sudah kembali ke zaman perang dunia pertama dahulu yaitu maraknya upaya Provokasi, Agitasi dan penghasutan dalam upaya kontra intelijen yang ada dalam kerja dunia komunikasi dan informasi. Model-model propaganda yang dahulu banyak dilakukan oleh antar Negara dalam upaya perluasan wilayah dan mendapatkan daerah jajahan saat ini sudah bergeser kepada perusahaan-perusahaan dan individu yang berusaha mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk nyata maupun potensi yang tidak nyata. Bagaimana mengukur motif dan keinginan di balik konten? Hal tersebut hanya bisa dipahami dengan memahami teks yang ada dengan tentu alat ukur yang memiliki nilai validitas dan obyektivitas yang tinggi, bahkan dengan metodologi rijit yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis.

Pemahaman akan analisis isi baik dalam bentuk konvensional yang menggunakan data statistik atau analisis framing, wacana dan wacana kritik dengan menggunakan pernyataan (*statement*) dalam bentuk verbal dan non verbal yang diselimuti konteks merupakan kebutuhan mendesak yang ada pada fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) pada tiap-tiap satuan, baik di tingkat Polda, Polres dan Polsek. Lebih utama lagi adalah pusat dari aliran informasi Humas, yakni; Mabes Polri dalam Divisi Humas yang ada. Penggunaan saksi ahli dalam persidangan adalah opsi terakhir dalam memberikan informasi handal relevan secara

ilmiah akademis akan sesuatu pesan yang ada, dan itu bukan segalanya. Bagaimana cara menghitung dan menafsirkan isi pesan yang ada merupakan pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh anggota polisi dalam upaya mengartikan makna yang ada dalam muatan informasi.

Dengan penguasaan akan analisis isi media massa, maka dengan mudah divisi Humas Polisi tidak hanya mengedepankan pola represif dalam menanggapi kejahatan cyber digital yang ada saat ini, melainkan sebaliknya preventif dan pre-emptif dengan tetap menjaga keadilan dan obyektivitas yang ada dalam semangat demokratisasi informasi. Maksudnya Polri lebih dapat mempraktikkan pencegahan kejahatan dan hukum bukan pada penegakkan hukum yang kaku berpihak pada hukum positif yang ada. Dengan adanya analisis isi media yang ketat maka peringatan dan pemberian rambu yang jelas pada netter bisa dilakukan dalam upaya menyadarkan yang bersangkutan akan kesalahan dan pelanggaran hukum yang mungkin saja mereka tidak sadari karena mereka belum mendapatkan literasi hukum dalam dunia cyber digital.

Bila ini bisa dilakukan oleh satu Humas Polri, diyakini, maka komunitas dan nettizen akan pro dan berpihak sepenuhnya dengan Polri yang sedemikian bijaksana dan mendahulukan kebenaran alternatif dalam landasan hukum daerah yang berlaku setempat tidak melulu hukum positif yang dianggap kaku dan menjadi pilihan akhir bila tidak ada penyelesaian yang ada. Dalam artian bahwa mengutamakan local genius menjadi sesuatu yang perlu untuk mengedepankan rasa keadilan dalam penyelesaian hukum.

Simpulan dan Saran

Dari pemaparan di atas jelas bahwa perubahan pesat di dunia cyber digital memaksa

semua pihak harus mau menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Demikian juga dengan seputar bidang kerja Polisi di lapangan. Diakui, bahwa dominasi gawai media dalam bentuk elektronik yang dikenal dengan media daring menyebabkan urgensi kompetensi kemampuan khusus anggota polisi di bidang kerjanya. Tentu saja konvergensi media digital memaksa orang untuk bisa memodifikasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Dengan pembahasan di atas jelas bahwa kemampuan yang urgen dimiliki dan harus masuk dalam kurikulum pembelajaran anggota polisi adalah kemampuan memahami apa informasi itu, seluk beluk sampai dengan efek yang ditimbulkan oleh informasi itu sendiri. Kedua adalah menyoal perlunya kemampuan komunikasi di tempat kerja baik secara langsung maupun melalui penggunaan gawai dari yang berbasis jejaring internet. Tidaklah mudah mengembangkan kompetensi komunikasi pada anggota demikian juga dengan kemampuan public relations anggota dalam upaya membentuk komunitas dan menjaga kehidupannya sampai dengan hubungan baik dengan komunitas yang ada.

Tidak itu juga kesadaran akan pentingnya *Netiquette* yang ada dalam berinteraksi jejaringan internet menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi netter. Banyaknya batas *Netiquette* yang diterabas oleh anggota kepolisian menjadi masalah tersendiri dalam perkembangan akan nilai kebenaran yang ada. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi konteks organisasi Polri dalam upaya menciptakan citra baik di masyarakat.

Perlu ada strategi besar dan taktik khusus dalam pelangsiran informasi di era cyber digital dengan penentuan arah dan sasaran komunikasi dan informasi dalam keperluan kepentingan komunikasi organisasi Polri. Tidak bisa semua dilepas pada kepentingan dengan strategi antar pribadi anggota. Penentuan strategi dengan model agenda media yang ada merupakan sebuah konteks besar terhadap arah dan misi

yang akan dituju oleh organisasi dalam konteks komunikasi.

Guna memahami isi informasi tentu saja perlu ada upaya analisis yang tajam dan menyeluruh dari anggota Polri untuk menilai kebenaran dan penyimpangan yang ada dalam upaya mengungkap kejahatan cyber yang marak saat ini. Dengan adanya kemampuan menganalisis yang tajam terhadap isi media baik mainstream maupun digital akan lebih memberikan rasa keadilan dalam penyelesaian persoalan penegakan hukum yang ada. Kepemilikan akan kemampuan analisis isi dari sisi model pengolahan data kuantitatif dan kualitatif menjadi syarat mutlak akan upaya mencari nilai obyektivitas/kebenaran yang ada dari isi kontainer pesan yang ada dalam bungkus informasi.

Daftar Pustaka

Boyd-Barret, Oliver (2007). *Communications media, globalization, and empire*. Indiana : John Libbey Pub.

Bungin, Burhan H.M (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial*, Jakarta : Kencana (Prenada Media Group)

Eriyanto (2008). *Analisis wacana : pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta

“Jaringan : sebuah pengertian,” (availabel at <http://library.perbanas.ac.id/artikel/dinamika-jejaring-sosial-sebuah-deskripsi-umum.html>, [diakses 4/11/2009 jam. 11.49])

Kriyantono, Rachmat (2008). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta : Kencana

Mulyana, Deddy (2007). *Ilmu komunikasi: suatu pengantar*. Bandung : Rosda Karya

Prisgunanto, Ilham (2017). *Aplikasi teori Komunikasi Dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.

Prisgunanto, Ilham (2014). *Komunikasi pemasaran era digital: WOMM, IMC, Perilaku Konsumen Era 4.0., Strategi-Taktik, Keintiman & Konvergensi Media*. Jakarta : Prisani Cendekia

Safko, Lon (2010). *The Social Media Bible : Tactics, Tools, and Strategies for Business Success*. 2nd.ed. New Jersey: John Wiley & Sons

Sobur, Alex. *Analisis text media : suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing* (2014). **Bandung : Rosda Karya.**

Sulistyo-Basuki (1994). *Pengantar ilmu perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

West, Richard dan Lynn H. Turner (2008). *Pengantar teori komunikasi, edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.



Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter guna Menyongsong Era Globalisasi

Kalfaris Lalo

Mahasiswa Strata-2 STIK – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: k4lf4risl4lo2006@gmail.com

Abstract

This article describes the condition of character education in Indonesia on facing of the millennial era. Millennial era marked the ease of the public get information from various parts of the world as a result of rapid technological developments. This condition not only contributes positively to a certain nation or social aggregate, but at the same time gives impact (residue). Character education is specifically needed to defend that impact. In particular, the systematic and measurable prevention and patterning of the government through education. As a result, compared to neighboring countries, Indonesia is still far behind, because education in Indonesia now puts forward the mastery of scientific aspects, intelligence and lack of attention or neglect of character education.

Key Words: Character Education, Globalization, Millennial Generation

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan kondisi pendidikan karakter di Indonesia dalam menghadapi era milenial. Era milenial ditandai mudahnya masyarakat mendap`apatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kondisi ini bukan hanya memberikan kontribusi positif bagi sebuah bangsa atau agregat social tertentu, tetapi secara sekaligus memberikan dampak (residu). Pendidikan karakter secara khusus dibutuhkan untuk menghela dampak itu. Utamanya, adanya daya cegah dan pola yang terencana secara sistematis dan terukur dari pemerintah melalui pendidikan. Hasilnya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih jauh tertinggal, disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan dan kurang memperhatikan atau mengabaikan pendidikan karakter.

Kata-Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Globalisasi, generasi milenial

PENDAHULUAN.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita inilah yang membuat besar dan berkembangnya negara Indonesia hingga sampai saat ini. Ini tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, tingginya jumlah sumber daya manusia serta beraneka ragamnya budaya Indonesia yang dimiliki. Hal ini perlu di kembangkan dan dilestarikan agar apa yang menjadi keunggulan negara Indonesia tidak sirna akibat pengaruh dari dunia luar.

Pada saat ini Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi, dimana salah satunya ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal Ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi yang menerimanya. Pengaruh positif globalisasi terhadap perubahan tata nilai dan sikap, menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktifitas, dimana kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesamanya. Menurut Tilaar (2009: 1) “perubahan global yang sedang terjadi, telah merupakan suatu revolusi global (globalisasi) yang melahirkan suatu gaya hidup (a new life style)”. Karakteristik gaya hidup masyarakat global adalah kehidupan yang dilandasi penuh persaingan sehingga menuntut peran individu untuk dapat membenahi

diri mengikuti perubahan yang sangat cepat. Perubahan-perubahan global tersebut memberikan tekanan kepada setiap orang dan masing-masing orang memiliki kemampuan pertahanan diri yang berbeda. Zahid (2015) menjelaskan bahwa, “Globalization has not only opened informational exchange from developed to developing countries but has also led to the career prospects across the borders. Now, the individuals are expected to develop skills and competencies so that they can attain better job opportunities and consequently they enter into inter-regional competition.” Dengan keterampilan dan kompetensi yang dikuasai dengan baik oleh masyarakat dapat menyokong kehidupannya di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu dalam menyiapkan generasi milenial zaman now terhadap pengaruh globalisasi yang saat ini sedang berlangsung, pentingnya dalam sekolah-sekolah ditanamkan pendidikan karakter bagi para pelajarnya sehingga dapat bersaing dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar.

PERMASALAHAN.

Mudahnya informasi yang didapat masyarakat dari dunia luar tanpa adanya penyaringan informasi oleh pemerintah secara masif, membuat adanya dampak dari luar yang mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi milenial. Seberapa besar atau kecilnya pengaruh yang didapat tergantung dari seberapa banyak informasi yang dimaknai benar atau diterima oleh masyarakat. Terutama masyarakat milenial zaman now yang sangat merasakan terhadap pengaruh globalisasi. Contoh kasusnya adalah adanya pergaulan bebas yang disalah artikan dengan minum-minuman alkohol, merokok, pemakaian narkoba dan seks bebas diusia remaja. Untuk itu, agar generasi milenial zaman now tidak terpengaruh negatif serta dapat bersaing di era globalisasi, perlu adanya daya cegah dan pola yang terencana secara sistematis

dan terukur dari pemerintah melalui pendidikan. Sesuai Undang-undang No. 20 pasal 3 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung Jawab. Terutama pendidikan karakter sebagai daya cegah pengaruh negatif globalisasi yang semakin gencar masuk dalam lingkungan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN.

Menurut Princeton N. Lyman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan (Ekoprastyo, 2016). Definisi ini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Giddens, bahwa globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit (Giddens, 1990). Bila kita rasakan sekarang ini, arus globalisasi sudah mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke 20 dimana ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat ditandai dengan kejadian yang ada di luar negeri dalam hitungan detik saja kita sudah dapat mengetahuinya. Menurut Hamijoyo dalam mimbar (1990), ciri-ciri globalisasi, antara lain :

1. Globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi dan komunikasi yang diperkuat

oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh.

2. Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, social politik dan sekaligus mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan.
3. Adanya ketergantungan antar negara.
4. Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaharuan dan inovasi dalam struktur, isi dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama terjadi (melalui literature, kontak antar pakar dan mahasiswa).

Era globalisasi menurut Joseph & Chandra (1998) bahwa ada 8(delapan) kebaikan dan ada 13(tiga belas) keburukannya. Kebaikan globalisasi tersebut, antara lain:

1. Peran investasi asing (FDI) dalam menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di beberapa negara.
2. Peningkatan mobilitas sosial dan penguatan kelas menengah.
3. Kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru dari informasi dan komunikasi.
4. Komunikasi yang lebih mudah dan murah.
5. Kesempatan yang lebih luas untuk manusia dari berbagai kelompok etnik, budaya dan agama dalam berinteraksi.
6. Kesempatan yang lebih luas untuk melahirkan rasa simpati dan rasa prikemusiaan terhadap korban berbagai jenis bencana alam dan tragedi oleh perbuatan manusia di seluruh dunia.
7. Penonjolan ide-ide dan praktek pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam,

peraturan hukum dan hak asasi manusia.

8. Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita.

Sedangkan secara umum, pengaruh negatif dari globalisasi seperti yang dipaparkan oleh Joseph & Chandra diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas lingkungan yang semakin merosot adalah sebagai akibat dari terlalu mementingkan faktor keuntungan.
2. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi.
3. Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat miskin di banyak negara, terutamanya di negara-negara Selatan.
4. Modal jangka pendek yang keluar-masuk pasaran seperti kilat, sebagai akibat praktek baru yang menjadikan uang sendiri sebagai komoditi keuntungan.
5. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbedaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara Utara sendiri.
6. Penyebaran budaya konsumen yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat sumber daya manusia.
7. Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen akibat peranan yang dimainkan oleh badan-badan transnasional dan media komunikasi global.
8. Penyebaran budaya pop Amerika yang “menyegarkan panca indera dan mematkan roh”.
9. Kecenderungan pusat-pusat pendidikan tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu manajemen dan teknik

dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan.

10. Pembanjiran informasi yang tidak berguna.

11. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memanipulasi isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia.

12. Peng-internasional-an kriminal yang menyulitkan kriminal dibendung.

13. Peng-internasional-an penyakit.

Melihat dari dampak positif maupun negatif dengan adanya era globalisasi, Tilaar (1998) mengisyaratkan konsep inovasi yang dituntut dalam era globalisasi, yaitu:

1. Dalam era globalisasi kita berada pada suatu masyarakat yang terbuka dan penuh kompetisi. Ini berarti bahwa masyarakat berada dalam kondisi yang menghasilkan yang terbaik.
2. Masyarakat di dalam era globalisasi menuntut kualitas yang tinggi baik dalam jasa, barang, maupun investasi modal. Kualitas berada di atas kuantitas.
3. Era globalisasi merupakan suatu era informasi dengan sarana-sarannya yang dikenal sebagai information superhighway. Oleh sebab itu, pemanfaatan informasi superhighway merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern dan dengan demikian perlu dikuasai masyarakat.
4. Era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap sarana-sarana komunikasi seperti bahasa, merupakan syarat mutlak.
5. Era globalisasi ditandai dengan maraknya kehidupan bisnis. Oleh sebab itu, kemampuan bisnis, manajer, merupakan

tuntutan masyarakat masa depan.

6. Era globalisasi merupakan era teknologi dan oleh sebab itu, anggota-anggotanya harus melek digital.

Melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia terutama untuk bangsa Indonesia, baik pengaruh positif maupun negatif di era sekarang ini maka perlu adanya daya tangkal dan daya cegah masyarakat yang baik khususnya pada generasi milenial. Generasi ini memiliki ciri dan karakter yang khas dan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Dari usia mereka sangat muda dan kedepan mereka akan memegang peran yang sangat penting dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Sesuai dengan data BPS saat ini terdapat 50% penduduk adalah usia produktif dan berasal dari generasi milenial dan akan mencapai angka 70 % dari penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai 2030. Dalam perspektif Absher dan Amidjaya (2008) generasi milenial berkisar antara 1982 sampai 2002 dan mengalami *google generation*, *net generation*, *generation Z*, *echo boomers*, dan *dumbest generation*. Tapscott (2008) menyatakan generasi milenial sering disebut generasi Z dengan ciri suka dengan kebebasan, senang melakukan personalisasi, mengandalkan kecepatan informasi yang instan, suka belajar dan bekerja dengan lingkungan inovatif, aktif berkolaborasi dan *hyper technology*. Pengaruh era globalisasi membuat tidak sedikit generasi milenial yang terjerat dalam dunia gelap, mulai dari penggunaan narkoba, pergaulan bebas dengan mengkonsumsi alkohol serta merokok dan seks bebas layaknya suami istri. Sehingga untuk membuat generasi milenial dapat berkompetisi dan terhindar dari pengaruh negatif globalisasi, perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini.

Pendidikan yang diharapkan adalah secara sadar menyiapkan peserta didik dengan

kegiatan dan pengajaran yang sesuai dengan tantangan jaman di masa depan (Amri, 2013). Satu hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pendidikan, proses pembelajaran yang kontekstual akan menjadikan pembelajaran bermakna karena selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya (Johnson, 2002) sehingga peserta didik mudah memahami materi (Susilo, 2001). Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan karakter menurut Coon dalam zubaedi menjelaskan definisi karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat di terima oleh masyarakat. Karakter berarti tabiat atau kepribadian. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah di kuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Ditambahkan kutipan pak Habibie, bahwa pembangunan bangsa itu harus seperti dua sayap pesawat terbang, "sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sayap kiri adalah pembangunan ilmu dan teknologi. Keduanya harus ada, tidak bisa hanya salah satu saja. Dari dua unsur yang sudah dijelaskan, pendidikan dan karakter serta kutipan dari pak Habibie, generasi milenial perlu dipersiapkan dengan menanamkan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus (Kusuma,

2007). Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka tetapi juga harus diberi hal dalam segi moral dan spiritualnya, seharusnya pendidikan karakter harus diberi seiring dengan perkembangan intelektualnya yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini khususnya dilembaga pendidikan (Rukiyanto, 2009). Pendidikan karakter menurut Megawangi, “sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya (Megawati, 2004). Tujuan pendidikan karakter ini ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita kearah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku (Kusuma, 2007). Pendidikan karakter bagi individu bertujuan agar (Sunarti, 2005) :

1. Mengetahui berbagai karakter baik manusia.
2. Dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter.
3. Menunjukkan contoh perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter.

Pendidikan karakter sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3(tiga) disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter dapat dilakukan pada pendidikan formal dan informal secara umumnya, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan saling melengkapi dan mempercayai dan diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan

umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi keagamaan dan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pendidikan karakter di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti pengurus osis, pramuka, olahraga, seni, keagamaan dan lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menyentuh, mudah dipahami, dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa.

Pendidikan karakter di Indonesia memang sudah berjalan seperti di beberapa negara lainnya, seperti di Inggris, Amerika dan Finlandia. Namun bila melihat hasilnya dibandingkan dengan negara-negara yang telah disebutkan, Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan dan kurang memperhatikan atau mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini semakin ditinggalkan karena kurang perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter. Jadi jangan heran bila generasi milenial Indonesia banyak yang terjerumus dalam kehidupan bebas, banyak yang mengkonsumsi narkoba serta berhubungan seks tanpa memiliki ikatan.

Oleh sebab itu, kedepan perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpolo dan terukur pada dunia pendidikan untuk mensukseskan program pendidikan karakter pada generasi milenial. Salah satunya dengan cara perbantuan pembangunan sekolah

bertaraf internasional dengan biaya sekolah yang murah dari pemerintah pada daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan karakter yang dinilai masih kurang dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap, pemberian tenaga didik yang berkualitas dan masih banyak lagi yang lainnya serta dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Niscaya bila ini dilakukan secara konsisten, generasi milenial Indonesia dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara yang sudah maju di era globalisasi. Bila masih mengingat pesan Bung Karno, Presiden pertama RI. Bung Karno yang menggelorakan tema besar “nation and character building” pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (Soedarsono, 2009). Pernyataan Bung Karno ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegak dan kokohnya jati diri bangsa agar mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki banyak potensi yang dapat diandalkan, mulai dari letak geografis, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki sumber daya manusia manusia yang besar. Dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki, negara Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya yang sudah lebih maju. Terutama pada sektor sumber daya manusia, dimana pada saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 50% generasi milenial pada usia produktif yang pada tahun 2020 sampai tahun 2030 akan mencapai 70% usia produktif. Ini akan menjadi momentum kebangkitan negara Indonesia menghadapi era globalisasi yang sudah masuk ke semua sistem kehidupan masyarakat. Sehingga

untuk mempersiapkan generasi milenial menghadapi tantangan dalam era globalisasi, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Persiapan yang diberikan negara kepada generasi milenial dalam menghadapi era globalisasi adalah salah satunya dengan cara menjalankan program pendidikan karakter yang terpolakan dan terukur. Sudah banyak negara maju yang menjalankan program tersebut dan berhasil menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang unggul. Sehingga diharapkan dengan adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan karakter ini pada sektor pendidikan, generasi milenial yang dimiliki Indonesia dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang baik dalam menghadapi era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Agus Rukiyanto. (2009). Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Kanisius.
- Amri, Sofan. (2013). Pengembangan & Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013.
- Doni Kusuma A. (2007). Pendidikan Karakter. Jakarta: Grasindo.
- Euis Sunarti. (2005). Menggali Kekuatan Cerita. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Johnson, E.B. (2002). Control Teaching and Learning: *What It Is and Why It's Here To Stay*. Thousand Oaks. California: Corwin Press, inc.
- Joseph, A. C., & Chandra, M. (1998). *Globalization: The Perspectives and Experiences of the Religious Traditions of Asia Pacific*. Kuala Lumpur: International Movement for a Just World.

- Landry, S.H., Smith, K. E., Swank, P. R., Asel, M. A., & Vellet, S. (2001). "Does Early Responsive Parenting Have a Special Importance for Children's Development or is Consistency across Early Childhood Necessary?". *Developmental Psychology*. 37 (3) 387-403.
- Megawawangi Ratna. (2004). Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa, Bogor: IHF.
- Mussen, P.H., Conger, J.J., & Kagan, J. (1984). *Child Development and Personality*. New York: Harper & Row Publishers, Inc.
- Soemarno Soedarsono, (2009). Karakter Mengantarkan Bangsa dari Gelap Menuju Terang. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Susilo, H. (2001). Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa. Makalah Disajikan pada Seminar Pembelajaran dengan Filosofi Konstruktivisme di Jombang, tanggal 2 September 2001.
- Susilo, H. (2001). Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa. Makalah Disajikan pada Seminar Pembelajaran dengan Filosofi Konstruktivisme di Jombang, tanggal 2 September 2001.
- Tapscott, Don. (2008). *Grown up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. USA: McGraw Hill.
- Tilaar, H.A.R. (1998). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam *Perspektif Abad 21*. Jakarta: Penerbit Tera Indonesia.
- (2009). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zahid, Gulnaz. (2015). Globalization, nationalization and rationalization. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. (174): 109 – 114.
- Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet.2.
- Landry, S.H., Smith, K. E., Swank, P. R., Asel, M. A., & Vellet, S. (2001). "Does Early Responsive Parenting Have a Special Importance for Children's Development or is Consistency across Early Childhood Necessary?". *Developmental Psychology*. 37 (3) 387-403.
- Makagiansar, M., Sudarmono P, Hamijoyo, S. (1989). *Mimbar Pendidikan: Dampak Globalisasi*. Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX Desember 1990. Bandung: University Press IKIP Bandung: Bandung.
- Undang-undang No. 20 pasal 3 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Absher, Katherine and Amidjaya, Mary Rose. (2008). *Teaching Library Instruction to The Millennial Generation*. From Marymount University, Arlington, VA. Diakses dalam http://www.vla.org/Presentations/VLA_presentation_draft072208.ppt.
- Ekoprastyo, Harits. (2016). <http://gurupintar.com/threads/jelaskan-pendapat-para-ahli-mengenai-globalisasi.3410/>.
- <https://abisyakit.wordpress.com/2009/04/09/beberapa-pemikiran-bj-habibie/>, diakses tanggal 7 mei 2018.



Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SPN (Sekolah Polisi Nasional) guna Menghadapi Tantangan Keamanan Global

Chairul Anam

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Program Magister Ilmu Kepolisian,
E-mail: Anom.Shakti@gmail.com

Abstract:

SPN as part of Polri educational institution aims to form Police personnel who must be able to adjust to the changing times. The success of SPN education is determined one of them with the presence of qualified and reliable educators. Of course, the elements of financial rewards, the guarantee of opportunities to learn and develop themselves into several important elements for educators. The demands of existing SPN graduates are expected to be a lifetime learner ready to use. In addition, the graduates are expected to contribute positively to the community. One of the important criteria of SPN educators is professionalism with three basic competencies, namely personality, academic and performance competencies. The quality improvement strategy is done by pressing the weaknesses of the three basic competencies. Thus, it is expected that the graduates of Bintara Polri have the capability needed to answer the challenge of the progress of time.

Keywords: Police Educator, Professionalism, SPN

Abstrak :

SPN sebagai bagian dari institusi pendidikan Polri bertujuan membentuk personil Polri yang harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Keberhasilan pendidikan SPN sangat ditentukan salah satunya dengan keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan handal. Tentu saja unsur imbalan finansial, jaminan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi beberapa unsur penting bagi pendidik. Tuntutan yang ada lulusan SPN diharapkan mampu menjadi *lifetime learner* yang siap pakai. Di samping itu para lulusan diharap berkontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu kriteria penting tenaga pendidik SPN adalah profesionalisme dengan tiga kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, akademik serta kinerja. Strategi peningkatan mutu dilakukan dengan upaya menekan kelemahan ketiga kompetensi dasar tersebut. Dengan demikian diharapkan luaran lulusan Bintara Polri memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman.

Kata Kunci : Tenaga Pendidik Polri, Profesionalisme, SPN

Pendahuluan

Seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan (*sebagai landasan dan tujuan hidup*), pengendalian diri (*kecakapan dalam memilih mengambil keputusan, dan tanggung jawab*), kepribadian (*sebagai warga negara, warga global, dan warga yang toleran*), kecerdasan (*dalam memilih, beretika, cermat, kreatif, inovatif, dan pekerja keras*), berakhlak mulia (*berperilaku baik dan benar*) serta keterampilan (*secara kognitif dan psikomotorik*) diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seperti pernyataan Leon C Megginson (1963) yang menyebut ;

*"It is not the most intellectual of the species that survives; it is not the strongest that survives; but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself."*¹ (Leon, 1963)

Konsep teori ini menyatakan, bahwa manusia yang dapat bertahan adalah yang memiliki kemampuan terbaik untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Memasuki abad 21 sejumlah kecakapan mutlak dimiliki seseorang (Griffin dalam Patrick : 2012). Ditambahkan juga setiap personel Polri perlu berpikir kreatif, inovatif, kritis dan memiliki pemecahan masalah. Dari segi cara bekerja Setkap personel Polri harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Dari sisi bekerja setiap personel Polri juga harus mampu berliterasi informasi dan teknologi informasi. Dari segi hidup sebagai penduduk dunia, setiap personel Polri juga harus bisa berinteraksi dengan warga lokal dan global,

memiliki tanggungjawab, karir dan kesadaran budaya.

Perkembangan global saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menciptakan kompetisi global dan penguasaan aspek teknologi yang handal. Namun demikian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini belum sepenuhnya dipahami, disadari dan direspon oleh personel Polri secara maksimal sehingga masih ada personel yang "Gaptek" (Gagap Teknologi) terhadap peralatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan surel (*email*), operasionalisasi internet, pemeliharaan laman (*website*), Facebook, twitter, dan lain-lain. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok organisasi Polri di era globalisasi penuh dengan tantangan zaman ini. Kemampuan, kualitas, dan kompetensi tersebut dapat dicapai melalui sistem pembentukan personel secara tepat, akurat dan mantap dengan cara mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan setiap sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal dan optimal. Setiap personel Polri harus mampu merespon dan mengantisipasi setiap dinamika perkembangan dan perubahan secara tepat dan tepat.

Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah salah satu bagian dari pendidikan Polri yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang dibutuhkan oleh seorang personel Polri dalam pemenuhan tugas-tugas kepolisian. Di samping itu pendidikan di SPN juga merupakan satu rangkaian kegiatan dari siklus pembinaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri tetap berpegang pada prinsip keterpaduan, dengan tujuan untuk mengakomodir sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Polri yang ada saat ini harus mampu menciptakan personel Polri yang unggul dan bisa mengimbangi kemajuan

¹ Leon .(1963).Lessons from Europe for American Business . Published jointly by The Southwestern Social Science Association and the University of Texas Press.

jaman yang semakin modern. Namun demikian perlu dilakukan banyak pembenahan dan terobosan guna mencapai tujuan tersebut. Untuk mewujudkan itu personel Polri yang berkualitas, tentu diperlukan terobosan-terobosan baru dalam dunia Pendidikan Polri.

Dalam tulisan ini penulis ingin memfokuskan pembahasan pada tenaga pendidik di lembaga pendidikan pembentukan Polri, yaitu Sekolah Polisi Negara (SPN). Institusi di SPN adalah tempat terpenting dalam roda organisasi Polri karena SPN merupakan tempat ribuan Bintara Polri dicetak sebagai pelaksana tugas kepolisian di lapangan nantinya. Mereka lulusan SPN adalah para bintang yang merupakan tenaga pelaksana Polri di lapangan. Kinerja mereka di lapangan menentukan baik dan buruknya citra Polri di masyarakat. Bintara Polri yang dibentuk oleh SPN dengan masa pendidikan yang sangat singkat harus dapat menjadi sumber daya manusia yang siap pakai, mampu melaksanakan tugas dengan cara profesional, dan menjawab tantangan zaman.

Pendidikan SPN Berkualitas

Bambang Hendarso Danuri dalam Profil SPN Jambi menyebutkan *"Jago Negeri Bangun Jayo" Menuju Terwujudnya Lemdik Polri sebagai Centre of Excellence* mengemukakan bahwa

"Seluruh lembaga pendidikan Polri juga harus dibenahi, kemudian merencanakan perubahan sesuai prioritas, disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kepentingan pelaksanaan tugas. Perlu dipahami bahwa perubahan kultur sesungguhnya berawal dari lembaga pendidikan." (SPN Jambi, 2010)

Polri di masa milenial harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tujuan pendidikan Polri harus berubah untuk

menciptakan insan Polri yang kreatif, inovatif, kritis sebagai *problem solver*, mampu memberikan pelayanan dengan kesadaran budaya yang baik berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Memang evaluasi mendalam diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sistem pendidikan bagi insan Polri baik pada pembentukan, maupun pendidikan lanjutan.

Dari hasil riset disebutkan, bahwa aspek-aspek diklat yang masih harus memperoleh perbaikan adalah kualitas instruktur yang relatif masih belum sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan akademis, seperti masih banyak instruktur yang berpendidikan SMA, tidak melalui uji kompetensi, dan sebagainya (Nasution, 2010). Ini merupakan sebuah masukan berharga bagi Polri di masa depan. Bagaimana mungkin Polri mencetak anggota yang berkualitas dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang canggih bila para pendidiknya, terutama di lembaga lembaga pendidikan pembentukan, seperti SPN tidak dipilih dari insan insan terbaik Polri. Pendidikan dasar dalam pembentukan Polri memiliki peran terbesar yang harus mendapatkan perhatian lebih guna menghasilkan kualitas SDM profesional. Seharusnya tenaga pengajar pada sekolah-sekolah pembentukan Polri harus merupakan lulusan terbaik dari sekolah sekolah pencetak Polri, sehingga dapat mewujudkan luaran duplikasi insan Polri yang terbaik di masa depan.

Mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi (Sallis, 2003). Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa yang dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan apa belum (Usman, 2006 : 408). Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Di sini pelanggan

pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru dan staf kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu peserta didik, orang tua dan para pemimpin pemerintahan, serta masyarakat luas (Kamisa dalam Nurkolis, 2003: 70 – 71). Berdasarkan konsep relatif tentang kualitas, maka pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila:

1. Pelanggan internal berkembang baik secara fisik, maupun psikis. Fisik diartikan sebagai imbalan jasa, sedang psikis adalah kepuasan mental yang didapat dari kesempatan. Artinya, sebuah pendidikan dikatakan berkualitas bila tenaga pendidik mendapatkan imbalan finansial. Para tenaga pendidik yang bertugas di SPN Polri, selain mendapatkan gaji dan remunerasi sesuai dengan pangkat dan jabatannya, sebaiknya mendapatkan imbalan jasa untuk setiap materi yang diajarkannya. Besarannya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di negara Indonesia. Selain itu tenaga pendidik di SPN harus mendapatkan jaminan kesempatan untuk bisa terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreativitasnya. Dengan adanya insentif dan kesempatan belajar ini seharusnya menjadi daya tarik tersendiri bagi personel Polri untuk dapat menempati posisi sebagai tenaga pendidik di SPN.

2. Pelanggan eksternal :

1. Eksternal primer (Para Peserta Didik)

Pendidikan dikatakan berkualitas apabila lulusan yang dihasilkan menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifetime learner*), artinya para Bintara lulusan SPN ini tidak hanya puas dengan ilmu yang mereka dapat selama pendidikan, tapi terus berupaya untuk mempelajari hal-hal baru yang ada kaitannya dengan tugas mereka dan selalu

berupaya mengembangkan kemampuan sepanjang hayat. Di samping itu juga, harus memiliki keinginan untuk terus memperbaharui ilmunya di jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan SPN dengan mutu yang baik menghasilkan lulusan yang dapat berperan sebagai komunikator yang baik dalam bahasa nasional dan internasional, juga memiliki keterampilan teknologi untuk dimanfaatkan di lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari. Mereka juga harus siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks, pemecahan masalah, bahkan penciptaan pengetahuan, dan menjadi warga Negara yang bertanggung-jawab secara sosial, politik dan budaya. Intinya para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya. (Kartini Kartono, 1997:11)

2. Eksternal sekunder (Orang Tua, Pemimpin dan Instansi)

Diakui selain itu juga dalam sebuah pola pendidikan berkualitas, maka lulusannya akan dapat memberikan sumbangan yang positif. Artinya para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua dan Pemerintah dan pemimpin instansi Polri dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan. Orang tua para siswa SPN tentu menginginkan anak-anak mereka menjadi personel Polri yang dapat bekerja dengan baik, berprestasi dalam bidang tugasnya serta menjadi pribadi yang mulia yang dapat dibanggakan. Bagi para pemimpin Polri luaran dan lulusan SPN Polri diharapkan memberikan kontribusi positif, lewat kemampuan mereka menangani setiap permasalahan dalam tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat.

3. Eksternal tersier (Pasar Kerja dan Masyarakat)

Mutu pendidikan SPN yang baik ditandai dengan para lulusan yang berkompentensi dalam dunia kerja dan pengembangan masyarakat sehingga dapat memberikan sumbangan besar dalam roda organisasi kepolisian dan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian di atas, maka kualitas mutu pendidikan SPN perlu didukung oleh beberapa hal penting yang mengacu proses pendidikan. Proses pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai *input*, seperti tenaga pendidik, bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Dalam konteks hasil pendidikan, kualitas pendidikan mengacu rentang waktu berlangsungnya pendidikan di SPN. Masa enam bulan pendidikan di SPN diakui terlalu singkat. Ibarat memasak makanan, terlihat hanya matang di luar saja namun masih setengah matang di dalam. Pola pendidikan pembentukan Bintara yang relatif sebentar, dirasa belum mampu menginternalisasi nilai-nilai kejuangan dan profesionalisme Polri. Waktu pendidikan yang singkat di SPN hanya akan mencetak bintang instan yang belum siap menghadapi segala tantangan zaman. Lulusan yang dihasilkan masih sangat jauh dari standar kebutuhan Polri dalam pelaksanaan tugas. Sedikit penulis contohkan tentang lulusan SPN yang ada di lapangan, tidak semua Polisi yang baru lulus mampu mengemudikan kendaraan roda empat, serta pemahaman tentang rambu lalu lintas juga etika berkendara. Padahal kemampuan yang

terlihat sepele ini sangat vital untuk dikuasai personel Polri. Alangkah merepotkan bila seorang anggota Polri tidak dapat mengendarai kendaraan, padahal di banyak kesempatan mereka harus bergerak menuju sebuah tempat kejadian perkara dengan segera. Betapa mirisnya, ketika Polri disibukkan menertibkan masyarakat, tapi SDM nya sendiri masih belum memberi contoh yang baik di jalan raya.

Tantangan peningkatan mutu kualitas SPN sebagai pencetak personel Polri yang ada perlu dilakukan dengan pemahaman tentang mutu SDM Polri dalam pendekatan manajemen mutu sumberdaya manusia (MMSDM) modern yang dicermati sebagai upaya membangun bintang Polri yang lebih holistik dan komprehensif serta integral dalam keilmuan dan kemampuan. Pendekatan MMSDM modern berorientasi pada kepentingan instansi Polri yang hasil akhirnya adalah bentuk mutu bintang Polri terbaik yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat. Polri di masa ini masih belum lepas dari budaya jaman dahulu, nama baik Polri masih berada dalam masa penyembuhan. Belum lagi tantangan zaman, dimana jenis kejahatan berkembang begitu pesat akibat digitalisasi di semua aspek kehidupan. Mudahnya informasi, transportasi serta teknologi membuat bentuk bentuk kejahatan mengalami mutasi dan berkembang. Menurut penulis Polri tidak bisa lagi hanya mencetak SDM dengan sistem pendidikan lama. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka tidaklah berlebihan bila disampaikan bahwa banyak hal terkait pendidikan di SPN yang perlu untuk dievaluasi.

Perlu inovasi dan materi tambahan yang ditujukan untuk membekali para siswa SPN agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti; penguasaan terhadap teknologi komunikasi sehingga mampu menciptakan kompetisi global dan penguasaan aspek teknologi yang handal sesuai era globalisasi saat ini. Hal itu ditandai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi sehingga nantinya SDM yang dihasilkan adalah bintang-bintang yang siap pakai.

Namun demikian, bagian terpenting dari sebuah proses pendidikan adalah para tenaga pendidik yang bertugas di lembaga pendidikan tersebut. Dalam sebuah teori perkembangan manajemen diakui paradigma mengalami pergeseran. Kualitas tidak hanya ditentukan pada bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya, namun faktor terpenting adalah SDM tenaga pendidiknya. Tenaga pendidik yang ada di SPN seharusnya ditunjuk dari luaran SDM yang terbaik di Polri, karena tanggung-jawab pokok pembentukan moral, maupun intelektual peserta didik. Tenaga pendidik di SPN seharusnya merupakan personel yang memiliki catatan prestasi terbaik karena dengan peran para tenaga pendidik yang baik, hubungan personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi para siswa berlangsung. Dengan demikian Polri dapat menghasilkan SDM yang berkualitas di masa depan (Suparno (dkk), 2002).

Peran para tenaga pendidik adalah sebagai rekan kerja, pengambil keputusan, dan pengimplementasi program pengajaran (Cheng dalam Nurkolis, 2003:123). Maka tak terbantahkan lagi, bahwa pendidikan yang bermutu diawali dari tenaga pendidik bermutu. Tenaga Pendidik bermutu adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang diperlukan, serta dapat selalu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukannya pada saat proses pembelajaran. Seorang tenaga pendidik harus mampu mengembangkan ide-ide inovatif dari setiap materi di bidangnya.

Kompetensi Tenaga Pendidik

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Pada pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan dinyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga pendidik seyogyanya mampu memaksimalkan ilmu yang dimilikinya dengan memperhatikan perkembangan siswa, sehingga mampu menempatkan berbagai substansi perbedaan pengalaman belajar, perbedaan bahasa dan budaya, gaya belajar, bakat dan intelegensi sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai strategi pengajaran.

Untuk itu dibutuhkan tenaga pendidik dan pengajar yang kompeten dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugasnya dalam pendidikan. Disebutkan kompetensi adalah kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas jabatan maupun profesinya (Trianto, 2006: 62). Di samping itu juga ada tiga definisi tentang kompetensi guru yaitu; pertama, kompetensi guru adalah kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Kedua, kompetensi guru adalah ciri hakiki dari kepribadian guru yang menuntunnya kearah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Ketiga, kompetensi guru adalah perilaku yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sahertian, 1994:56). Sedangkan profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat,

dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. (Siagian 2009:163).

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa tenaga pendidik profesional dalam kerangka pengembangan mutu perlu memiliki beberapa kompetensi antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi akademik serta kompetensi kinerja.

1. Kompetensi kepribadian, antara lain; integritas, moral, etika dan etos kerja. Kompetensi kepribadian juga diartikan sebagai kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani.
2. Yang dimaksud dengan kompetensi akademik adalah kualifikasi sertifikasi kependidikan, menguasai bidang tugasnya dan belajar belajar. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi kinerja, antara lain; terampil dalam pengelolaan pembelajaran. Kompetensi kinerja disebut juga sebagai kompetensi profesional, yaitu; kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing para peserta didik yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan)

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan SPN

Dinamika perkembangan zaman bergerak sangat cepat, sesaat lalu belum ada tindak

kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Namun hari ini kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi bukan hal yang baru. Untuk menghadapi permasalahan yang semakin lama makin berkembang, baik dalam jumlah maupun dalam ragam kejahatan terutama yang mengadaptasi kemajuan sistem informasi dan teknologi sesuai perkembangan jaman, maka Polri perlu memperbaharui kualitas dari personel Polri. Perbaikan kualitas ini harus dimulai dari tingkat pelaksana, yaitu ; bintang Polri yang bekerja langsung menghadapi segala macam perkembangan zaman. Untuk itu maka, lembaga pendidikan pembentukan Polri yang harus banyak berperan adalah SPN (sekolah Polisi Negara) sebagai pencetak Personel Polri.

Strategi perbaikan mutu harus berdasarkan analisa terhadap kelemahan, kekurangan, kekuatan dan peluang yang ada pada SPN Polri. Pada pembahasan kali ini fokus tulisan ini ada pada tenaga pendidik sebagai unsur terpenting dalam sistem pendidikan di SPN. Tidak terbantahkan lagi bahwa pendidikan yang bermutu diawali dari tenaga pendidik yang bermutu juga. Tenaga Pendidik yang bermutu adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang diperlukan, serta dapat selalu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukannya pada saat proses pembelajaran serta mampu mengembangkan ide-ide inovatif dari setiap materi di bidangnya. Kelemahan dari sistem pendidikan yang banyak terjadi di SPN adalah kelemahan tenaga pendidik yang ada. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa tenaga pendidik profesional memiliki beberapa kompetensi, antara lain; kompetensi kepribadian, akademik serta kinerja.

Kelemahan kompetensi kepribadian ditandai dengan kurangnya motivasi tenaga pendidik yang bekerja di SPN, sehingga melemahkan integritas, moral, etika dan etos kerja. Pada akhirnya tenaga pendidik seperti ini

tidak dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Selama ini kondisi yang sering terjadi, terkesan tenaga pendidik di SPN banyak diisi oleh personel 'buangan'. Bagaikan manusia-manusia yang lelah sehingga menginginkan tempat tugas yang tidak membutuhkan energi yang besar di lapangan. SPN terkesan sebagai tempat singgah personel-personel Polri yang bermasalah pada masa tugas sebelumnya. Motivasi tenaga pendidik dan pengasuh yang ada saat ini kebanyakan bukan untuk mewujudkan *center of excellence*, tapi lebih pada pemanfaatan peserta didik untuk kepentingan pribadi atas nama lembaga pendidikan. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka perlu strategi untuk dapat memotivasi para tenaga pendidik di SPN untuk bekerja. Motivasi dapat dalam bentuk fisik seperti; *reward* berupa insentif, serta bekal psikis, seperti ; kesempatan yang lebih dibanding dengan personel lain dalam segi jenjang, karir dan pendidikan.

Kelemahan berikutnya adalah dalam kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para peserta didik (Casis) SPN merupakan lulusan SMA, maka hendaknya untuk mencetak bintang Polri yang handal, jangan ada lagi tenaga pendidik yang hanya berlatar belakang SMA di SPN. Polri memiliki lulusan terbaik setiap tahunnya dari AKPOL, PTIK-STIK, SESPIM. Peran Biro SDM Polri diperlukan untuk mempertimbangkan penempatan para lulusan terbaik dari lembaga lembaga pendidikan Polri guna dimanfaatkan untuk menjadi pengajar di lembaga-lembaga pendidikan Polri untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka bekerja di lapangan. Konteks ini seolah dianggap sebagai pengabdian luhur mereka untuk kepentingan Polri di masa depan. Bila ini dilaksanakan maka diprediksi luaran (*output*) dari lembaga pendidikan seperti SPN akan dapat lebih

ditingkatkan.

Kelemahan ketiga dalam hal kompetensi kinerja, antara lain ; kurangnya keterampilan pengelolaan pembelajaran. Bukan rahasia lagi, bahwa dalam urusan mutasi jabatan, posisi tenaga pendidik di SPN, masih ada sebagian kecil yang didasarkan pada selera pimpinan, *like and saja*, dan kurang mengukur dengan kompetensi, kinerja dan potensi anggota dalam proses penunjukannya. Masih adanya pimpinan yang menyalahgunakan hak, sehingga berpotensi mengganggu sistem manajemen SDM terutama pada proses penempatan dalam jabatan yang kadangkala mengabaikan kebutuhan organisasi. Penempatan tenaga pendidik di SPN tidak dapat lagi berlaku sembarangan, bila memang bertujuan untuk perbaikan kualitas lulusan SPN. Maka dengan waktu yang singkat, perlu tenaga yang handal untuk mencetak lulusan terbaik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tenaga pendidik di SPN seyogyanya memiliki semua kompetensi yang disyaratkan sebagai ukuran profesionalisme, yaitu handal dan ahli dalam bidangnya masing-masing dan kompeten sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan di SPN, yaitu mencetak SDM yang handal. Pendidikan dan pelatihan Polri merupakan bagian dari manajemen SDM Polri. Untuk mengatasi kelemahan ini maka diperlukan manajemen SDM yang transparan, akuntabel, profesional, bermoral, dan modern.

Kesimpulan

Guna mendapatkan tenaga pendidik dengan berkarakteristik unggul dan profesional, maka penulis menekankan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik menjadi sangat strategis. Tenaga pendidik di SPN tidak boleh berasal dari sembarang latar pendidikan. Tenaga pendidikan yang bekerja di SPN harus berasal dari para lulusan terbaik lembaga pendidikan Polri, agar

tujuan untuk mencetak Bintara yang benar-benar berkualitas dapat tercapai. Untuk itu, harus ada mekanisme seleksi atau rekrutmen khusus untuk menempatkan tenaga pendidik di SPN dengan memperhatikan kualitas kompetensi dan mutu. Hal ini tentu akan banyak mempengaruhi proses pendidikan di SPN. Apa jadinya bila para calon Polisi dididik oleh tenaga pendidik yang kurang termotivasi dan minim kompetensi, juga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.

Bila tenaga pendidik tidak memiliki kompetensi, kualitas dan kemauan membentuk bintara berkualitas, dapat diyakini luaran (*output*) yang dihasilkan juga pasti akan buruk. Untuk itu di masa depan perlu dikaji dan di evaluasi kembali mekanisme yang tepat pemilihan tenaga pendidik di SPN dan sebaiknya yang ditempatkan adalah orang-orang istimewa, personel-personel terbaik dalam mutu, dan kemampuan diri, guna mencetak bintara yang terbaik. Penempatan SDM Polri sebagai tenaga pendidik di SPN perlu memanfaatkan produk-produk yang terbaik dari lembaga pendidikan Polri untuk membenahan organisasi, maupun kultur.

Aspek lamanya pengabdian sebagai tenaga pendidik juga harus memiliki kurun waktu tertentu yang jelas, sehingga dengan ada kejelasan tersebut mereka bisa melanjutkan mengembangkan karir di lapangan usai menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai tenaga pendidik di SPN. *Reward* secara fisik, berupa insentif memadai serta *reward* psikis, seperti ; kesempatan dan peluang besar untuk mengenyam jenjang karir dan pendidikan yang sesuai harus diberikan kepada tenaga pendidik di SPN yang merupakan para lulusan terbaik Polri. Alhasil ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi tenaga pendidik SPN dalam melaksanakan tugas.

Daftar Pustaka

Griffin, P., McGaw, B. & Care, E., (eds.). (2012). *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. Dordrecht : Springer

Kartini Kartono. (1997). *Patologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali

Leon (1963). *Lessons from Europe for American Business*. Published jointly by The Southwestern Social Science Association and the University of Texas Press.

Nasution, W (2015). Analisis Program Pendidikan Dan Pelatihan Brigadir Polri Guna Meningkatkan Profesionalisme Kerja Dalam Rangka Memenuhi Harapan Masyarakat Bengkulu (*Sebuah Tesis*). Bengkulu : Universitas Bengkulu.

Paul, Suparno (dkk.). (2002). *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius

Sahertian, Piet (1994). *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta : Andi Offset.

SPN Jambi (2010), *Profil SPN Jambi "Jago Negeri Bangun Jayo" Menuju Terwujudnya Lemdik Polri sebagai Centre of Excellence*. Jambi : SPN Jambi.

Trianto (2006). *Strategi Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa*. Jakarta : Depdiknas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Usman (2006). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Akasara.

Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa

A. Wahyurudhanto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail : wrudhanto@gmail.com

Abstract:

This research begins with the initial thought that in fact Polsek as the basis of detection and base of solutions can not be done optimally. This is indicated by the reluctance of the community to cooperate with the police in providing information relating to Kamtibmas, so that there are still many unexpectedly unexpected public outcry at the Polsek level. While Bhabinkamtibmas as the spearhead of Polsek performance is loaded with various tasks. Thus, for the implementation of Community Policing which has basis on partnership with society and problem solving, Bhabinkamtibmas with all its dynamics, it is deemed necessary to have early detection capability in order to support the implementation of Police duties.

Keywords : Early detection, Bhabinkamtibmas, Community Policing, Police duties.

Abstrak:

Penelitian ini diawali dengan pemikiran awal bahwa pada kenyataannya Polsek sebagai basis deteksi dan basis solusi belum bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih enggannya masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas, sehingga masih seringnya muncul gejolak di masyarakat secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polsek. Sementara Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kinerja Polsek sudah sarat dengan berbagai beban tugas. Maka, untuk dalam rangka implementasi Polmas yang mempunyai basis pada kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah, Bhabinkamtibmas dengan segala dinamikanya, dirasa perlu mempunyai kemampuan deteksi dini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri.

Kata Kunci : Deteksi dini, Bhabinkamtibmas, Polmas, Tugas-tugas Polri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari kemajuan zaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Seiring dengan bergulirnya era reformasi telah menggugah kesadaran seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan atas berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak profesional serta proporsional menuju masyarakat sipil yang demokratis. Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang mendukung produktifitas yang mensejahterakan warga masyarakat.

Untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan atmosphere baru dalam masyarakat ini, Polri pun dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri, melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang ada dan melalui perubahan pola pikir para petugas Polri (*to change the mind set of police officers*) secara berkesinambungan agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra. Memahami atau cocok dengan masyarakat, menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum. Di samping itu sebagai pribadi para anggota Polri

harus dapat dijadikan panutan masyarakat dan mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat.

Dengan demikian Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Kelahiran kepolisian modern dipandang sebagai proses pembebasan polisi dari cara-cara kerja yang *unpolice* atau ‘tidak layak polisi’ antara lain : tidak profesional, sewenang-wenang, otoriter, model militeristik, penyalahgunaan wewenang (KKN), arogan, dsb.

Dalam Era Reformasi yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun (dan masih bergerak terus) ini, sebenarnya kepolisian mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membantu dan mendorong terciptanya perubahan dalam tatanan masyarakat. Pembaharuan tatanan sosial dapat direkomendasikan oleh kepolisian karena polisi berada dalam posisi yang paling baik untuk memberikan komentar dan rekomendasi tentang aspirasi (kelompok-kelompok) dalam masyarakat. Posisi kepolisian yang dekat masyarakat karena hirarki organisasi yang menyentuh sampai ke lapis paling bawah (pos polisi / sub sektor – sektor – resor), menyebabkan Polri mudah memahami masalah-masalah yang dialami suatu (kelompok) masyarakat dan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu program Polri dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri, adalah "Polsek Kuat" sebagai lini terdepan Pelayanan Prima dengan mengoptimalkan Penggelaran "Satu Desa Satu Polisi". Kerangka berpikir yang dipakai acuan adalah konsep "Polsek Kuat" (Kuat, Mampu, Tuntas) yaitu:

- a. Polsek Sebagai Basis Deteksi (Deteksi Dini, Peringatan Dini dan Deteksi dan Deteksi Aksi);
- b. Polsek sebagai Basis Solusi (Konsep "Segerakan" Selesaikan Masalah kecil sebelum berkembang); dan
- c. Polsek sebagai Gakkum Humanis.

Namun dalam kenyataannya Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi belum bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih enggan masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas, masih seringnya muncul gejala di masyarakat secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polsek, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polsek tidak mampu menangani kendati masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat Polsek.

Dalam pelaksanaannya agar Polsek Kuat dapat terwujud, dengan indikator mampu sebagai basis deteksi maupun basis solusi, di lapangan akan diperankan oleh Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan dari Unit Binmas di Polsek-polsek. Merunut pada perkembangan peran Babinkamtibmas, pada awalnya dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Kota dibentuklah Bintara Polri Pembina Kamtibmas yang disingkat Babinkamtibmas. Babinkamtibmas sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan Polri Nomor 17/VII/1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa / kelurahan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda sebagai Pengandali administratif dan dalam penugasannya di bawah kendali operasi Kapolsek setempat.

Selanjutnya karena dinamika hahekat ancaman yang muncul, diterbitkanlah Keputusan Kapolri Nomor 8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan sebelumnya. Sebutan Babinkamtibmas yang sebelumnya hanya untuk Bintara Polisi diubah menjadi Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Kamtibmas, dengan personel dari kelompok kepangkatan Brigadir atau Inspektur. Dengan perubahan ini maka optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dapat diakselerasi dengan memberdayakan perwira polisi yang akan ditugas sebagai Bhabinkamtibmas.

Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi mengandung harapan setiap permasalahan Kamtibmas harus sudah terdeteksi secara dini di tingkat Polsek sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan walaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal, namun kenyataan yang terjadi justru berbicara sebaliknya permasalahan diketahui dan diantisipasi setelah membesar di tingkat regional dan nasional, terliput media dan menjadi perhatian publik bahkan semakin tidak terkendali yang akhirnya harus menimbulkan korban jiwa dan harta benda lebih besar yang pada muaranya makin memperburuk citra dan kredibilitas Polri di mata publik.

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak

masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya Bhabinkamtibmas adalah pengembangan Polmas di desa/kelurahan.

Pada pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, **deteksi dini**, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Bhabinkamtibmas wajib melakukan beberapa kegiatan, antara lain : kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri. Dengan beban tugas oleh Bhabinkamtibmas tersebut dengan segala dinamikanya, maka dirasa perlu ada kajian khusus mengenai kemampuan deteksi dini Bhabinkamtibmas.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah:

Bagaimana kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas sebagai penguatan program satu polisi satu desa ?

Karena itu dengan rumusan permasalahan tersebut maka peneliti akan mencari jawaban untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas saat ini ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi

kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas ?

3. Apa hambatan dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas ?
4. Apa yang sudah dilakukan Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas ?

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian bersifat deskriptif analitis.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metoda :

- a. Studi Dokumen.
- b. Survei melalui pengisian kuesioner.
- c. Wawancara
- d. *Focus Group Discussion (FGD)*

D. Disain Penelitian

- a. Studi Dokumen dilakukan pada :
 - 1) Data di Ditbinmas Baharkam Polri untuk melihat data statistik jumlah anggota Bhabinkamtibmas dan penyebarannya.
 - 2) Laporan analisa dan evaluasi pada

Mabes Polri, Polda, dan Polres tentang kinerja Bhabinkamtibmas untuk melihat keterkaitan kinerja Bhabinkamtibmas dengan kemampuan deteksi dini dalam implementasi Polmas.

b. Survei melalui pengisian kuesioner dilakukan pada :

- 1) Anggota Bhabinkamtibmas untuk melihat tingkat pemahaman dan kompetensi mengenai kemampuan deteksi dini dalam implementasi Polmas.
- 2) Masyarakat untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kemampuan deteksi dini dalam implementasi Polmas.

c. Wawancara dilakukan untuk pendalaman terhadap data yang diperoleh dari studi dokumen maupun dari survei. Di samping itu wawancara melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan nara sumber dimaksudkan untuk menggali informasi dalam rangka mencari data tentang :

- 1) Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.
- 2) Permasalahan dalam pengelolaan kemampuan Bhabinkamtibmas, khususnya dalam kemampuan deteksi dini.
- 3) Pola peningkatan kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.

d. Nara sumber dalam wawancara adalah :

- 1) Direktur Binmas Baharkam Polri.
- 2) Direktur Binmas Polda.
- 3) Kapolres.
- 4) Kasatbinmas.
- 5) Kapolsek.

- 6) Kanit Binmas Polsek.
- 7) Anggota Bhabinkamtibmas.
- 8) Anggota masyarakat terpilih.

e. Focus Group Discussion dilakukan pada para Bhabinkamtibmas, dimaksudkan untuk menggali informasi dalam rangka mencari data tentang :

- 1) Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.
- 2) Permasalahan dalam implementasi deteksi dini oleh anggota Bhabinkamtibmas.
- 3) Pola peningkatan kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.

E. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini akan menggali kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas, maka lokasi penelitian dipilih untuk memberikan variasi pada lokasi, karakter wilayah dan dinamika kamtibmas yang berkembang.

Lokasi Penelitian :

1. Mabes Polri (Ditbinbmas Baharkam Polri).
2. Polda Metro Jaya (dengan variasi Polres Metro dan Polres Kawasan), yaitu di Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Bekasi Kota, Polres Metro Tangerang Kota, Polresta Depok dan Polres Pelabuhan.
3. Polda Kalimantan Timur (dengan variasi Polresta dan Polres yang mempunyai Polsek perbatasan darat), yaitu di Polres Balikpapan, Polres Tarakan, Polres Nunukan, Polres Bulungan, dan Polres Berau.
4. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (dengan variasi Polresta wilayah kota turis, pemukiman, dan kampus/pendidikan),

yaitu di Poltabes Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Kulonprogo, Polres Bantul, dan Polres Gunungkidul.

E. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama enam bulan, yaitu pada bulan April – Oktober 2016. Pelaksanaan penelitian terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, FGD hasil penelitian dan penulisan laporan penelitian.

III. KAJIAN PUSTAKA

A. *Community Policing* di Indonesia

Menurut para ahli seperti Trojanowich (1998), Bayley (1988), dan Rahardjo (2001) yang secara garis besar menekankan pada pentingnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat tempat bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri. Konsep Polmas yang diadopsi Polri sekarang ini, bervariasi. Ada yang mirip sistem Koban atau Chuzaiso dari Jepang, sistem Neighbourhood Policing dari Singapura, atau Community Policing dari Amerika Serikat. Konsep tersebut dimodifikasi di Indonesia, karena karakteristik budaya masyarakatnya. Perlu ada penyesuaian cara bertindak sebagai penjabaran konsep Polmas tersebut dengan karakteristik masyarakat. Meski demikian, pengertian Polmas sampai saat ini masih ada yang mengartikan pemolisian masyarakat dan pembinaan Kamtibmas maupun Community Oriented Policing (COP). Namun demikian dalam perkembangannya telah dimodifikasi dengan kebijakan tentang Polmas sebagai perpolisian masyarakat, yaitu suatu upaya agar masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya dan komunitasnya sendiri, dengan polisi sebagai fasilitator. Dalam masyarakat yang teratur (dan

stabil secara politik), warga dapat mengharapkan hidup dengan rasa aman (tanpa “*fear of crime*”) dan akan berpaling kepada polisi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan.

Penerapan model *Community Policing* di beberapa wilayah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi kekinian Indonesia dalam arus reformasi yang berimbas pula pada institusi kepolisian. Tuntutan reformasi sektor keamanan saat itu disikapi dengan reformasi Polri yang dinyatakan dalam empat paradigma. *Pertama*, perubahan pendekatan, dari pendekatan militeristik ke pendekatan profesionalitas. *Kedua*, mengubah pendekatan kekuasaan menjadi pendekatan yang mengedepankan pelayanan. *Ketiga*, pendekatan yang berorientasi koperasi berubah menjadi pendekatan yang berorientasi pasar. Dan *keempat*, berusaha memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat (Muhammad, 2004 : 14).

Dalam berbagai bahan pustaka mengenai pemolisian dikemukakan akan terjadinya perubahan “struktur pemolisian” dimasing-masing negara maupun secara global. Bayley dalam tahun 1994 sudah menyarankan suatu “Cetak Biru Untuk Masa Depan” Kepolisian dan dalam tahun 2001 kembali bicara tentang “Struktur Baru Pemolisian”. Yang menjadi perhatian Bayley antara lain adalah bahwa perlahan tapi jelas pemerintah akan kehilangan monopoli atas pemolisian. Masalahnya bukan saja “privatisasi” pemolisian, tapi juga “kaburnya batas antara yang publik dan privat”, serta bahwa pemolisian akan melampaui batasan antar-lembaga. Dia menyebutnya sebagai “*multilateralization*”.

Transformasi dalam pemolisian berkaitan erat dengan perkembangan demokrasi (diberbagai negara, termasuk Indonesia). transformasi ini berakibat perlunya “restrukturisasi” dalam pemolisian, khususnya merujuk pada suatu proses “*transferring the construction of security*

to non-governmental groups". Hal ini menurut Bayley tidak saja terjadi dalam batas-batas negara, tetapi juga "being developed vigourously at international levels". Perkembangan ini terlihat antara lain pada pemolisian yang dilakukan oleh *private multinational corporations*, terjadinya kerjasama transnasional di antara lembaga-lembaga penegakan hukum (yang mungkin memerlukan tata-kelola dalam tingkat transnasional), dan bahwa pemolisian oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Uni Eropa menimbulkan keperluan adanya "pengawasan supranasional" terhadap keamanan. Pemolisian masa depan akan memerlukan restrukturisasi yang dipengaruhi oleh dua kekuatan: "multilateralization within countries" dan "supranationalization among countries" (Bayley and Shearing, 2001).

Dalam perkembangannya maka muncul model perpolisian yang melibatkan masyarakat dengan dua pilar utama yaitu kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Mengacu pada perkembangan pembahasan akademis mengenai *community policing*, bisa dikutip pada pendapat Trojanowics (1990) mengenai prinsip-prinsip *community policing*. Banyak teori mengenai perilaku kriminal terfokus pada faktor-faktor sosial sebagai penyebab kejahatan. "Teori jendela pecah" (*broken windows theory*) tentang kejahatan, yang melukiskan memburuknya kondisi perkotaan sebagai kondisi yang mendorong lingkungan yang kondusif bagi perilaku kriminal, telah memberikan landasan bagi dianutnya program-program Polmas yang berorientasi komunitas. Program Polmas mengembangkan tanggung jawab bagi kontrol kejahatan dari polisi kepada masyarakat umum. Polisi bekerjasama dengan komunitas di dalam mengidentifikasi masalah-masalah dan menerapkan berbagai strategi, yang seringkali memfokuskan pada upaya-upaya mengatasi persoalan tertentu untuk mengurangi kejahatan dan ketakutan akan kejahatan di

masyarakat.

B. Pencegahan Kejahatan

Menurut sosiolog Emille Durkheim (1933), kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategis (lingstra) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (kamdagri).

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba mengupas konsep dari pencegahan (*prevention*) dengan memecahkannya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya (Daniel Gilling, 1997: 2).

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan

tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).

C. Intelijen dalam Deteksi Dini

Intelijen berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara). Deteksi dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri dijalankan oleh BIN, kemudian Polri menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian yang terkait Harkamtibmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Alexandra (2006 ; 17) intelijen negara setidaknya berkaitan dengan dua hal. Intelijen sebagai sebuah fungsi dan intelijen sebagai sebuah organisasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai sebuah fungsi, berkaitan dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan *early warning system*. Intelijen berasal dari kata *intel* yang secara etimologi berasal dari kata *intelligere* (Latin), *intelligence* (Inggris), dan *intelligt/intelgentie* (Belanda) yang berarti cerdas atau pandai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 ; 335), istilah

intelijen dipersonifikasikan sebagai orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang. Sedang dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1989 ; 189) intelijen dijelaskan sebagai hasil rangkaian kegiatan, suatu proses pentahapan kerja sistematis yang terdiri atas pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi dari semua tahapan proses kerja sebelumnya dan interpretasi dari seluruh informasi yang didapatkan, serta perkiraan yang kemudian dibuat berdasarkan interpretasi yang diperoleh.

Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak – pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan.

Polsek sebagai satuan kewilayahan Polri terdepan dalam rangka Pembinaan Kamtibmas mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi intelijen yaitu sebagai basis deteksi dengan melakukan deteksi dini dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah sehingga Polsek diharapkan mampu mendeteksi sejak dini, mengidentifikasi segala masalah yang ada di masyarakat dan dapat memberikan peringatan dini kepada pimpinan. Proses deteksi

dini pada hakekatnya adalah proses analisis dan pengumpulan informasi.

Dalam pelaksanaannya petugas di lapangan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Pemberdayaan peran Babinkamtibmas dalam tugas Intelijen Keamanan hanya meliputi kegiatan penyelidikan Intelijen dalam rangka mengumpulkan informasi yang berguna untuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil informasi yang didapatkan oleh Bhabinkamtibmas sifatnya cukup sederhana dan belum mendalam sekedar menggali apa yang diketahui oleh individu atau kelompok masyarakat tentang suatu kejadian yang akan terjadi, sedapat mungkin memenuhi kriteria tentang apa yang akan terjadi, siapa pelaku dan sasarannya, dimana dan kapan, dengan cara atau metoda apa dan mengapa atau alasan apa yang melatarbelakangi rencana tersebut

D. TEMUAN PENELITIAN

1. Kondisi kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas.

Secara umum kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas sudah cukup, dalam arti untuk menjadi petugas kepolisian dengan fungsi utama untuk pengumpulana bahan keterangan (Pulbaket), kinerja Bhabinkamtibmas dalam hal ini sudah cukup. Namun, jika merujuk pada kapasitas informasi yang harus dikumpulkan, memang masih tercatat banyak kekurangan. Secara umum, kemampuan intelijen dalam deteksi dini yang diharapkan pada Bhabinkamtibmas, adalah :

a. Penguasaan intelijen dasar. Dengan penguasaan intelijen dasar desa/kelurahan binaannya, seorang bhabinkamtibmas dapat memahami karakteristik kerawanan desa/kelurahan binaannya. Pemahaman ini diperoleh berdasarkan data-data tri gatra dan panca gatra - mencakup bidang-bidang

yang luas, umum dan cenderung bersifat statis, dengan memberikan arti pada gejala-gejala, kejadian-kejadian yang menonjol dan perubahan-perubahan yang telah terjadi.

b. Kemampuan penyelidikan. Penyelidikan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijaksanaan dengan risiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu.

Penyelidikan intelijen terutama diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi aktual terutama terhadap bidang-bidang permasalahan dalam masyarakat desa/kelurahan binaannya yang berpotensi untuk berkembang menjadi gangguan kamtibmas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang menonjol sebagaimana telah diketahui dari intelijen dasar desa/kelurahan binaannya. Kemampuan penyelidikan intelijen bagi seorang Bhabinkamtibmas terutama meliputi kemampuan penguasaan teknik dan taktik penyelidikan intelijen terbatas. Adapun kemampuan teknik penyelidikan intelijen yang penting bagi seorang Bhabinkamtibmas adalah penelitian, wawancara, wawancara tersamar atau *eliciting*, dan pengamatan/penggambaran.

Kemampuan teknis intelijen tersebut pada umumnya diperoleh secara otodidak. Kalau ada pelatihan pun tidak bisa diterima secara maksimal, karena memang para anggota Bhabinkamtibmas tidak didisain untuk menjadi intelijen. Istilah intelijen terbatas, atau yang dalam diskusi kelompok sering disebut dengan intelijen terbuka hanya dipahami oleh sebagian anggota Bhabinkamtibmas karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan. Dari hasil penelitian ditemukan, pada anggota

Bhabinkamtibmas di kota-kota besar, seperti di Polda Metro Jaya dan Polda DIY memang penguasaan pengetahuan lebih memadai, karena lingkungan kerja yang memadai.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi untuk mengoptimalkan anggota Bhabinkamtibmas sebagai “agen intelijen terbuka” sangat tinggi. Posisi sebagai polisi umum dengan harus selalu menggunakan seragam dinas setiap bertugas memberikan keuntungan, kehadirannya tidak pernah “dicurigai” oleh masyarakat, sehingga untuk masuk dalam lingkungan masyarakat tidak mengalami kesulitan. Sehingga ketika akan menjalankan fungsi sebagai intelijen terbuka dengan melaksanakan intelijen terbatas akan sangat terbantu karena posisi sebagai anggota Bhabinkamtibmas yang memang harus setiap hari melekat pada masyarakat.

Namun, karena memang sejak awal tidak didisain untuk melaksanakan fungsi intel, dalam keseharian tugas “feeling intelijen” tidak terasah betul. Sehingga kadangkala tingkat kepekaan untuk melihat suatu peristiwa atau informasi apakah mempunyai potensi kerawanan kamtibmas, tidak dapat secara cepat direspon. Selain itu, karena Bhabinkamtibmas bukan pelaksana fungsi intel, kemampuan administrasi intelijen kurang begitu terampil. Hal ini terlihat pada kemampuan menyimpulkan suatu peristiwa atau informasi sebagai bahan yang akan disampaikan ke pimpinan, seringkali kurang fokus. Informasi yang diberikan sangat umum, dan dalam keadaan mendesak tidak dapat diharapkan jika harus juga memberikan penilaian atas suatu peristiwa atau informasi. Hal ini yang menjadikan kemampuan deteksi dini menjadi kurang tajam. Walau dari sisi semangat untuk memberikan informasi, antusiasmenya sangatlah tinggi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan deteksi dini.

Jika mengacu pada teori manajemen bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Man (SDM), Money (anggaran), Material (sarana dan prasarana), serta Methode (metoda kinerja), maka kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas tidak bisa terlepas dari unsur tersebut.

Dari aspek SDM, karena Bhabinkamtibmas pada awalnya diambilkan dari sumber Brigadir, maka mayoritas adalah lulusan SMA. Pada beberapa Polres ada anggota Bhabinkamtibmas yang lulusan S-1, namun hal itu karena inisiatif dari anggota bersangkutan untuk melaksanakan kuliah di luar jam dinas. Jadi inisiatif individu untuk meningkatkan kapabilitas pribadi dengan kuliah menjadi poin positif bagi organisasi. Dalam uji petik dalam penelitian dengan melakukan wawancara pada anggota Bhabinkamtibmas yang sarjana diperoleh temuan, mereka memiliki wawasan yang lebih dibanding anggota lain, di samping itu juga kemampuan untuk memberikan analisis terhadap kasus-kasus tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Namun peningkatan jenjang pendidikan tidak dilakukan secara terstruktur oleh organisasi, sangat tergantung dari inisiatif pribadi anggota.

Aspek anggaran merupakan hal yang selalu menjadi hambatan dalam organisasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan kinerja bagi anggota Bhabinkamtibmas sebesar Rp 1.100.000 per anggota per bulan, bukanlah solusi untuk meningkatkan kinerja, karena pada masing-masing wilayah memkarakteristik yang berbeda-beda dengan jangkauan tugas yang berbeda-beda, terutama jika dilihat dari aspek geografis. Angka Rp 1.100.000 diperoleh dari perkalian 22 hari x Rp 50.000, sehingga asumsinya seorang anggota Bhabinkamtibmas hanya bekerja 22 hari, padahal prakteknya tidak ada hari libur.

Selain itu, kondisi geografis di luar Jawa, seperti pada penelitian ini dilakukan di Kaltim, biaya Rp 50.000 per hari sangat tidak masuk akal dengan kondisi alam yang membutuhkan sarana dengan biaya tinggi untuk operasionalisasi kerja.

Aspek sarana dan prasarana juga menjadi temuan utama dalam penelitian ini, karena kebijakan logistik yang sering tidak sesuai dengan kondisi alam wilayah tempat anggota Bhabinkamtibmas bertugas. Pada wilayah di Kalimantan Timur Utara yang sebagian besar adalah sungai, harusnya ada fasilitas perahu untuk patroli, namun fasilitas tersebut tidak ada. Pada wilayah pegunungan, seperti Polres Gunung Kidul di Polda DIY, anggota Bhabinkamtibmas memerlukan kendaraan jenis trail untuk menjangkau wilayah, tetapi dengan kendaraan modem bebek, menjadikan sarana tersebut justru menjadi penghambat. Selain itu, Fasilitas kerja anggota bhabinkamtibmas masih kurang, antara lain ATK, komputer, kamera, alat rekam. Pada penelitian ini juga ditemukan sarana kerja bagi Bhabinkamtibmas, seperti kendaraan roda untuk operasional justru dipergunakan untuk fungsi lain, seperti bagian personel, sehingga anggota Bhabinkamtibmas tidak bisa mempergunakan fasilitas tersebut.

Aspek sistem dan metoda, terutama pada alokasi DSPP yang tidak bisa memenuhi jumlah ideal, menjadikan sistem kinerja yang sudah ditetapkan dengan rapi tidak bisa dilaksanakan. Kebijakan untuk menempatkan satu polisi satu desa akhirnya harus dilakukan dengan “modifikasi” mengatur penugasan anggota dari semua fungsi dibagi ke dalam desa/kelurahan. Hal ini menjadikan kinerja tidak bisa efektif. Di samping itu, dalam kaitan dengan sinergitas antara Bhabinkamtibmas dengan fungsi Intel yang dilakukan oleh Unit Intelkam Polsek, memang tidak HTCK yang mengaturnya. Sehingga implementasi di lapangan sangat tergantung dari “intervensi” Kapolsek selaku kepala satuan kewilayahan, serta dari masing-

masing individu Bhabinkamtibmas dan Unit Intelkam yang mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi koordinasi.

Namun begitu, dalam penelitian ini, pada semua wilayah yang dijadikan obyek penelitian menunjukkan bahwa “semangat” Bhabinkamtibmas untuk berinteraksi dengan masyarakat sangat tinggi. Selain itu respon masyarakat atas kinerja Bhabinkamtibmas sangat baik, termasuk penilaian terhadap kehadiran di wilayah dan respon yang sangat cepat kalau dihubungi atau kalau ada masalah yang harus ditangani. Hal ini dari konteks penelitian ini mengenai kemampuan deteksi dini bagi anggota Bhabinkamtibmas, menunjukkan ada “*supporting*” eksternal untuk membantu meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas dari sisi potensi sebagai agen intelijen terbuka.

3. Hambatan dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Hambatan utama dalam memberdayakan Bhabinkamtibmas melalui kemampuan deteksi dini, adalah beban tugas Bhabinkamtibmas di lapangan yang sangat besar. Dalam praktiknya, anggota Bhabinkamtibmas harus menguasai lima fungsi utama kepolisian (samapta, reserse kriminal, intelijen kriminal, lalu lintas, dan binmas), dan seolah-olah ada “tuntutan” kemampuan itu harus dimiliki secara maksimal serta dapat mengimplementasikannya dalam tugas-tugas keseharian. Sementara keterbatasan pendidikan dan pengalaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Dari penelitian ini ditemukan hal positif, bahwa karena beban tugas ini, di satu sisi merupakan hambatan, tetapi di sisi lain justru merupakan tantangan bagi anggota Bhabinkamtibmas. Terutama di daerah kota dengan interaksi sosial dan teknologi yang memadai, kondisi ini menjadikan para anggota

Bhabinkamtibmas dengan semangat tinggi berusaha meningkatkan kompetensi dengan otodidak maupun belajar dari para seniornya. Ini adalah modal yang bagus bagi organisasi kepolisian.

Dalam konteks kemampuan deteksi dini, penelitian ini menemukan bahwa para anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan pelatihan-pelatihan yang spesifik diperlukan untuk mendukung peran sebagai agen intelijen terbuka dalam deteksi dini, seperti kemampuan wawancara tersamar, menganalisis kejadian dan informasi, serta mengklasifikasikan derajat informasi. Walau kemampuan ini adalah spesifik bagi anggota fungsi intekl, tetapi para anggota Bhabinkamtibmas menilai, dalam rangka pelaksanaan tugas, kemampuan ini sangat diperlukan.

Hambatan lain yang menjol adalah dukungan operasional bagi anggota Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tugas pokoknya, termasuk melakukan deteksi dini. Posisi anggota Bhabinkamtibmas di wilayah (desa dan kelurahan), secara sosial berada pada posisi "elite", karena di wilayah tersebut hanya ada seorang diri. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari program "satu desa satu polisi". Dengan posisi ini, maka pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti hajatan pernikahan, takziah jika ada warga yang meninggal, bhakti sosial, dan acara lain dengan lingkup komunitas, kehadiran Bhabinkamtibmas sangat diharapkan warga. Untuk itu diperlukan "biaya sosial" yang cukup tinggi, sebagai contoh saat menghadiri hajatan pernikahan. Dalam biaya operasional Bhabinkamtibmas, anggaran ini tidak ada, sementara dalam rangka menjaga hubungan dengan warga, anggaran ini dibutuhkan.

Selain itu ada biaya operasional lain yang sangat diperlukan untuk menunjang tugas Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini, yaitu dukungan "pulsa" untuk berkomunikasi.

Anggaran dinas untuk ini tidak ada, sementara dalam praktik, terutama dalam komunikasi intensif dengan jaringan atau warga kaitan dalam menjalankan tugas deteksi dini, biaya ini diperlukan.

4. Upaya Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Posisi anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan peran deteksi dini sebagai salah satu peran dalam implementasi Polmas disadari betul oleh Polri, oleh karena itu telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi ini. Pelatihan-pelatihan oleh fungsi intel telah dilakukan, namun dalam temuan penelitian, belum semua anggota Bhabinkamtibmas pernah menjalani pelatihan ini. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran, dan alokasi waktu untuk menyelenggarakan kegiatan ini, sementara tugas rutin tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya, ini salah satu temuan dalam penelitian ini, wawasan intelijen anggota Bhabinkamtibmas tidak optimal.

Polri juga telah melakukan "treatment" agar kebutuhan menyediakan anggota untuk mendukung "satu polisi satu desa" difasilitasi dengan melibatkan anggota di luar Bhabinkamtibmas untuk melakukan fungsi Binmas di desa/kelurahan. Namun karena beban tugas rutin yang membutuhkan konsentrasi tersendiri, serta kompetensi anggota yang bukan Bhabinkamtibmas, maka upaya ini tidak maksimal. Khusus untuk Polda Metro Jaya dan Polda DIY yang menjadi obyek penelitian ini, penyediaan anggota Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa/kelurahan dapat dijalankan dengan proporsional, karena jumlah anggota yang memadai. Namun untuk Polda di luar Jawa, salah satunya adalah Kaltim yang menjadi obyek penelitian, penyediaan anggota di tiap-tiap desa dengan Bhabinkamtibmas yang "full time", tidak dapat dilakukan.

Terobosan untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dilakukan oleh Polda Kaltim dengan menempatkan Polwan sebagai anggota Bhabinkamtibmas. Polwan dipilih adalah warga setempat yang menjadi polisi, sehingga dengan komunitasnya sudah akrab. Di satu sisi, kehadiran Polwan yang putra daerah memberikan dukungan bagi peran deteksi dini, namun karena pada wilayah tersebut ada anggota keluarga / kerabat yang mempunyai hubungan darah, maka pada beberapa kasus yang membutuhkan penegakan hukum, sering menjadi persoalan tersendiri.

E. KESIMPULAN

Dari penelitian ini bisa diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas secara umum cukup memadai, terutama dalam kemampuan mengumpulkan informasi atas suatu kejadian atau fenomena yang berkembang. Namun karena "*feeling intelijen*" tidak dipunyai oleh semua anggota Bhabinkamtibmas, seringkali kejadian atau informasi yang mempunyai implikasi potensi rawan Kamtibmas tidak dapat secara cepat direspons. Termasuk kemampuan melakukan administrasi intelijen yang secara umum masih belum terampil.
2. Keterbatasan pendidikan, karena rekrutmen utama Bhabinkamtibmas dari Brigadir dengan pendidikan dasar SMA serta dukungan anggaran operasional Bhabinkamtibmas masih menjadi kendala dominan yang signifikan dalam rangka optimalisasi kemampuan deteksi dini. Namun "semangat kerja" dari para Bhabinkamtibmas dapat menjadi dukungan untuk mengurangi kelemahan tersebut, terutama dari dukungan masyarakat akan kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya sangatlah signifikan.

3. Beban tugas yang diberikan pada Bhabinkamtibmas seringkali "*over loaded*", karena harus menjalankan perintah pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas di kewilayahan. Distribusi anggota ke daerah-daerah pelosok, terutama di luar Pulau Jawa (secara spesifik dari hasil penelitian ini di wilayah perbatasan) harus menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penyebaran personel.
4. Dalam upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini sebagai implementasi Polmas untuk mendukung program "satu polisi satu desa", Polri telah melakukan berbagai terobosan dengan memberikan penguatan bagi *capacity building* anggota Bhabinkamtibmas. Namun upaya ini baru terlaksana sebagian saja, terutama di kota-kota besar, sementara kebutuhan peningkatan kemampuan, terutama dalam konteks penelitian ini untuk memberikan "wawasan intelijen" yang memadai, diperlukan bagi seluruh anggota Bhabinkamtibmas.

D. REKOMENDASI

Dari penelitian ini, Tim Peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dilakukan pelatihan lima fungsi secara berkala agar anggota Bhabinkamtibmas "fasih" terhadap tupoksi Polri.
2. Secara berkala dilakukan pertemuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perundang-undangan, kebijakan pimpinan Polri, isu-isu kamtibmas terbaru, dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas langsung anggota Bhabinkamtibmas yang harus berinteraksi dengan masyarakat.
3. Diperlukan pertimbangan mengenai anggaran biaya sosial bagi anggota

Bhabinkamtibmas, sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai agen intelijen terbuka dalam rangka deteksi dini tidak menemui kendala di lapangan.

4. Dilakukan pergantian inventaris sarana kerja dengan mempertimbangkan kondisi wilayah tugas. Hal ini karena selain sarana kerja yang minim, seringkali sarana kerja yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi wilayah. Serta dilakukan pengawasan atas sarana kerja yang diberikan sehingga sesuai dengan peruntukannya.
5. Dilakukan pelatihan khusus intelijen agar anggota Bhabinkamtibmas mempunyai wawasan “*feeling* intelijen” sebagai modal untuk menjadi agen intelijen terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, dkk (1999), Panduan Manajemen Intelijen Kepolisian ,PTIK, Bandung 1999

Bayley, David H. 1998. *Police for The Future – Polisi Masa Depan*. Terjemahan Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimiyati. Jakarta : Cipta Manunggal.

Ipong Sumpena, KBP, *Kumpulan Ajar Intelkam, Buku I Mega Mendung, Maret 2003*.

Johnson, Doyle Paul. 1989. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia.

Paulus Purwoko.dkk. 2012. *Manajemen Intelkam*, Jakarta : STIK-PTIK

Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. (1982). *Bureucracy and Policy. Implementation. Homewood: The Dorsey Press*.

Saronto Y. Wahyu. Dkk. 2001. *Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra.

Stone, Deborah A. 1988. *Policy Paradox and Political Reason*. Braindeis : Harper Collins Publishers.

Walker, Samuel. 2001. *Police Accountability : the Role of Citizen Oversight*. Terjemahan oleh Tim PTIK. Omaha, USA : Wadsworth.

Winardi. 2003. “*Teori Organisasi dan Pengorganisasi*”. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.